

Riau: Tiga Gubernur Satu Masalah

# AKTUAL

Edisi 27 | Tahun ke-2 | November 2014

## A NEW PROBLEM

JOKO WIDODO DIANGKAT  
SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA  
KE-7. SETUMPUK MASALAH  
HARUS DISELESAIKAN OLEHNYA  
DENGAN SATU KATA "REVOLUSI  
MENTAL". MAMPUKAH?

Rp 30.000

MAJALAH BERITA DWMINGGUAN  
ISSN 2337-8395





TAK BERBATAS WAKTU MENYIAR KABAR



# AKTUAL

**PENDIRI** M Danial Nafis

**PENASEHAT** Yudi Latif

**PEMIMPIN REDAKSI** Dhia Prekasha Yoedha

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief

**REDAKTUR SENIOR** Satrio Arismunandar,

Hendrajit, Eko Maryadi

**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio

Arismunandar, Hendrajit, Dhia Prekasha Yoedha,

Eko Maryadi, Wahyu Romadhony

**DIREKTUR MAJALAH** Wahyu Romadhony

**REDAKTUR** Andy Abdul Hamid, Ari Purwanto,

Nebby Mahbubirrahman, Tino Oktaviano (Foto),

Sukardjito

**ASISTEN REDAKTUR** Ismed Eka Kusuma, Nurlail,

Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Saeful Anwar

**STAF REDAKSI** Fadlan Syam Buttho, Fitria

Damayanti, Indra Tjahya, Maulana Khamal

Macharani, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal

Sikumbang, Syahrul Saleh, Vina Fatma Sari, Wisnu

Yusep, Nicha Muslimawati, Hanny Haniffa, Junaidi

(Foto), Warnoto (TV)

**IT** Radius Rasmangun, Yudi Astira

**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, WM Desangga

**WEB DESAIN** Jeffry Sandi Kesuma

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh),

Achmadi Parandangi (Makasar), Fitra Ismu

(Meksiko), Aceng Mukkaram (Pontianak), Albertus

Vincentius (Kupang), Damai Oktavianus Mendrofa

(Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat

Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah

(Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan

(Denpasar), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas

(Bojonegoro), Ikbah Kukuh (Bandung).

**PEMIMPIN PERUSAHAAN** Febrianto

**DIREKTUR OPERASIONAL** Rinrin Sukmariana

**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah

**MANAGER MARKETING** Eva Rina Thamrin

**MANAGER SIRKULASI** Widhi Maulana

**SEKRETARIS REDAKSI** Tsurayya Zahra

**STAF ADMIN** Zulkifli

**ALAMAT REDAKSI**

PT Cahaya Profetis

Cawang Kencana Building

1st Floor Suite 101

Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang

DKI Jakarta 13630 Indonesia

No Telp : (021) 8005520

Fax : (021) 80886466

Email : [majalah@aktual.co](mailto:majalah@aktual.co)

[iklan@aktual.co](mailto:iklan@aktual.co)

Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email [majalah@aktual.co](mailto:majalah@aktual.co). Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk.

**aktual.co**  
TERANGAT TERPERCAYA

**aktualTV**

## Kerja Kabinet Kerja, Bersama Merah Putih Menuju Indonesia Hebat

Arah menuju pematangan demokrasi di Indonesia, kini mengacu di jalur yang benar. Kehendak rakyat mengarahkan proses pematangan itu kentara pada hasil Pileg 9 April dan Pilpres 9 Juli.

Komposisi akhir hasil pilpres berupa Kabinet Kerja presiden terpilih Joko Widodo, dan hasil akhir komposisi kepengurusan lembaga-lembaga negara perwakilan rakyat, DPR, DPD, maupun MPR, tampak saling menjawab. Entah bagaimana, komposisi kepemimpinan di setiap lembaga sistem presidensial, baik itu penyelenggara kewenangan eksekutif maupun pelaksana kekuasaan legislatif, jatuh kepada kubu yang berbeda sesuai kebhinekaan republik ini.

Itulah komposisi kedua pihak yang semula bersaing ketat memperebutkan kepercayaan rakyat. Keberagaman hasil Pileg maupun kemuaraan hasil Pilpres membuktikan keseimbangan masing-masing kubu aspirasi, tetap bisa saling bertaut.

Eksekutif kini dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla, presiden dan wakil presiden terpilih dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Legislatif sebaliknya didominasi kubu parpol pendukung capres – cawapres, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, Koalisi Merah Putih (KMP).

Dengan kata lain, harapan rakyat yang mengidamkan transparansi maupun *check and balances* makin tampak di depan mata. Ini terungkap dalam sikap DPD, selaku lembaga perwakilan rakyat nonpartai, yang coba menjernihkan isu keberlanjutan perseteruan antar kubu Jokowi-JK

versus kubu Prabowo-Hatta, lewat motto, “Bersama Merah Putih, Menuju Indonesia Hebat.”

Alhasil, alangkah ganjil, jika ada yang mencerca seakan KMP serakah menguasai semua unsur kepemimpinan DPR hingga ke Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Apalagi lalu dikaitkan pada isu seolah KIH ketakutan program Jokowi-JK bisa terjegal oleh parlemen. Siapapun tahu, jika ada program prorakyat dijegal, maka rakyat sendiri yang akan bertindak langsung menjadi hakim.

Juga ganjil jika ada yang memprovokasi, seakan lembaga rakyat kini terbelah jadi DPR KMP dan DPR KIH, akibat PPP banting setir menyeberang ke KIH dengan menghembuskan “versi kembar” kepemimpinan PPP. Padahal jumlah fraksi di DPR tak bisa mendadak jadi 11 dari 10. Lagi pula, di parlemen negara manapun lazim ada faksi oposisi (penyeimbang) dan faksi pemerintah.

Kelaziman itu memungkinkan pula kelahiran semacam ‘kabinet bayangan’ yang dibentuk faksi oposisi untuk mengimbangi kebijakan politik eksekutif dari kerja Kabinet Kerja. Selazim jika faksi pemerintah melancarkan counter opposition lewat penggalangan semacam “tandingan kepemimpinan” atas faksi oposisi. Kedua faksi itu akan sama-sama bergelut di parlemen. Semua itu layak demi menyelamatkan aspirasi rakyat banyak.

Yang diperlukan bangsa ini adalah kenegarawanan sikap para elit, sebagaimana kata Abraham Lincoln tentang hakekat demokrasi sebagai, “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” ■



# Daftar Isi

Edisi 27 | Tahun ke-2 | November 2014

## Laporan Utama

### 14 Noda Merah Kabinet Kerja

Catatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membentuk kabinet mengundang polemik.



### 16 Selamat Datang Revolusi Metal

Plesetan ini tidak lepas dari kontroversi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.



### 22 Kabinet Kerja, Quo Vadis Jokowi?

Gerangan apa yang mendorong Jokowi menghindari penggunaan kata Trisakti yang kental bermuatan ideologis.



### 26 Membaca Japanese Connection di Kabinet Jokowi-JK

Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro, Rini Sumarno dan Sudirman Said, harus dibaca sebagai wakil dari the Japanese Connection di kabinet Jokowi-JK.



### 30 Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya - Majapahit

Pemerintahan baru Jokowi-JK bertekad mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun, untuk mewujudkan gagasan besar itu banyak tantangan yang harus dihadapi.



### 34 Melihat Jokowi dari Kacamata Media Internasional

Pro kontra soal kemampuan Jokowi memimpin negara ini sempat mewarnai media dalam tiga bulan terakhir ini.



### 10 POLITIK

#### Kasihani Puan



### 36 HUKUM

#### Ada Apa di Riau?



### 44 EKONOMI

#### Penaikkan Subsidi BBM Hemat APBN



### 52 INTERNASIONAL

#### Selangkah Menuju Palestina Merdeka



### 54 OLAHRAGA

#### Ketika Sepakbola Seperti Sampah



- 3 Tatap Redaksi
- 5 Surat Pembaca
- 6 Kaki Hari
- 8 Lensa Aktual
- 12 Kilas Politik
- 42 Kilas Hukum
- 48 Kilas Ekonomi
- 50 Kilas Energi
- 56 Kilas Nusantara
- 58 Oase



Dapatkan Majalah Digital Aktual di:

**aktual.co**  
TERHANGAT TERPERCAYA



## Tolak Kenaikan Tarif Tol Ruas Jakarta - Cikampek

Kebijakan menaikkan tarif tol Jakarta-Cikampek per Oktober 2014 oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Operator Tol (PT Jasa Marga tbk) sarat kongkalingkong dan hanya mencari keuntungan semata ditengah pelayanan yang tidak maksimal kemacetan panjang di gerbang tol, infrastruktur yang tidak memadai masih ditemukan jalan yang bergelombang, rusak dan alat penerangan yang acap kali mati.

Kebijakan menaikkan tarif tol Ruas Jakarta - Cikampek mengabaikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Di mana besaran kenaikan tol Jakarta-Cikampek akan dibedakan menjadi dua yaitu tarif tertutup dan terbuka. Untuk pengenaan tarif terbuka diberlakukan pada rute Cawang-Cikarang Barat sepanjang 31,2 km dengan persentase besaran tarif antara 9,09 persen hingga 14,29 persen atau Rp 500 hingga Rp 1.000. Sedangkan untuk tarif tertutup dikenakan mulai Cikarang Barat hingga Cikampek sejauh 41,3 km dengan besaran kenaikan tarif bervariasi antara 10,26 persen hingga 13,33 persen atau Rp 1.500-Rp 4.500.

Sebagai bentuk penolakan atas kenaikan tarif tol Jakarta-Cikampek, para pengguna jalan tol, konsumen dan masyarakat yang tergabung dalam “Koalisi Masyarakat Menolak Kenaikan Tarif Tol (KOMET)” meminta agar kenaikan tarif tol ruas Jakarta-Cikampek dibatalkan, motivasi operator tol jangan hanya mencari keuntungan tanpa memberikan standar pelayanan yang memuaskan konsumen.

**Yepta Wattimury**

Humas KOMET

Telepon 085215567277

## Menanti Kabinet Trisakti Bukan Trisakit

Sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2014 kata Trisakti seakan hampir setiap saat menjadi bahan perbincangan rakyat Indonesia. Bukan apa-apa, kata Trisakti menjadi bahan jualan dari kedua calon presiden yang menjadi kontestan dalam pemilihan presiden kali ini.

Dan kata Trisakti menjadi pamungkas manakala pada saat Presiden Jokowi menjadikannya sebagai inti dari Pidato Kenegaraan pertama beliau pada saat mengambil sumpah menjadi Presiden di forum sidang MPR.

Berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya adalah tiga rangkaian kalimat yang mengandung makna besar apalagi diucapkan dalam forum besar sekelas sidang MPR dan dihadiri oleh beberapa kepala negara sahabat.

Bagi Presiden Jokowi dan pemerintahannya kedepan akan terus menuai dukungan dari rakyat ketika cita-cita Trisakti di atas menjadi ruh dari jalannya pemerintahan akan tetapi akan menjadi “senjata makan tuan” ketika ruh Trisakti justru jauh dari program pemerintahan Jokowi-JK.

Catatan yang menjadi awal evaluasi bagi Pemerintahan Jokowi-JK adalah penempatan orang-orang yang akan dipilih menjadi Menteri dalam kabinet. Hal ini penting mengingat cerminan dari program pemerintahan akan terlihat dengan siapa yang akan terpilih dalam kabinet Jokowi-JK.

Karena semangat Jokowi-JK adalah semangat Trisakti maka struktur kabinetnya pun harus mencerminkan semangat Trisakti. Orang-orang yang selama ini disinyalir menjadi agen komprador neoliberal harusnya tidak masuk dalam urutan kandidat menjadi menteri.

Pesan Bung Karno,”dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis yang memakan nangkanya”, dalam artian sebagian besar rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar dengan memilih Jokowi-JK tidak lagi hanya menjadi “Pengupas Nangka”.

Semoga cita-cita Jokowi-JK tentang Trisakti betul-betul menjadi Trisakti bukan malah menjadi Trisakit.

**Alif Kamal, Staf Deputy Politik KPP PRD**

amalalifo07@gmail.com

# Politik Identitas dan Tantangan Kapitalisme Internasional

D i seluruh dunia, "politik identitas" yang mengukuhkan perbedaan baju identitas kolektif berbasis etnis dan agama mengalami gelombang pasang. Di Indonesia sendiri, pergeseran dari rezim otoritarian menuju demokrasi membawa kabar baik dalam pemulihan kebebasan berekspresi dan berasosiasi. Namun, sekaligus mengandung potensi ancaman dari menguatnya fundamentalisme etno-religius dan fundamentalisme pasar, dengan ekspresi kekerasan yang menyertainya.

Karena setiap pencarian identitas memerlukan perbedaan dengan yang lain, maka politik identitas senantiasa merupakan politik penciptaan perbedaan. Apa yang harus diwaspadai dari kecenderungan ini, bukanlah dialektika yang tak terhindarkan dari identitas/perbedaan. Tapi, melainkan ancaman dari munculnya keyakinan atavistik yang berkeyakinan, bahwa suatu identitas hanya bisa dipertahankan dan diamankan dengan cara menghabisi perbedaan.

Usaha menghadapi tantangan kapitalisme internasional, invasi modal atas demokrasi, serta menguatnya pragmatisme dalam politik yang bersahutan dengan gelombang pasang "politik identitas" jelas tidak bisa diatasi oleh sekadar penjelimitan prosedur demokrasi. Perlu ada kesengajaan untuk merumuskan visi ideologis yang sepadan dengan tantangan.

Ideologi, seperti diingatkan Bung Karno, merupakan cara ampuh untuk menghadirkan kekuatan kolektif. Ketika elit politik tak menghiraukan ideologi dan disiplin ideologis, partai politik mudah didikte oleh kekuatan uang dan kepentingan perseorangan.

Dalam konteks inilah, Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan), pada pembukaan Kongres ketiganya di Bali (6 April 2010) menemukan relevansi dan aktualitasnya. Dalam pidato itu, Megawati Soekarnoputeri mencemaskan perkembangan partai politik yang semakin diorientasikan untuk mengejar nafsu pragmatis seraya meninggalkan tanggung jawab fundamental dan disiplin ideologisnya.

"Saya sungguh berduka karena politik telah direduksi tidak lebih dari sekadar urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antar kekuatan politik, antar elit politik. Saya berduka karena pemahaman di atas meninggalkan inti etis dan ideologis dari politik sebagai seni



dan sarana kebudayaan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan politik, keberdikarian ekonomi, dan jati-diri kebudayaan kita sebagai bangsa merdeka."

Megawati juga mengajak kader-

kader PDI-Perjuangan untuk mengembalikan partai ke jalur partai pelopor, dengan disiplin kepartaian yang kuat, guna mencapai kembali kejayaan partai dalam mengemban cita-cita sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

"Dalam kesempatan ini saya perlu tegaskan bahwa cita-cita yang melekat dalam sejarah Partai kita jauh lebih besar dari sekadar urusan kursi di parlemen, sejumlah menteri, ataupun istana merdeka. Kita diajarkan dan ditakdirkan oleh sejarah bahwa perjuangan mengangkat harkat-martabat *wong cilik* seperti yang dilakukan Bung Karno adalah lebih utama dari urusan bagi-bagi kekuasaan. Saya ingin tegaskan bahwa dalam dialektika dengan rakyat, tugas sejarah setiap kader akan dinilai, dan tugas sejarah dari partai akan ditimbang. Saya berkeyakinan, dalam kegotong-royongan dan permusyawaratan dengan rakyat, masa depan PDI Perjuangan akan menemukan puncak keemasannya. Karenanya sebagai kader, kita harus berbangga bukan ketika kita bersekutu dengan kekuasaan, tapi ketika kita bersama-sama menangis dan bersama-sama tertawa dengan rakyat."

Dalam gelombang pasang pragmatisme, menumbuhkan disiplin kepartaian dalam garis partai pelopor tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, dalam situasi kegawatan seperti inilah justru spirit Bung Karno terasa dibutuhkan. Menurut Bung Karno (1964), menguraikan cita-cita kemerdekaan dan ajaran Pancasila pada 1 Juni 1945, dengan disaksikan oleh opsir-opsir balatentara Jepang dan dijaga serdadu yang bersenjata bayonet adalah suatu pertarungan yang penuh risiko.

"bahwa utjapan yang hendak





saja utjapkan mungkin adalah satu utjapan jang berbahaja bagi diriku.”

Namun, menurutnya, ia senantiasa teringat akan ajaran yang diberikan oleh Shri Krisna kepada Arjuna, “Karmane fadikaraste mapalesju kadatthana, artinya, kerjakan kewadajibanmu tanpa menghitung-hitung akan akibatnja.”

Pada akhirnya, Megawati meletakkan etos kejuangan partai pelopor itu dalam garis ideologis “Pancasila”, seperti yang dikemukakan Bung Karno pada 1 Juni 1945. Garis ideologi Pancasila ini merupakan pilihan yang tepat untuk merespons tantangan zaman. Berbagai tantangan dalam kehidupan global dan domestik di atas, nyatanya jauh-jauh hari telah diantisipasi secara visioner oleh Pancasila.

Dalam mengantisipasi kemungkinan menguatnya fundamentalisme agama, sila pertama menekankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban. Seperti dinyatakan Bung Karno, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya ‘egoisme-agama’ ... Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain.”

Dalam mengantisipasi dampak-dampak destruktif dari globalisasi dan lokalisasi, dalam bentuk homogenisasi dan partikularisasi identitas, prinsip “sosio-nasionalisme” yang tertuang dalam sila kedua dan ketiga Pancasila telah memberikan jawaban yang jitu.

Dalam prinsip “sosio-nasionalisme”, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan,

berdiri atas prinsip semua untuk semua. Saat yang sama, kebangsaan Indonesia juga kebangsaan yang berperikemanusiaan, yang mengarah pada persaudaraan, keadilan dan keadaban dunia.

Dikatakan Bung Karno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman-sarinya internasionalisme”.

Dalam mengantisipasi tirani dan ketidakadilan dalam politik dan ekonomi, prinsip “sosio-demokrasi” yang tertuang dalam sila keempat dan kelima Pancasila, memberi solusi yang andal. Menurut prinsip ini, demokrasi politik harus bersejalan dengan demokrasi ekonomi.

Pada ranah politik, demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) yang bersifat imparisial, dengan melibatkan dan mempertimbangan pendapat semua pihak secara inklusif.

Pada ranah ekonomi, negara harus aktif mengupayakan keadilan sosial, dalam rangka mengatasi dan mengimbangi ketidaksetaraan yang yang terjadi di pasar, dengan jalan mengembangkan perekonomian koperasi, menjaga iklim kompetisi yang sehat, membela yang lemah, serta berinvestasi dalam *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Akan tetapi, kekuatan visi ideologis itu perlu diuji dalam

praksis. Selain bermodalkan keberanian, suatu partai pelopor yang setia di garis Marhaen, harus menunjukkan satunya kata dan perbuatan. PDI-Perjuangan

sebagai partai Marhaen, seperti diingatkan

Bung Karno, tidak boleh berkembang menjadi “partai burjois”, “partai “ningrat”, dan “partai reformis ecek-ecek” yang mengabdikan pada kepentingan segelintir orang dan perubahan permukaan (*incremental*).

PDI-Perjuangan

harus mengusung misi perubahan fundamental pada level ‘ommekeer’ (susunan sosial), yang berkhidmat pada misi pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat.

PDI-Perjuangan juga dituntut untuk menjaga disiplin partai yang kuat. Disiplin dalam ideologi, disiplin pada teori pergerakan, disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam taktik, dan disiplin dalam propaganda.

Hanya dengan cara itu, PDI-Perjuangan akan menjadi jangkar yang kuat di tengah samudera krisis nilai dan kepercayaan, yang akan membawa kapal-kapal politik yang oleng berputar haluan mencari tambahan.

Dengan cara itulah, PDI-Perjuangan bisa mencapai kejayaannya: kejayaan partai yang membawa kejayaan bangsa.

Selamat Berjuang! Seperti wejangan Bung Karno, “Mari kita berjalan terus, terus! *Onward, ever onward, never retreat!* Insya Allah kita pasti menang!” ■

Ir Soekarno menekankan perlunya bangsa ini menempuh jalan nasionalisme dan jalan demokrasinya sendiri, yang ia namakan sebagai “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi”.





## Evakuasi Korban Jembatan Roboh

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana melakukan evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan jembatan penghubung Gedung Perpustakaan dan Gedung Arsip di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Jembatan yang masih dalam proses pencoran itu ambruk, menyebabkan lima pekerja terluka dan empat lainnya tewas tertimbun.

**Antara - Vitalis Yogi Trisna**





#### KOORDINASI FRAKSI PDIP.

Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan Puan Maharani berunding dengan anggota lain DPR fraksi PDI-P, setelah fraksi Partai Demokrat “walk out” dalam rapat paripurna yang membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9).

# Kasih Puan

Oleh: Soemitro

**S**enyum mengembang di bibir Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding Selasa (7/10). Siang itu menjelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terjadi perubahan peta dukungan. Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapatkan angin segar karena kiblat politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berubah. “Yang jelas, 100 persen PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat,” ujar Karding.

Partai yang dipimpin Suryadarma Ali tersebut limbung setelah tidak ada kadernya yang masuk dalam paket pimpinan MPR yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP). Ketidakjelasan posisi pimpinan PPP menjadi salah satu pertimbangan KMP untuk tidak memasukkannya dalam paket. “Yang namanya politik ada tawar menawar, lobi fraksi, tapi itu tadi, kalau kami tak bisa dapatkan kursi itu di KMP, jangan salahkan PPP kalau ke lain hati,” ujar Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha.

Kegagalan PPP langsung disambut oleh KIH dengan mengutus sejumlah elit koalisi. Ketua Fraksi

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani sebagai pimpinan koalisi mengutus Wasekjen PDI-P Ahmad Basarah menjalin komunikasi dengan elit PPP. Basarah hilir mudik menjalin komunikasi di detik-detik menjelang dibukanya rapat paripurna.

Pukul 20:56 WIB, PPP baru memastikan diri untuk berlabuh ke KIH. Di ruangan Fraksi PPP, KIH sepakat menandatangani nota kesepahaman. Perjanjian di atas materai dengan PPP tersebut menandai babak baru peta koalisi malam itu.

Hadir Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Sekretaris Fraksi PDIP MPR Trimedyia Pandjaitan, Sekretaris Fraksi PKB MPR Abdul Kadir Karding, Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin, dan calon wakil ketua MPR dari NasDem, Bactiar Aly.

Dari PPP yang mengikuti acara penandatanganan adalah Sekjen Romahurmuziy, Waketum Hasrul Azwar, Waketum Suharso Monoarfa, dan Ketua Fraksi PPP MPR Irgan Chairul Mahfidz. Tak ada Suryadharma dalam penandatanganan perjanjian ini.

Kesepakatan tersebut membuat Puan Maharani bernafas lega. KIH optimis dapat memenangkan dan menguasai pimpinan MPR. Terlebih sebelumnya KIH sudah mendapatkan dukungan dari calon pimpinan MPR yang diusung oleh Dewan Permusyawaratan Daerah (DPD). Yakni Oesman Sapta Odang. “Kami berharap PPP konsisten, kalau ingin bersama dengan kami ya tunjukkan komitmen bahwa memang dalam berjuang politik ini tidak bisa terus-terusan dua kaki,” kata Puan.

Dukungan itu membuat KIH percaya diri meminta segera dilakukan pemilihan. Sidang paripurna menyepakati pemilihan dilakukan tertutup. KIH mengajukan paket yang terdiri dari calon ketua MPR Oesman Sapta (DPD), didampingi empat calon wakil ketua MPR, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP). Sementara itu KMP yang dipimpin oleh Setya Novanto mengajukan paket Ketua MPR Zulkifli Hasan (PAN), dengan Wakil Ketua MPR Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Ini merupakan pertarungan ketiga Puan sebagai pimpinan



partai pendukung pemerintah. Sejak PDI-P menang dalam pemilu legislatif Puan sudah memimpin dua kali pertarungan melawan KMP. Pertarungan pertama saat pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada pertarungan tersebut Puan dan poros koalisinya kalah voting dalam sidang paripurna. Pertarungan kedua saat Puan memimpin pemilihan Ketua DPR. Paket yang diusung KMP menang setelah KIH memilih *walkout* dalam sidang.

Pemilihan Pimpinan MPR ini diharapkan bisa membuka peluang koalisi pendukung pemerintah untuk menang. Hal ini tidak lepas dari kewenangan MPR yang bisa melakukan pemakzulan terhadap Presiden dengan berdasarkan landasan hukum tertentu. Maka sudah tentu menguasai pimpinan MPR mutlak harus dilakukan KIH.

Jelang tengah malam satu persatu anggota parlemen melakukan pemilihan. Sebanyak 677 anggota bergantian memasuki bilik suara. Hingga menjelang subuh pemilihan baru selesai digelar. Dipimpin pimpinan sementara, Maimanah Umar, anggota tertua, yang didampingi Ade Rezki Pratama, anggota termuda, perhitungan dilakukan. Hasilnya pagi itu Puan kembali menelan pil pahit. Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sebaliknya, Paket A yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara. Satu suara abstain.

Di balkon ruang paripurna DPR pendukung KMP bersorak. Politisi pendukung KIH tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Karding ditemui usai pemilihan langsung mengatakan dengan

penguasaan penuh KMP di parlemen, pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa lagi bermain-main.”Sekali salah langkah bisa berbahaya,” ujarnya.

Kekalahan memuat Puan menjadi sorotan. Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengakui Puan tidak melakukan lobi politik kepada KMP. “Kita tidak pernah dilobi (sama Puan), kita juga tidak pernah diajak bicara,” katanya.

Hilangnya sosok Taufik Kiemas menjadi salah satu penyebab gagalnya lobi-lobi PDI-P. Tapi, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo membantah jika lobi Puan dalam memimpin KIH dinilai lemah. “Kami sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan selaku ketua fraksi,” ujarnya.

Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo mengambilalih peran Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani dalam melakukan komunikasi politik di parlemen.

Menurut Dodi, Jokowi mempunyai kemampuan lobi yang cukup baik. Permasalahan pedagang kaki lima di Solo yang pelik, terbukti berhasil diselesaikan Jokowi dengan baik. Terakhir, jelang pelantikannya 20 Oktober, Jokowi juga memperlihatkan kemampuannya dalam menggelar pertemuan dengan Ketua DPR, MPR dan DPR. “Untuk pimpinan lembaga tinggi atau tertinggi negara seperti DPR dan MPR tentu mereka berdua perlu untuk turun langsung. Dan itu bisa dilakukan Jokowi dengan baik,” kata dia.

Ke depan, untuk urusan krusial dan genting, alangkah lebih baik apabila diserahkan ke Jokowi. Bukan lagi Puan yang belum matang sebagai politisi. Kemampuan Jokowi yang lebih ‘soft’ menjadi nilai lebih karena bisa diterima dengan baik.

“Ada urusan yang bersifat personal, misalnya Mega-SBY. Jika untuk isu itu tentu Megawati tak bisa ditinggalkan. Dengan kata lain, kejelian melihat isu menjadi penting untuk menentukan siapa yang harus jadi panglima lobi dan siapa yang harus dilibatkan,” jelas Dodi. ■

### Perjanjian Kerjasama Politik untuk Saling Mendukung

Sehubungan dengan pemilihan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia maka pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2014, kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk selanjutnya disebut para pihak:

- A. 3 Nama Irgan Chairul Mahfiz dan Zainut Tauhid Sa'aadi selaku unsur Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama.
- B. Bambang Sadono dan M Asri Anas selaku unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertindak atas nama DPD

Nama Ahmad Basarah dan TB Hasanudin selaku unsur pimpinan Pimpinan Fraksi PDIP bertindak atas nama PDIP, Bachtiar Aly dan Ahmad Fadholi selaku unsur pimpinan Fraksi Partai Nasdem bertindak atas nama Partai Nasdem. Nama M Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding selaku unsur pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bertindak atas nama PKB.

Nama Syarifuddin Suding dan Hj Dewie Yasin Limpo selaku unsur pimpinan Fraksi Partai Hanura bertindak atas nama Partai Hanura. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua.

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan memposisikan diri dalam kerjasama dan kesepakatan politik bersama untuk saling mendukung dan tidak saling mengingkari dalam penetapan pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.
2. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyatakan tidak akan mendukung Partai atau Fraksi lain selain dari Partai dan atau Fraksi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan Kelompok DPD dalam pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019, hari Selasa 7 oktober 2014.
3. Bahwa Pihak Pertama menyatakan setuju untuk mendukung setiap hal dan atau nama yang diusulkan oleh Pihak Kedua dalam pemilihan Pimpinan MPR Periode 2014-2019, hari Selasa 7 oktober 2014.
4. Bahwa Pihak kedua setuju untuk mendukung setiap hal dan atau nama yang diusulkan oleh Pihak pertama untuk ditetapkan sebagai pimpinan dan atau wakil pimpinan MPR RI Periode 2014-2019 dalam Pemilihan Pimpinan MPR Periode 2014-2019, Selasa 7 Oktober 2014.
5. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan membubuhkan tanda tangan sebagai tanda dan bukti disetujuinya Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat di Jakarta pada Hari Selasa 7 Oktober 2014.

Pihak Pertama:

Pimpinan Fraksi PPP MPR (tanda tangan)

Pihak Kedua:

Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR (tanda tangan)

Pimpinan Fraksi PKB MPR (tanda tangan)

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem MPR (tanda tangan)

Pimpinan Partai Hanura (tanda tangan)

Pimpinan Kelompok DPD (tanda tangan)



# STRES, KIH BENTUK DPR TANDINGAN

Setelah menguasai penuh kursi Kabinet Kerja Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintah, ngotot meminta bagian kursi pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR-RI. Rapat paripurna DPR-RI yang digelar Rabu (29/10) untuk mengesahkan AKD, tidak diakui oleh koalisi pendukung Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KIH bahkan memilih langkah mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR RI yang dipimpin Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. KIH yang dipimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini bahkan membentuk pimpinan tandingan.

“Pimpinan sudah secara nyata mengabaikan hak paling pokok anggotanya, yakni hak untuk menyatakan pendapat. Itu jelas melanggar tata tertib,” kata politisi PDI-P, Arif Wibowo, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Pimpinan yang dibentuk oleh KIH diketuai oleh Pramono Anung (PDI-P) dan terdiri dari empat wakil ketua, yakni Abdul Kadir Karding, Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura).

Sikap KIH ini justru dinilai tidak negarawan oleh Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. “KIH stres menghadapi hegemoni KMP. KIH enggak dewasa dan tidak menunjukkan sosok wakil rakyat yang negarawan dalam berpolitik,” ujarnya.

Selain mengajukan pimpinan DPR tandingan KIH juga mendesak Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti



undang-undang (perppu) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Namun usulan itu, ditolak oleh Wapres Jusuf Kalla. “Saya kira kita tidak boleh obral Perppu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/10).

Sebelumnya KMP telah melakukan pemilihan pimpinan Komisi DPR. Seluruh Komisi dikuasai oleh KMP pasalnya dalam pemilihan tersebut fraksi yang tergabung dalam KIH menolak untuk menghadiri pemilihan.

## PKS Desak KPK Usut Delapan Calon Menteri Jokowi yang Bermasalah



Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut delapan nama calon menteri yang mendapat tanda merah.

Soal tanda merah, dia meminta KPK harus bertindak dan tidak hanya membuat kegaduhan politik di Tanah Air. “Jadi KPK jangan terlalu banyak mengumbar bicara, jangan membuat hal-hal kegaduhan politik. KPK harus usut tuntas secara tegas,” kata Aboe Bakar, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/10).

Dia mengatakan, pengusutan dugaan tindak kejahatan korupsi yang ditandai merah itu adalah ranah KPK. “Yang tahu kasus-kasus korupsi ini KPK, maka jangan mengambil ini menjadi opini publik, menjadi proses hukum,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku ada delapan nama calon menteri yang dicoret KPK.

“Karena kemarin kita menyampaikan itu ke PPATK dan KPK. Dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” kata presiden dalam keterangan persnya. / Saeful Anwar

# Ketum PP Muhamadiyah: Ada Kesengajaan Untuk Terus Meneror Amien Rais

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay meminta kepolisian segera mengusut tuntas penembakan misterius yang terjadi di rumah Amien Rais pada Kamis dini hari.

“Saya melihat ada kesengajaan. Ini bisa saja bagian dari rangkaian teror yang terus-menerus dialamatkan kepada Bapak Amien Rais. Mungkin saja terkait dengan situasi sosial politik belakangan ini,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (11/6).

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR itu menilai penembakan tersebut merupakan teror yang sangat berbahaya. Jika dibiarkan bisa jadi akan terus berlanjut dan menjadi momok yang menakutkan di tengah masyarakat.

Menurut Saleh, polisi seharusnya bisa segera menangkap pelaku penembakan karena semua senjata

api yang beredar di masyarakat diregistrasi oleh kepolisian. Apalagi, polisi memiliki alat-alat yang cukup canggih untuk meneliti kasus-kasus serupa.

“Teroris saja bisa ditangkap. Apalagi pelaku kejadian seperti ini. Logikanya, pasti lebih mudah ditangkap,” ujarnya.

Saleh mengatakan kasus penembakan terhadap warga negara tidak boleh dipandang remeh. Bila dibiarkan bisa menurunkan kepercayaan publik kepada polisi. Apalagi, saat ini kepolisian sedang berupaya meningkatkan profesionalitas dan pelayanan kepada publik.

Saleh mengatakan upaya teror seperti ini tidak akan pernah menyurutkan langkah Amien



Rais menyuarakan kebenaran. Sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan tokoh reformasi, teror seperti ini sudah puluhan, bahkan ratusan kali dialami olehnya.

“Kalau teror ini dimaksudkan untuk mendiamkan Pak Amien, Insya Allah tidak akan berhasil. Bagi Pak Amien, yang benar itu ya benar, kalau salah ya wajib ditegur dan diluruskan. Itu adalah manifestasi kecintaan beliau pada Tanah Air. Masa orang cinta Tanah Air diteror?” katanya. /

*Nebby Mahbubirrahman-(Ant)*



## Prabowo: Beri Kesempatan Pemerintahan Baru Bekerja

Ketua Umum Partai Gerindra mengajak seluruh jajaran Partai Gerindra mendukung pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal ini harus dilakukan

dalam upaya menjaga keutuhan bangsa.

“Pemerintahan sekarang harus diberi kesempatan untuk bekerja dan kami mendukung untuk membuat Indonesia sejahtera serta untuk mengurus kelompok paling miskin,” kata Prabowo kepada pers yang didampingi JK di Istana Wakil

Presiden Jakarta, Selasa (21/10).

Dikatakan Prabowo, pernyataan JK soal keinginan menyejahterakan rakyat dan mengurus kelompok termiskin, telah membesarkan hati Partai Gerindra.

“Dalam demokrasi membutuhkan kritik dan mengkritisi dan hal itu sudah saya sampaikan ke JK,” katanya. / *Ari Purwanto-(Ant)*

## Terlalu Liberal, 122 UU Berpotensi Diamandemen

Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya mengatakan, masih terus mengkaji satu persatu 122 UU yang pro asing.

“122 UU itu masih kita telisik satu persatu,” ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).

Tantowi juga mengatakan 122 itu masih belum final. “Kurang lebih 122 UU yang kita observasi yang terlalu liberal,” ujarnya.

Ketika ditanya, Tantowi belum bisa mengatakan UU apa saja yang akan ditinjau ulang. “Banyak, banyak sekali. Ada UU Perbankan, UU Telekomunikasi dan masih banyak,” tutupnya.

*/ Ari Purwanto - Indra Tjahya*



# NODA MERAH KABINET KERJA

Oleh: Soemitro

**C**atatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla membentuk kabinet mengundang polemik. Delapan nama disebut Presiden mendapat catatan merah dari KPK.

“Kemarin kan kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada KPK dan PPATK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/10).

Masukan berlabel merah KPK ini dijanjikan Jokowi akan dipakai sebagai pertimbangan seleksi. Namun desakan partai pengusung, membuat Presiden terpaksa mengakomodir nama yang dilabeli KPK tak bersih itu. Adanya nama yang diakomodir itu diakui oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain. “Iya ada namanya,” ujarnya saat ditanya apa masih ada nama berlabel merah di kabinet baru.

Alhasil komitmen Presiden memberantas korupsi dipertanyakan sejumlah pihak. Senin, 4 November Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak KPK membuka nama nama menteri berlabel merah ini.

Yang tergabung dalam gerakan dan koalisi ini adalah Yudi Latif, Romo Benny Susetyo, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)

Neta S Pane, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Sebastian Salang, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampow, Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti), Direktur Eksekutif Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, dan para aktifis Ekspone 98, yaitu Siti Maimunah, Riza Damanik, Cilm, Baiquni, dan Sopyan.

Yudi Latif mengatakan, KPK harus segera memeriksa orang-orang yang terindikasi tidak bersih namun tetap dijadikan menteri. Pemeriksaan ini penting guna menghindari berbagai spekulasi yang terlanjur muncul di publik, selama proses pemilihan calon menteri hingga kabinet diumumkan oleh Jokowi.

Dalam pertemuan itu KPK mengutus Adnan Pandu Praja untuk menerima pengaduan. “Apalagi, nama-nama calon menteri itu sudah beredar di kalangan masyarakat lewat berbagai media. Ini merugikan nama baik orang-orang yang namanya disebut-sebut sebagai calon menteri dan yang diduga mendapat tanda merah dan kuning dari KPK,” kata Yudi di KPK, Senin (4/11).

Lembaga antikorupsi pimpinan Abraham Samad ini, menurut Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia ini, wajib mengungkapkan siapa saja menteri berlabel merah dan kuning, yang ‘terpaksa diakomodir’ Jokowi menjadi menteri. KPK harus pula mengungkap alasan pemberian catatan maupun kasus mereka itu.

“Cepat atau lambat mereka akan berurusan dengan KPK,” tutur Yudi.

Terkait upaya pembersihan jabatan publik dari koruptor, Gerakan Dekrit pun mendesak KPK segera memeriksa sejumlah anggota DPR



hingga level pimpinan yang diduga bermasalah. Terutama yang memiliki rekam jejak kasus di KPK. Apalagi, ungkapnya, ada pejabat publik di lembaga legislatif yang terindikasi tidak bersih. KPK harus proaktif menelusuri pejabat publik eselon I dan II, termasuk seluruh direksi BUMN.

Yudi pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri rekam jejak calon menteri.

“Itu konsekuensi dari keinginan Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan bersih,” ucapnya.

Ray Rangkuti juga menyatakan KPK harus didesak untuk memanggil para menteri yang berlabel merah dan kuning. Lembaga antikorupsi itu jangan sekadar melemparkan wacana politik, karena hal itu sama dengan mencabut hak politik seseorang. KPK harus mengungkap kasusnya, bukan sekadar nama-namanya. Semua ini penting guna menghindari fitnah.

Apalagi, lanjut Ray, pelabelan merah dan kuning berkait langsung dengan hak politik mereka.

“Kalau intinya itu merah, kenapa



tidak dicabut saja? segera dicabut nama-nama merah itu. KPK dalam hal ini harus mengungkap kasusnya. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, entah yang bersangkutan dipilih sebagai anggota kabinet atau tidak, sudah seharusnya bagi KPK untuk segera menindaklanjuti kasus mereka,” tandas Ray.

KPK bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kasus yang diduga berkaitan dengan sejumlah menteri yang terlanjur duduk dalam Kabinet Kerja. Terutama demi menanggapi kekhawatiran publik, bahwa nama-nama menteri berlabel merah itu akan menghilang dengan sendirinya. Apalagi, publik selama ini belum pernah mendengar prestasi KPK membongkar kasus korupsi yang terkait masa lalu pejabat publik.

“Jadi kalau KPK masih menggunakan cara yang sama dalam konteks penanganan kasus korupsi, maka nama-nama yang diindikasikan oleh mereka merah itu akan lewat begitu saja. Sekalipun nama-nama itu sudah masuk dalam kabinet,” ungkap Ray.

Baik Ray, Yudi, maupun pegiat lain, berharap KPK tak sekadar tajam dalam operasi tangkap tangan. Tapi

juga pada kasus korupsi masa lalu, sekarang, dan atau yang akan datang.

Kepada pimpinan KPK, jubir gerakan dan koalisi menyerahkan pula sejumlah nama yang diduga bermasalah. Tapi siapa saja mereka, Ray menolak menyebutkannya.

“Kami hanya menyerahkan nama-namanya saja dengan beberapa latar belakangnya,” ucapnya.

Yang pasti, menurut Karyono Wibowo, ada sejumlah nama menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi -JK dan anggota DPR. Semua nama itu diserahkan ke KPK atas dasar penelusuran dan rekam jeaknya yang dilakukan gabungan LSM selama ini.

“Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, mereka itu bermasalah, pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum,” ungkap Karyono.

Sementara itu politisi Hanura Syarifuddin Suding dalam diskusi bertema “Nokta Merah Kabinet Kerja” yang digelar di Gedung DPR, mendukung gerakan untuk membuka nama menteri bermasalah di kabinet baru.

“KPK bisa membuka ke publik terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.

Jokowi, menurut dia, tidak mungkin bisa membersihkan korupsi dengan orang-orang yang bermasalah. Ibaratnya, kata Sudding, tidak mungkin membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor.

“Tidak “Tidak elegan kalau orang yang sudah diberi tanda merah masih ada di kabinet Jokowi-JK,” ujar Sudding.

Heboh soal ada menteri berlabel merah, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, justru berasal dari KPK sendiri. Karena, pimpinan KPK sendiri yang justru menyatakan ada menteri berlabel merah di kabinet Jokowi.

“Yang kita salahkan ketika KPK menyatakan orang bermasalah tetap dimasukkan ke kabinet,” ujar Bambang.

Jika benar ada yang berlabel merah tetap lolos jadi menteri dan dibiarkan KPK, menurut Bambang, itu sama saja KPK telah diperalat Jokowi untuk menyelamatkan orang-orang yang bermasalah hukum.

“Kalau benar ada (di antara) 34 menteri yang bermasalah, maka KPK sudah dijadikan tempat bersih-bersih oleh Jokowi,” katanya.

Sebaliknya, pengamat dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi justru mengkritisi langkah Jokowi yang melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi menteri.

“Karena itu bukan tugas KPK dan PPATK. Ini tugas politis,” ujar Uchok.

Uchok menilai Jokowi hanya memanfaatkan KPK dan PPATK untuk menyingkirkan calon-calon menteri yang tidak dikehendakinya. Karena para menteri Jokowi yang tidak mendapat tanda merah dan kuning dari KPK, menurut Uchok, juga tidak ada jaminan bahwa mereka itu bersih. Apalagi motivasi orang menjadi menteri, saat ini pun cenderung hanya untuk materi.

Untuk itu FITRA berharap KPK jangan terlibat dalam politik internal kekuasaan di eksekutif. “KPK (harus) didorong independen. Kalau seperti ini kerja KPK bisa *berabe*,” kata Uchok. ■



# Selamat Datang Revolusi Metal

Oleh: Sukardjito

**R**evolusi Mental dimulai sejak Kabinet Kerja dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu (26/10). Dan 34 menteri yang sore itu ditetapkan oleh Jokowi-JK adalah perangkat yang akan menuntaskan seluruh janji yang konsep besarnya disebut “Revolusi Mental”.

Terbentuknya kabinet langsung direspon oleh masyarakat. Sejumlah *netizens*, pengguna aktif media sosial, memelesetkan program Presiden Indonesia ke 7 ini dengan sebutan “Revolusi Metal”.

Plesetan ini tidak lepas dari kontroversi atas sosok Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Bos maskapai penerbangan Susi Air itu merokok di Istana Negara usai ditunjuk sebagai menteri. “Stop dong, biar aku bisa selesaikan rokok ini sampai habis,” ujarnya saat hendak diwawancarai.

Tingkah Susi itu sempat diabadikan kamera sejumlah media. Namun perempuan asli Pandeglang itu *cuek*. Foto Susi yang sedang menghisap sebatang rokok pun langsung meramaikan media sosial.

**@JusDalle** berkicau, “Program pertama Menteri Kesehatan, menghentikan kebiasaan tdk sehat Menteri Perikanan & Kelautan yg katanya perokok berat. Lucu ini.”

**@Agoeswidjaja** berkicau, “Menteri perempuan merokok di

depan publik, bisa kontra produktif dg #revolusiMental”

**@roberthfuad** berkicau, “Susi, sang menteri. Merokok di saksikan seantero negeri. Oh, Jokowi. Inikah kualitas yang kau janjikan pada kami?”

**@adhianpatria** berkicau, “Ibu Susi Pudjiastuti, tamatan SMP, nyentrik ga suka pake bra, merokok. Woooow! Salut keren, GO kabinet kerja!”

**@andrizalmxp** berkicau “Bukan contoh yg baik RT @ibnupurna: Susi, Menteri Nyentrik Gemar Merokok dan Punya Tato”

**@pkspiyanung** berkicau “Bu Menteri aja merokok dan

bertato...”

**@o2tanggulang** berkicau, “Juga Tidak Pake Bra RT @freddy\_ggmu: Jadi Menteri, Susi: Saya Mungkin Tidak Berpendidikan, Tapi Saya Profesional”

Bukan cuman Menteri Susi yang menjadi sorotan di kabinet Kerja. Pada rapat kabinet perdana giliran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang menjadi disorot. Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut merokok di area istana saat sesi pemotretan kabinet.

Saat itu Hanif, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin berbincang dengan wartawan di depan Masjid Istana. Marwan dan Hanif tampak merokok sambil melayani wawancara pers.

Tidak berapa lama, Marwan pergi bersama sang istri dan



Dari kiri: Hanif Dhakiri, Rini Soemarno, Susi Pudjiastuti

anak, Yang tinggal hanya Hanif dan wartawan.

Di sela-sela berbincang santai sambil duduk di tepi rumput, seorang anggota Paspampres berseragam TNI mendatangi Hanif. Dengan tegas, dia meminta Hanif untuk mematikan rokoknya.

"Pak, tolong jangan merokok di sini ya," ujar Paspampres dengan nada tegas.

"Oh, siap salah, Pak," jawab Hanif sembari mematikan bara rokoknya ke aspal.

Wartawan yang semula berbincang dengannya pun tertawa geli melihat kejadian itu. Wartawan kemudian memberi tahu kepada Paspampres bahwa orang yang baru saja ditegur itu adalah menteri baru.

"Oh, maaf, ya maklum, saya masih belum kenal," ujar Paspampres sembari senyum-senyum dan membungkukkan badannya ke arah Hanif.

"Enggak apa-apa, Pak," ujar Hanif seraya tertawa.

Dari sekian kelumit kontroversi di kabinet pemerintahan baru, mungkin tidak ada yang semenarik masuknya nama Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua Tim Transisi ini sempat terganjal masuk dalam bursa kabinet Jokowi-JK setelah

dikabarkan masuk daftar merah saat diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Penolakan atas Rini disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil yang mendukung Jokowi saat kampanye lalu.

"Mestinya Jokowi menindaklanjuti rekomendasi KPK, kalau tidak mau, dari awal nggak perlu ke KPK atau PPATK," kata Koordinator ICW, Ade Irawan.

Peneliti Senior Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menilai masuknya Rini mencoreng jargon Trisakti yang selama ini digembargemborkan Jokowi-JK.

"Wajah kabinet seperti itu, itu yang saya sebut dengan paradoks. Satu sisi Pak Jokowi ingin jalankan ajaran Trisakti tapi orang neolib dimasukkan," ujarnya.

Informasi yang dihimpun Aktual menyebut masuknya Rini tidak lepas dari negosiasi

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ical menolak Sri Mulyani masuk kabinet Jokowi. Ical dan Sri memiliki catatan buruk saat mereka sama-sama di kabinet Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono. Keduanya berseteru terkait dana gantirugi bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Sri sempat bersitegang saat saham keluarga Bakrie *disuspend* dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Semua itu membuat Ical ogah jika Sri yang saat menjabat sebagai Direktur Innternasional Monetary Fund (IMF) di Amerika Serikat, kembali ke Indonesia.

Alhasil, Rini jadi titik kompromi Ical dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Tapi kabar ini dibantah Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. "Itu tidak benar tidak ada hubungan antara ARB (Red sebutan Ical) dengan Rini," bantahnya.

Namun hubungan Rini dan Ical jelas terpampang di laman grup Bakrie yakni Komisaris Independen PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL). *Profile* Bakrie Telecom menyebut, Rini menjabat Komisaris Independen sejak tahun 2012. Rini juga jadi Komisaris PT Agrarini dan perusahaan yang bergerak di properti dan makanan. Sebelum di Bakrie, Rini pernah jadi Presiden Komisaris PT Darma Henwa, Tbk 2007-2011, Presiden Komisaris PT DH Energy 2008 – 2012.

Rini peraih Bachelor ekonomi dari Wellesly College, Massachusetts, AS tahun 1980 ini, pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan 2001 - 2004. Sebelum itu, dia Presiden Direktur PT Astra International Tbk 1998 - 2000, Wakil Ketua BPPN periode Januari hingga Juni 1998, Direktur Keuangan PT Astra International Tbk 1990-1998 dan Vice President Citibank NA Jakarta tahun 1989.

Terkait dengan kaitan posisi Rini itu, perusahaan telekomunikasi Grup Bakrie menyatakan Rini sudah mundur dari komisaris independen efektif sejak 30 Agustus 2014.

"Sesuai ketentuan perusahaan, pengunduran diri tersebut efektif pada tanggal 30 Agustus 2014," ujar *Corporate Secretary* BTEL Harya Mitra Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10). ■



# PROFIL SINGKAT 34 MENTERI KABINET JOKOWI - JK

Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pada Minggu (26/10). Kabinet yang terdiri dari 34 menteri dan dilantik pada Senin (27/10) ini dinamai Kabinet Kerja. Mereka ini terdiri dari 20 tokoh dari kalangan profesional dan 14 lagi dari partai politik. Berikut profil singkat ke-34 menteri tersebut.

## MENTERI SEKRETARIS NEGARA

### PRATIKNO

Bojonegoro, 13 Februari 1962. Rektor Universitas Gadjah Mada ke-14. Anggota Tim Tiga bersama Andrinof Chaniago dan Cornelis Lay, yang bertugas membantu menyelesaikan kerja Tim Transisi. S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM (1985). Program magister di Birmingham University Inggris, Jurusan Development Administration (1991). Program doktorat Jurusan Political Science Fakultas Social Science Flinders University Australia (1997).



## MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

### ANDRINOF ACHIR CHANIAGO

Padang Sumatera Barat, 3 November 1962. Pengajar di FISIP UI. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Regional and Urban Studies (Cirus) Surveyors Group (CSG). Ketua Umum Perhimpunan Survey Opini Publik Indonesia. S1 FISIP UI Jurusan Ilmu Politik. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI. Program Doktorat Jurusan Ilmu Filsafat.

## MENTERI KOORDINATOR KEMARITIMAN

### INDROYONO SUSILO

Bandung, 27 Maret 1955. Direktur Pengelolaan Perikanan pada Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agricultural Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma (2012-2014). SMA di Maryland Amerika Serikat. S1 Institut Teknologi Bandung, Jurusan Teknik Geologi (1979). S2 Universitas Michigan Jurusan Penginderaan Jauh (Remote Sensing), Amerika Serikat (1981). S3 Universitas Iowa Jurusan Penginderaan Jauh, Amerika Serikat (1987).



## MENTERI PERHUBUNGAN

### IGNATIUS JONAN

Singapura, 21 Juni 1963. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 2009- sekarang. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 2001-2006. Managing Direktor Citibank 2006-2009. S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. S2 Tufts University Amerika Serikat, jurusan Finance and International Law. Universitas Iowa Jurusan Penginderaan Jauh, Amerika Serikat (1987).

## MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

### SUSI PUDJIASTUTI

Pangandaran Jawa Barat, 15 Januari 1965. Pengusaha dibidang perikanan dan penerbangan dibawah bendera PT ASI Pudjiastuti Marine Product. PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air). Menamatkan pendidikannya sampai tingkat pertama (SMP).

## MENTERI PARIWISATA

### ARIEF YAHYA

Banyuwangi Jawa Timur, 2 Maret 1961. CEO PT Telekomunikasi Indonesia. Direktur Enterprise dan Wholesale Telkom Indonesia. Kepala Divisi Regional V (Jawa Timur) dan Kepala Divisi Regional VI (Kalimantan). S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. S2 Telematika (Software & Telecommunications) Universitas Surrey, Inggris. S3 Universitas Padjadjaran Bandung.

## MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### SUDIRMAN SAID

Purbowikerto, 14 Maret 1947. Direktur Utama PT Pindad, Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero). S1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1990). S2 Bidang Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat (1994).



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEREKONOMIAN  
SOFYAN A DJALIL**

Aceh, 23 September 1953. Menteri Negara BUMN (2007- 2009). Menkominfo (2004-2007). S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1984). Program magister pada dua program studi di Tufts University Amerika Serikat Jurusan Public Policy (1989) dan bidang studi International Economic Relation (1991). Program doktorat dengan bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy (1993).

**MENTERI KEUANGAN  
BAMBANG PERMADI SOEMANTRI  
BRODJONEGORO**

Jakarta, 3 Oktober 1966. Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. S1 di Universitas Indonesia, bidang studi Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Regional (1990). Melanjutkan magister (S2) Bidang Studi Tata Transportasi dan Ekonomi Pembangunan di University of Illinois at Urbana-Champaign (1993) dan program doktor di kampus yang sama dengan studi Ilmu Regional dan Ekonomi Pembangunan (1997).

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH  
ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA**

Denpasar, 7 Juli 1965. Wakil Gubernur Bali (2008-2013). Walikota Denpasar dua periode, periode 2000-2005 dan periode 2005-2008. Putra tokoh PNI, alm Cokorda Bagus Sayoga, ini pernah mengenyam pendidikan di Australia namun tidak selesai. Menyelesaikan pendidikan sarjananya pada Fisipil Universitas Ngurah Rai Denpasar (1991).

**MENTERI KEHUTANAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP  
SITI NURBAYA BAKAR**

Jakarta, 28 Agustus 1956. Ketua Bidang Otonomi Daerah DPP Partai NasDem. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2001-2005). Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI (2006). S1 Institut Pertanian Bogor tahun 1979. Program magister di International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC), Enschede, Belanda (1988) serta program doktor di IPB kolaborasi dengan Siegen University, Jerman (1998).

**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
BASUKI HADI MULJONO**

Surakarta, Jawa Tengah, 5 November 1954. Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU (2014). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU (2005-2007). Irjen Kementerian PU (2007-2013). S1 Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Program magister dan doktorat dengan studi Teknik Sipil di Colorado State University, Amerika Serikat.

**MENTERI PERTANIAN  
AMRAN SULAIMAN**

Bone Sulawesi Selatan, 27 April 1968. PTPN XIV selama 15 tahun. S1 Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (1993). Magister (2003) dengan predikat Cumlaude. Program doktoralnya di Unhas ia meraih predikat Cumlaude (2012).

**MENTERI PERDAGANGAN  
RACHMAT GOBEL**

Jakarta, 3 September 1962. Direktur Utama PT Gobel International (holding company, Kelompok Usaha Gobel). S1 di Chuo University di Tokyo Jepang Jurusan Ilmu Perdagangan Internasional (1987). Tahun 2002, ia didapuk sebagai Doktor Kehormatan dari Takushoku University Tokyo Jepang dan Doktor Kehormatan dari Chuo University Tokyo Jepang (2014).

**MENTERI BUMN  
RINI MARIANI SOEMARNO**

Maryland Amerika Serikat, 9 Juni 1958. Ketua Staff Tim Transisi Jokowi-JK. Departemen Keuangan Amerika Serikat (1979-1980). Vice President Citibank NA Jakarta (1988-1989). Dirut PT Astra International Tbk (1998-2000). S1 Wellesley College Massachusetts Jurusan Ekonomi (1981). Pernah diperiksa KPK terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam kasus BLBI (2013).

**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
MUHAMMAD HANIF DHAKIRI**

Salatiga Jawa Tengah, 6 Juni 1972. Sekretaris Jenderal DPP PKB hasil Muktamar 2014 Surabaya. Anggota DPR periode 2009-2014 dan terpilih periode 2014-2019. Sekretaris Fraksi-PKB. S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (PBA) tahun 1996. Program magister di Universitas Indonesia College Massachusetts Jurusan Ekonomi (1981).

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
SALEH HUSIN**

Rote, 16 September 1963. Anggota DPR RI 2009 – 2014 dari Partai Hanura dan 2014-2019. Wasekjen Partai Hanura sebagai (2010-2012). Ketua DPP Hanura (2012-2015). S1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta (1996). Program magister Jurusan Administrasi Publik (2007). Pendidikan non formal di University of Oregon, Amerika Serikat (1992).

**MENTERI AGRARIA, TATA RUANG  
DAN KEPALA BPN  
FERRY MURSIDAN BALDAN**

Jakarta, 16 Juni 1961. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Partai NasDem. Politisi Partai Golkar. Anggota DPR dari F-PG, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu. S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung (1998). Peneliti Lapangan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP2ES).



#### MENTERI AGAMA

##### **LUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN**

Jakarta, 25 November 1962. Menteri Agama. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). S1 di Universitas Islam As-Syafiyah Jakarta (1990).

#### MENTERI SOSIAL

##### **KHOFIFAH INDR PARAWANSA**

Surabaya, 19 Mei 1965. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan era Presiden Abdurrahman Wahid. Kepala BKKBN. S1 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (1991). Studi magister secara linier di Universitas Indonesia Jakarta (1997).

#### MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

##### **ANIES RASYID BASWEDAN**

Kuningan Jawa Barat, 7 Mei 1969. Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Peneliti Pusat Antar-Universitas Studi UGM. Manajer Riset IPC Inc di Chicago Amerika Serikat. Direktur Riset Indonesian Institute. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (1995). Gelar Master dari School of Public Affairs University of Maryland, College Park (1997). Gelar doktor ia peroleh dari Northern Illinois University.

#### MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

##### **PUAN MAHARANI**

Jakarta, 6 September 1973. Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PID Perjuangan. S1 Fisipol Universitas Indonesia Jakarta, Jurusan Komunikasi Massa (1997).

#### MENTERI KESEHATAN

##### **NILA DJUWITA ANFASA MOELOEK**

Jakarta, 11 April 1949. Dokter spesialis tumor mata di RSCM Kirana Jakarta. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fakultas Kedokteran UI. Mengikuti program subspecialis di International Fellowship di Orbita Centre Universitas of Amsterdam Belanda dan di Kobe University Jepang.

#### MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

##### **YOHANA SUSANA YAMBISE**

Manokwari, 1 Oktober 1958. Wanita Papua pertama yang menyandang gelar Profesor. Ia mendapatkan gelar profesor di bidang silabus desain dan materi pembangunan pada 14 November 2012. S1 Jurusan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Cenderawasih. Program master dari Faculty of Education, Simon Fraser University British Columbia Canada dengan gelar Master of Art (MA) tahun 1994.

#### MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA

##### **IMAM NACHROWI**

Bangkalan Jawa Timur, 8 Juli 1973. Sekretaris Jenderal DPP PKB. Anggota DPR RI periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Ketua Umum PMII Jawa Timur. Ketum DKN Garda Nusantara. S1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya Tahun 1998.

#### MENTERI RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI

##### **MUHAMMAD NASIR**

Ngawi Jawa Timur, 27 Juni 1960. Rektor Universitas Diponegoro Semarang periode 2014-2018. S1 Universitas Diponegoro Semarang. Program magister di Universitas Gajahmada Yogyakarta. Program doktor di University of Science Penang Malaysia.



Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Partai Nasional Demokrat



Partai Hati Nurani Rakyat

**MENTERI KOORDINATOR  
POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN**

**LAKSAMANA (PUAN) TEDJO EDY PURDIJANTO**

Magelang Jawa Tengah, 20 September 1952. Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Ketua Umum Ormas NasDem, organisasi yang membidani lahirnya Partai NasDem pimpinan Surya Paloh. Pendidikan di Akademi TNI Angkatan Laut (AAL) (1975). Pendidikan Seskoal (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut) Angkatan 29 (1992). Pendidikan Sesko (Sekolah Staf dan Komando) ABRI Angkatan 25 (1998). Pendidikan KRA-34 Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional) (2001).

**MENTERI DALAM NEGERI  
TJAHJO KUMOLO**

Surakarta Jawa Tengah, 1 Desember 1957. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan dan Komunikasi DPR RI periode 2014-2019. Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (1990-1993). S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1985).

**MENTERI LUAR NEGERI**

**RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI**

Semarang Jawa Tengah, 27 November 1962. Duta Besar Indonesia untuk Den Haag Belanda. Direktur Eropa Barat (2003-2005). Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika-Eropa (2001-2003). S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol Universitas Gajahmada (1985). S2 Haagsche Hooge School Den Haag Jurusan Hukum EU.



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
YASONNA HAMONANGAN LAOLY**

Tapanuli Sumatera Utara, 27 Mei 1953. Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara (2005-2008). S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (1978). S2 Jurusan Sosiologi Virginia Commonwealth University (1986). S3 North Carolina State University di Amerika Serikat.



**MENTERI PERTAHANAN  
RYAMIZARD RYACUDU**

Palembang Sumatera Selatan, 21 April 1950. Kepala Staf Angkatan Darat (2002-2005). Pangkostrad (2000-2002). Pangdam Jaya (1999-2000). Pangdam V/Brabijaya (1999-1999). Kepala Staf Kostrad (1998-1998). Lulusan Akabri Darat (1974). Kursus Dasar Kecabangan Infanteri (1975). Susjurpa Intel Pur (1978). Suspa Staf Yonif (1979). Airborne (1984). Free fall (1985). Kursus Staf Tempur (Susstaf Pur) (1986). Sussar Para (1988). Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoal) (1990) dan Sesko ABRI (1996).

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI  
RUDIANARA**

Bogor, 3 Mei 1959. Komisaris PT Indosat Tbk. S1 statistik dari Universitas Padjajaran Bandung (1984). S2 Jurusan Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (1998).

**MENTRI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA & REFORMASI BIROKRASI**

**YUDDY CHRISNANDY**

Bandung, 29 Mei 1968. Anggota DPR RI. Ketua DPP Partai Hanura. Komisaris Utama PT Time Line Visual. Komisaris PT Anugerah Bumi Cirebon. S1 Universitas Padjajaran (1991). S2 Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1997). S3 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia (2004). Sesko ABRI (1996).



**Partai Kebangkitan Bangsa**



**Partai Persatuan Pembangunan**



**Profesional**



# Kabinet Kerja, Quo Vadis Jokowi?

Oleh: Dhia Prekasha Yoedha

**T**idak seperti diduga sejumlah kalangan, Presiden Joko Widodo memilih nama Kabinet Kerja saat mengumumkan ke-34 menteri dalam portofolio tim pemerintahannya di Istana Merdeka, Jakarta pada 27 Oktober. Padahal banyak pihak mengira Jokowi akan menggunakan nama Kabinet Trisakti sesuai slogan kampanyenya yang menekankan tiga prinsip, berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Gerangan apa yang mendorong Jokowi menghindari penggunaan kata Trisakti yang kental bermuatan ideologis. Yang pasti dengan memilih nama Kabinet Kerja, Jokowi niscaya lebih leluasa mengekspresikan visi misi sepraktis mungkin. “Kerja, kerja, kerja,” tandas Jokowi dalam pidato resmi pertamanya usai dilantik sebagai presiden ketujuh dalam sidang paripurna MPR RI, Senin 20 Oktober lalu.

Sebagaimana prinsip Trisakti

yang dahulu dicanangkan presiden pertama Soekarno, ternyata presiden ketujuh Jokowi memilih nama yang dahulu digunakan Soekarno bagi empat kabinetnya, sejak 10 Juli 1959 hingga 27 Agustus 1964. Yaitu Kabinet Kerja I, II, III, dan IV.

Dahulu saat memilih nama Kabinet Kerja, Soekarno bukan sekedar ingin menandai berakhirnya era Demokrasi Parlementer. Era hingar bingar penuh pertikaian antar parpol besar. Sehingga dalam sembilan tahun sejak medio 1950 hingga 1959, tak satupun dari tujuh kabinet dalam era ini yang berusia kerja melebihi dua tahun. Ketujuh kabinet hasil koalisi dua kubu parpol besar yang dipimpin Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) atau sebaliknya PNI (Partai Nasional Indonesia), saling berganti jatuh bangun jadi oposisi.

Contoh, kabinet parlementer

pertama pimpinan Masyumi, jatuh 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Kabinet ini bubar akibat kebijakan Perdana Menteri Mohamad Natsir dalam pembentukan DPRD, dinilai kalangan oposisi, terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

## Konstitusi Parlementer

Kala itu sejak 17 Agustus 1950, Pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) RI 1950, yang menganut sistem kabinet parlementer. Sebelum itu, UUD 1945 yang menganut sistem presidensial, sesuai hasil Konperensi Meja Bundar (KMB) 19 Desember 1949 di Den Haag, hanya berlaku di Republik Indonesia (RI) yang beribukota di Yogyakarta. Karena konstitusi negara Republik Indonesia Serikat (RIS) versi KMB, yang terdiri dari negara RI, Negara Indonesia Timur (NIT), dan Negara Sumatera





**Menteri 'Kabinet Kerja' Dilantik.** Menteri 'Kabinet Kerja' diambil sumpahnya saat dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014). Busana yang akan dikenakan para menteri saat dilantik adalah batik bernuansa cokelat.

Timur, adalah UUD RIS.

Namun akibat demo besar-besaran rakyat di semua negara bagian yang menuntut segera pemulihan bentuk negara menjadi Negara Kesatuan RI sesuai Proklamasi 17 Agustus 1945, maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, RI, NIT, dan Negara Sumatera Timur, alhasil RIS pun

dilikuidasi dan dilebur jadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan UUD RIS pun diganti menjadi UUDS. Disebut UUD Sementara, karena masih harus menunggu konstitusi baru, yang akan disusun oleh Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955.

UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun

1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS RI, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. UUDS ini menetapkan Presiden RIS hanya kepala negara, karena kekuasaan eksekutif ada di tampuk Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan yang dipilih oleh parlemen berdasarkan suara terbanyak.

Hal ini menurut P.N.H Simanjuntak di dalam buku Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi yang diterbitkan Djambatan, Jakarta (2003) sebagai pemicu ketidakstabilan politik era demokrasi parlementer, akibat jatuh bangunnya tujuh kabinet perdana menteri selama sembilan tahun era tersebut. Apalagi, meski Pemilu 1955 berhasil memilih anggota Dewan Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru.

Hingar bingar politik pun menggenting, begitu Konstituante yang sesuai amanat UUDS 1950 ditugasi membuat undang-undang dasar baru, tak kunjung bisa membuat konstitusi baru. Padahal telah empat tahun bersidang hingga tahun 1959 *Deadlock* terjadi, terutama terkait persoalan opsi Mukadimah UUD. Apa akan memakai Pembukaan versi UUD 1945 atau Mukadimah versi Piagam Jakarta.

Atas dasar kegentingan kondisi itu, Presiden Soekarno selaku Kepala Negara lalu menyampaikan konsepsi Demokrasi Terpimpin kepada DPR hasil pemilu 1955, yang berisikan ide agar kembali saja kepada UUD 1945.

Akhirnya karena kondisi politik terus berlarut mengancam keutuhan persatuan kesatuan bangsa, Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mengakhiri era parlementer. Dekrit ini antara lain berisi, (1) Memberlakukan kembali UUD 1945 dengan tidak memberlakukan lagi UUDS 1950. (2) Pembubaran Konstituante, (3) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah Dekrit Presiden itu, dengan dukungan TNI dan berbagai elemen masyarakat pun, maka Soekarno selaku Presiden, Kepala





Negara dan Perdana Menteri pada 10 Juli 1959 membentuk kabinet yang dinamai sebagai Kabinet Kerja. Nama yang bukan sekedar menandai berakhirnya era demokrasi parlementer, tapi juga mengisyaratkan dimulainya babak baru politik Indonesia, yang kelak lazim disebut sebagai masa Demokrasi Terpimpin, sebagai bentuk tafsir pelaksanaan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan/permusyawaratan.

### Kabinet Kerja Soekarno

Nama Kabinet Kerja digunakan Soekarno untuk empat kabinet pertama periode Demokrasi Terpimpin yang tiga kali dirombaknya. Masing-masing Kabinet Kerja I yang bertugas sejak 10 Juli 1959 dengan Soekarno sebagai Perdana Menteri, dan Djuanda Kartawidjaja sebagai Menteri Pertama, dengan 42 posisi menteri. Tak sampai setahun, pada 18 Februari 1960, tim kerja ini direshuffle jadi Kabinet Kerja II, dengan menambah porto folio Wakil Menteri Pertama: J. Leimena, dengan 41 posisi menteri.

Dua tahun kemudian, Soekarno pada 16 Maret 1962, merombaknya lagi jadi Kabinet Kerja III dengan menambah Wakil Menteri Pertama II: Subandrio. Kabinet ini terdiri dari perdana menteri, dua wakil menteri pertama, delapan wakil perdana menteri, dan 36 menteri serta 13 anggota setingkat yang memimpin badan-badan pemerintah.

Terakhir pada 13 November 1963, tim ini direshuffle lagi menjadi Kabinet Kerja IV dengan menghapus jabatan Menteri Pertama dan mengangkat Subandrio dari PSI menjadi Wakil Perdana Menteri I, Leimena dari Parkindo sebagai Waperdam II, dan Chaerul Saleh dari Partai Murba sebagai Waperdam III.

Semasa itu suhu politik global tengah memanas akibat Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat melawan Blok Timur yang dikomandani Uni Soviet, juga dirasakan langsung di Asia Tenggara dengan kecamuk Perang Vietnam. Termasuk pula di Indonesia, yang sempat diharu-biru oleh



**Presiden Joko Widodo (kiri)** berjalan saat akan menyampaikan delapan nama calon menteri bermasalah didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (ketiga kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarnan (kanan), KSAL Laksamana TNI Marsetio (keempat kiri), KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ketiga kanan), KSAU Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (kedua kiri) dan Kepala BIN Marciano Norman (kedua kanan), saat jumpa pers pertama sebagai presiden di bawah pohon Ki Hujan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/10/2014).

**Presiden Joko Widodo**, membacakan sumpah menteri saat pelantikan menteri 'Kabinet Kerja' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014).

pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia)/Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) di Sumatra dan Sulawesi yang didukung subversi oleh Blok Barat, Amerika Serikat.

Kabinet Kerja IV itu bertugas hingga 27 Agustus 1964, sampai diubah Soekarno lagi jadi Kabinet Dwikora sebagai semacam "kabinet perang" untuk mendukung politik konfrontasi Ganyang Malaysia. Sebelumnya pun Kabinet Kerja IV sempat jadi "kabinet perang" untuk politik Trikora demi mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Beda dari lima tahun periode empat kabinet kerja, Soekarno sejak



27 Agustus 1964 tampil sebagai Presiden/Perdana Menteri/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi untuk membentuk Kabinet Dwikora I. Kabinet perang ini direshuffle Soekarno pada 22



Februari 1966 jadi Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan.

Gejolak politik domestik, regional, dan global memaksa Soekarno pada 28 Maret 1966 guna mereshuffle kembali jadi Kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi dengan masa kerja sampai 25 Juli 1966. Terakhir meski masih menjabat Presiden pada tanggal 25 Juli itu, Soekarno harus rela kabinetnya dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Ampera I. Kabinet ini dibentuk dan diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno.

Secara tersurat Kabinet Ampera ini mengucilkan Soekarno hanya sebagai Kepala Negara kembali. Karena, kekuasaan politik riilnya



sudah diambil alih lewat “kudeta merangkak” oleh Soeharto dkk yang didukung Blok Barat. Kabinet ini bertugas hingga 17 Oktober 1967 dengan catatan pada 12 Maret 1967, Presiden Soekarno resmi diberhentikan oleh MPRS.

### Quo Vadis Jokowi?

Setelah bergelut dengan segala kontroversi proses seleksi pemilihan atas 34 anggota tim pengelola manajemen pemerintahan, Jokowi memilih nama Kabinet Kerja, bukan Trisakti.

Sebelum itu, pada 21 Oktober 2014, Jokowi menggelar konferensi pers pertama sebagai presiden di Istana Merdeka yang sekaligus untuk menunjukkan posisinya sebagai panglima tertinggi TNI dan Polri. Saat itu presiden pilihan rakyat ini yang mengenakan kemeja putih ber lengan digulung ini, tampak firm mengungkapkan rencana komposisi kabinetnya. Di belakang Jokowi, tampak berdiri berjajar Panglima TNI, serta KSAD, KSAL, KSAU, Kapolri, dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara).

Sebelum itu dalam pidato resmi pertamanya selaku presiden ketujuh, Jokowi juga sempat melantangkan kalimat “jalesveva jayamahe” semboyan TNI AL yang berarti “justru di laut, kita jaya”. Semboyan yang menegaskan visi misi Jokowi agar bangsa ini tak memunggungi laut lagi.

Semboyan itu juga menggarisbawahi bahwa Jokowi mampu menyerap aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang merindukan masa-masa kejayaan bahari nusantara. Kemaritiman. Dan itu coba dituangkan penuh Jokowi dalam Kabinet Kerja mantan Wali Kota Solo ini, sebagaimana obsesi para sultan dan raja-raja Mataram di Surakarta maupun Yogyakarta, yang tak lagi mampu menguasai laut. Bahkan dua kali upaya Sultan Agung merebut Teluk Jakarta dari Belanda pun gagal total. Kejayaan bahari hingga akhir era Kesultanan Demak, telah memudar digerus para pelaut dari bangsa-bangsa pedagang Barat,

Perpektif kemaritiman Jokowi, ternyata mendapat sambutan dan dukungan luas. Bahkan, dunia internasional. Berbagai negara sigap menawarkan bantuan dan proyek kerjasama. Ini berarti di laut dan kemaritiman itu terletak peluang bisnis trilyunan rupiah.

Wawasan Kabinet Kerja Jokowi terlihat mampu menawarkan prospek

yang cerah. Namun apakah itu sangat cerah bagi bangsa Indonesia? Atau, lebih mencerahkan kepentingan bisnis dan strategis internasional, yang diincar oleh Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Eropa, dan negara lain, atas potensi sumber daya alam Indonesia?

Sebagaimana kepedulian Blok Barat mendukung Kabinet Kerja versi Soeharto, dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II, serta terutama dalam Kabinet Pembangunan I hingga VII, maka Jokowi perlu belajar lebih cermat. Bahwa, tidak ada dukungan yang tidak harus dibayar. Rakyat kini menunggu sejauh mana kisah kelihaian Jokowi di dalam menanggapi dukungan dari ‘negara sahabat’ itu,

Alkisah Kaisar Nero di Roma yang memerintahkan menangkap dan menghukum mati para pimpinan umat Kristen masa itu, Petrus. Sehingga para pengikutnya sempat minta Petrus menyelamatkan diri ke luar dari kota Roma. Namun begitu Petrus tiba di Via Appia Antica, pinggiran kota Roma, dia melihat penampakan Yesus. Saking terkejut, Petrus berlutut dan bertanya: “Quo vadis, Domine?” yang berarti “Hendak ke manakah Engkau pergi, Tuhan?” Yesus pun menjawab: “Eo Romam crucifigi iterum, yang berarti “Aku pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya” Petrus tertegun dan menangis. Akhirnya dia berbalik kembali ke Roma. Di sana dia tertangkap dan dihukum mati di kayu salib. Namun karena sadar dia tak semulia Yesus, Petrus pun meminta agar dia disalibkan dengan posisi terbalik, kepala di bawah. Quo vadis, domine?

Adakah Jokowi menyadari Kabinet Kerja Presiden Soekarno sempat tiga kali direshuffle seiring dinamika politik pasca era parlementer? Hanya dalam tempo lima tahun, Presiden Soekarno punya empat Kabinet Kerja. Siapaah Jokowi, jika harus menapak tilas langkah politik Soekarno yang harus sigap mereshuffle kabinetnya seiring dinamika politik global dan domestik? Siagakah Jokowi jika apa yang terjadi pada Soekarno, bisa terjadi pada siapa pun? Wallahualam. Rakyat menanti kiprah Jokowi. ■

**D**i pos strategis perekonomian, sepertinya jiwa Trisakti yang bermuara pada berdikari dalam bidang ekonomi masih tanda tanya besar. Menko Perekonomian Sofyan Djalil tercatat pernah menjadi staf ahli Menteri Negara BUMN Tanri Abeng sekaligus konseptor privatisasi BUMN semasa pemerintahan transisi Presiden BJ Habibie.

Penunjukkan Bambang Brodjonegoro sebagai menteri keuangan, juga layak dapat catatan khusus karena dipandang banyak kalangan menganut paham “Neoliberal abu-abu”. Meski tidak sekental Sri Mulyani sebagai personifikasi teknokrat ekonomi Mafia Berkeley, alumni Universitas of Illinois at Urbana Campaign Amerika Serikat ini, dikenal cukup dekat dengan para penentu kebijakan ekonomi Jepang.

Bambang pernah jadi Ketua tim Penelitian Gabungan Indonesia-Jepang untuk Desentralisasi Indonesia, atas sponsor JICA (Japan International Cooperation Agency), dan Tenaga Ahli untuk Otonomi Wilayah Pembangunan Asia (Asian Development Bank-ADB).

Bukan itu saja. Pria berusia 48 tahun ini pernah menjadi Pakar Desentralisasi Fiskal dalam Penyusunan Rencana Strategis Nasional untuk Desentralisasi Indonesia, juga atas sponsor dari ADB.

Selain itu juga tercatat menjadi Ketua program penelitian terkait Peran Astra Group dalam Perekonomian Indonesia, yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra.

Dengan begitu, terpilihnya Bambang Brodjonegoro, memang menunjukkan Washington bermain cukup halus. Untuk mempertahankan pengaruh atas arah kebijakan ekonomi kita yang tetap berkiblat pada *Washington Consensus*, kader yang dimajukan sebagai menteri bukan kader IMF dan Bank Dunia. Melainkan kader Asia Development Bank (ADB). ADB praktis dikuasai oleh Jepang. Jadi, AS memakai kader binaan Jepang untuk duduk di pos strategis perekonomian.

Berarti, jiwa Trisakti sebagai panduan penyusunan kontra skema terhadap kapitalisme global dan kepentingan-kepentingan strategis beberapa multinational corporation, masih tetap bisa diamankan mengingat ada aliansi strategis tiga kawasan (Amerika Serikat, Uni Eropa dan Asia Pasifik/Jepang) melalui Trilateral Commission yang digalang pada 1973, dengan disponsori David Rockefeller.

Sejak Jenderal Suharto mulai berkuasa semasa Orde Baru, pengaruh para teknokrat ekonomi Mafia Berkeley sangat kuat. Itu dimulai pada era Widjoyo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawiro, hingga generasi Mar’ie Muhammad, yang kemudian pada era reformasi dilanjutkan oleh Sri Mulyani Indrawati, sampai Chatib Basri.

Dalam skema *Washington Consensus* yang kemudian juga dianut oleh para teknokrat ekonomi Kementerian Keuangan hingga Sri Mulyani dan Chatib Basri pada era reformasi, salah satu mekanisme Neoliberal yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia untuk melumpuhkan sistem ekonomi nasional adalah *Structural Adjustment Program* (SAP). Dengan SAP ini, para pemilik modal besar di dunia internasional mampu mengubah ekonomi yang sudah ada menjadi sistem ekonomi yang sesuai dengan keinginan mereka guna mengembangkan investasi dan keuntungan. Hal ini berdampak buruk pada kebijakan strategis



Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil

# Membaca *Japanese Connection* di Kabinet Jokowi-JK

Oleh: Hendrajit



Menteri ESDM Sudirman Said



Menteri BUMN Rini Sumarno

pemerintah Indonesia di sektor Migas.

SAP ini dilakukan melalui langkah pembukaan keran impor seleluasa mungkin dibarengi kebebasan aliran uang. Lalu diikuti devaluasi dan kebijakan moneter fiskal berupa pembebasan tarif kredit, peningkatan suku bunga kredit, penghapusan subsidi, peningkatan pajak, kenaikan harga kebutuhan publik.

Maka itu, ditetapkannya Direktur Utama Pindad Sudirman Said selaku Menteri ESDM, mantan Corporate Secretary Pertamina semasa Ari Sumarno menjabat Direktur Utama BUMN minyak ini, mengundang keraguan publik atas kesungguhan Jokowi untuk memerangi mafia migas secara skematik, mendasar dan menyeluruh. Saat menjabat Corporate Secretary Pertamina, Sudirman merupakan konseptor *Integrated Supply Chain* (ISC) yang pada perkembangannya membuat Petral jadi broker pembelian dan pengadaan minyak di luar negeri dengan berkedok sebagai Importir.

Jika pola ISC tetap mewarnai arah kebijakan tata kelola migas Indonesia ke depan, maka ketergantungan minyak Indonesia terhadap 16 negara, akan berlangsung terus. Karena, kepentingan para teknokrat kementerian keuangan (Mafia Berkeley) yang secara ideologis telah

menetapkan impor sebagai ideologi, akan bertemu dengan kepentingan Mafia Pengadaan Migas yang diuntungkan oleh kebijakan Impor dan ketergantungan Migas nasional dari negara-negara asing.

Menteri BUMN Rini M Sumarno, tentu punya potensi bermasalah, mengingat kedekatan dia dengan kepentingan strategis Jepang di Indonesia, melalui Astra. Apalagi, Astra pun tercantum sebagai salah satu rekanan Petral dalam pengadaan minyak Indonesia.

Terkait skenario privatisasi BUMN ke depan, dengan kendali pos strategis kementerian ekonomi oleh Sofyan Djalil dan Rini Sumarno, tak pelak inilah lampu kuning bagi perekonomian Indonesia. Bahkan, bisa menjadi bencana geopolitik.

Agaknya presiden terpilih Jokowi maupun para menterinya, seperti pada pemerintahan SBY terdahulu, abai geopolitik. Sehingga kepentingan korporasi-korporasi asing di tanah air tetap merajalela. Padahal, geopolitik inti dari ilmu Ketahanan Nasional.

#### **Skema EPA, Indonesia-Jepang**

Sejak awal Indonesia gagal mengolah nilai strategis geopolitik Nusantara dalam membangun kemitraan setara dan *win-win solution* menghadapi Jepang. Khususnya, di sektor ekonomi.

Padahal, posisi strategis Indonesia di mata Jepang secara umum setidaknya diletakkan pada tiga pertimbangan utama.

Pertama, posisi Indonesia sebagai negara terbesar ASEAN, sehingga merupakan faktor kunci dalam hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN.

Kedua, keberadaan Indonesia dan ASEAN sebagai penyedia bahan baku dan penghasil kekayaan alam bagi ekonomi Jepang.

Ketiga, posisi strategis selat Malaka dan selat Bali yang amat penting sebagai jalur lalu-lintas yang membawa pasok energi (migas) amat vital bagi Jepang.

Masalah jadi krusial bagi Indonesia ketika gagal membaca siasat Jepang melalui Japan Free Trade Agreement (FTA) Strategy oleh Kementerian Luar Negeri Jepang. FTA ini menjadi strategi pintu masuk Jepang mempromosikan liberalisasi ekonomi di kawasan Asia Timur maupun ASEAN.

Lewat EPA (Economic Partnership Agreement), Jepang secara bilateral dapat mengontrol arah dan jalan menuju liberalisasi ekonomi dalam negerinya, katimbang melalui kerangka multilateral yang mewajibkan timbal-balik lebih besar.

Kendati gagasan utama skema EPA kerjasama kemitraan Indonesia dan Jepang semula bermaksud guna menciptakan hubungan saling menguntungkan, namun pada pekembangannya malah merugikan Indonesia. Yang diuntungkan hanya Jepang.

Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti dalam buku *"Dalam Bayangan Matahari, Telaah atas Substansi dan Implementasi Perjanjian Kemitraan Indonesia-Jepang (IJEPA)"*, mengutip beberapa sumber, mengungkapkan ekspor Indonesia ke Jepang yang naik signifikan hanya tiga sektor, yaitu produk kayu (17,8%), makanan (10,4 persen), dan tekstil (33,8 persen). Sebaliknya ekspor Jepang ke Indonesia, yang melonjak ada 15 sektor unggulan. Ekspor Jepang itu mencakup sektor otomotif dan suku cadang naik 43,3 persen, juga mesin



dan peralatan naik 19 persen.

Aalih-alih untung, liberalisasi perdagangan lewat EPA ini alhasil malah merugikan beberapa sektor usaha di Indonesia, khususnya output sektor kendaraan dan suku cadang yang anjlok hingga 8,3 persen, sektor besi turun 2,46 persen, dan sektor kertas turun 1,43 persen. Jelas, Jepang lebih mampu memanfaatkan potensi keuntungan dari liberalisasi antar kedua negara dibandingkan Indonesia.

Dari kilas balik dominasi Jepang atas perekonomian nasional, justru akibat dibuka lebarnya pintu impor oleh Indonesia sendiri. Terutama, di sektor otomotif. Sejak awal 1970-an, Jenderal Soedjono Hoemardhani, orang dekat Presiden Suharto, mulai merintis kerjasama Indonesia-Jepang antara 1972-1976. Hasilnya, Jepang memberi konsesi pengelolaan pabrik kepada 12 perusahaan antara lain: Sumitomo Shoji, Kaisha dan Nippon Light Metal Company Ltd.

Di sektor otomotif, Hoemardhani berhasil melobi Toyota agar menanam modal di Indonesia pada 12 April 1971. Seraya membujuk Jepang agar memberi izin PT Astra International Incorporated menjadi distributor mobil Jepang di Indonesia. Setelah Hoemardhani meninggal Maret 1986, peran 'key person' Indonesia untuk menjalin kesepakatan strategis dengan Jepang, dilanjutkan oleh Ginandjar Kartasasmita, yang selulus dia dari Tokyo University of Agriculture and Technology, langsung bergabung di jajaran birokrasi Sekretariat Negara.

Salah satu lini industri yang berjaya berkat kebijakan Ginandjar di Setneg antara 1970-1990-an ialah sektor otomotif. Contoh deregulasi dan insentif bagi PT Astra dalam mengembangkan usahanya, melalui SK Menteri Perindustrian No 168/SK/1979 memberi keringanan pajak bagi minibus yang rata-rata buatan Jepang.

Paket kebijakan otomotif 1993 pun menciptakan dominasi Toyota Kijang melalui keringanan pajak. Sehingga cengkraman otomotif Jepang atas pangsa pasar Indonesia semakin kuat. Data 2013, Gabungan Industri Kendaraan

Bermotor(GAIKINDO), 96 persen merek Jepang menguasai Indonesia.

Pada 2012, Toyota menguasai pasar pasar otomotif dengan penjualan 370.987 unit. Daihatsu 150.183 unit, dan Mitsubishi 138.778 unit. Saat ini Jepang semakin agresif, dengan meminta tambahan 50 persen perusahaan komponen membuka pabriknya di Indonesia. Toyota dan Daihatsu lewat Astra International, ingin menambah industri komponen lebih dari 35 perusahaan. Sementara Nissan, meminta 10 mitra.

Bila ditelisik balik, gelombang pertama investasi Jepang di ASEAN (1950-an sampai 1985) umumnya berasal dari konglomerasi seperti Sumitomo, Mitsubishi, Toyota, Minebea dan Matsushita. Investasi Jepang dalam periode ini umumnya berwujud 'joint venture' dan bukan pemilikan asing yang bersiat menyeluruh. Ini berkembang dari hubungan antara prinsipal dan distributor ketika pemerintah ASEAN meninggikan tarif dan mendorong pemilik saham lokal mayoritas untuk mengarahkan kegiatan pada proyek-proyek perakitan (assembly) dan pembuatan (manufacturing).

Di sektor migas, kerjasama Indonesia-Jepang juga perlu disorot. Sebab melalui skema EPA, Indonesia banyak dirugikan. Melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA), sasaran strategis utama Jepang adalah memastikan pasok gas dari Indonesia ke Jepang. Jaminan pasok energi ini sangat penting bagi Jepang. Energi bukan hanya komoditas, tapi lebih dipandang sebagai barang strategis. Karena itu, kebijakan energi Jepang selalu berbasis pada kepentingan nasional jangka panjang.

Untuk kebutuhan gas, tak ada sama sekali suplai dalam negeri dari Jepang sendiri. Selalu diimpor dari luar negeri. Di sinilah nilai strategis geopolitik Indonesia di mata Jepang. Celakanya, para elit politik Indonesia baik di pemerintahan maupun DPR, abai atas nilai strategis geopolitik kita.

Alhasil, ketika Jepang melakukan manuver ekonomi terhadap Indonesia untuk memperoleh jaminan suplai gas

untuk pergerakan industrinya, posisi tawar kita di hadapan Jepang malah rendah.

Salah satu klausul skema IJEPA menyebut Indonesia wajib menjamin pasok LNG ke ke Jepang. Sebagai imbalan, Jepang akan membantu Indonesia memfasilitasi *capacity building*. Tapi sayang tidak ada tolok ukur yang jelas terkait nilai lebihnya bagi Indonesia. Padahal, Indonesia sebenarnya punya kartu *truf*, atau *geopolitical weapon*, di Arun-Lhokseumawe, Aceh, dan Badak, Bontang, Kalimantan Timur, yang merupakan andalan pasokan LNG bagi Jepang sejak 1970-an.

Menyadari fakta itu, keberadaan Bambang Brodjonegoro di kabinet, mengingat kaitan erat dia dengan penentu kebijakan strategis ADB dan JICA, layak dicermati. Begitupun Rini Sumarno, mantan Direktur Utama PT Astra Internasional, yang bakal jadi pemain strategis dalam melakukan kesepakatan strategis dengan para pelaku otomotif Jepang di Indonesia.

## Jaringan Politik Ginandjar Kartasasmita

Pengaruh Sudharmono dan Ginandjar yang menguasai jaringan birokrasi di sekretariat negara sejak fase awal pemerintahan Suharto, sangat kuat. Pada perkembangannya atas prakarsa mereka berdua, ke luar Peraturan Pemerintah yang dikenal sebagai Kepres 10 tahun 1980 untuk memberi proteksi dan lisensi kepada beberapa pengusaha nasional pribumi.

Menjelang keluarnya PP 10, pada fase 1968-1972, Ginandjar pernah jadi Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-Undangan Sekretariat Kabinet. Pada 1971-1972, Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet. Pada 1972-1976, Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet. Dan pada 1976-1978, sisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan.

Hakekat dari skema Kepres 10 tahun 1980 sesuai gagasan Ginandjar sesungguhnya guna membesarkan para pengusaha pribumi, untuk



**Ginandjar Kartasasmita bersama Jokowi.**

menandingi pengusaha-pengusaha Cina yang kelak populer dengan sebutan Kelompok Jimbaran seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Mochtar Riyadi, Ciputra, dan William Suryajaya.

Kebijakan pemerintahan Suharto membina pengusaha lokal pribumi itu berada dalam naungan Tim Pengendalian Lintas Departemen yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, orang kepercayaan Suharto sejak masa awal Orde Baru.

Tim Pengendalian Lintas Departemen ini terdiri dari: Menteri/Sekretaris Negara (Ketua), Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas (Wakil Ketua), Gubernur Bank Indonesia, Dirjen Anggaran, Dirjen Industri Logam Dasar, Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Deputy Ketua Bappenas bidang ekonomi.

Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara duduk sebagai ketua. Ginandjar, kala itu menjadi asisten Sudharmono untuk urusan

Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-departemen (1978-1983).

Itu berarti, segala macam urusan teknis kelayakan administratif siapa pun pengusaha pribumi yang layak masuk daftar pembinaan berada di tangan Ginandjar.

Begitulah. Meski hanya sebagai anggota tim, Ginandjar tergolong paling aktif memasukkan pengusaha pribumi ke dalam proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah, atau proyek yang dibiayai asing.

Tiga tahun berselang, tugas tim pengendali bertambah. Presiden Soeharto menugaskan tim ini ikut mengendalikan aneka proyek BUMN dan Pertamina, sejalan dengan *oil boom* masa itu. Sekretariat Negara berinisiatif membangun kilang minyak—dan itu otomatis ada tambahan anggaran.

Maka, bermunculan sederet pengusaha pribumi yang kemudian bukan saja merupakan para pemain kunci dari kalangan konglomerasi pribumi Indonesia, namun kelak berkembang pula menjadi para pemain politik kunci sejak pasca kejatuhan Suharto pada 1998. Seperti Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Sugeng Sarjadi, dan Fadel Muhammad.

Melalui penguasaannya terhadap jaringan birokrasi dan jantung pengambilan keputusan-keputusan strategis di kantor sekretariat negara ini, Ginandjar didukung Sudharmono, mulai membangun nuklius politik (kelompok inti politik) berbasis pelaku usaha guna mengimbangi pengaruh para konglomerat Cina seperti Liem Soe Liong, Eka Cipta, Mochtar dan James Riyadi, Bob Hassan, Prayogo Pangestu dan sebagainya, yang semakin menguat.

Melalui Kepres 10 tahun 1980 itu, Sudharmono dan Ginandjar kemudian memberi fasilitas dan perlindungan bisnis kepada Arifin Panigoro, Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, Jusuf Kalla, Fadel Muhammad, Iman

Taufik, dan lain-lain.

Singkat cerita, karena utang budi para pengusaha inilah, sehingga kemudian mereka memandang Sudharmono dan Ginandjar sebagai patron politik mereka.

Bahkan Ginandjar Kartasasmita, kemudian dipandang mereka sebagai soko guru politik nasional pula. Jadi bukan lagi sebatas soko guru para pengusaha besar lokal tersebut.

Ginandjar, yang pernah mengenyam pendidikan lanjut pada Universitas Tokyo bidang studi Pertanian dan Teknologi pada 1960-1965, tampak sangat terinspirasi oleh formasi politik di Jepang yang berbasis pada aliansi strategis antara Politisi Partai, Pengusaha (Zaibatsu) dan aparat birokrasi.

Itulah semacam kartel politik, yang dicikalbakali oleh Matzuzaki Club para murid Matzuzaki Hio, suhu karate asli Jepang, yang semula dirajut oleh enam anak muda yang direkrut Jenderal Sarwo Edhy Wibowo, yang kelak menjelma jadi sebuah nuklius politik. Di samping Sarwo Edhi, mereka adalah SBY, Arifin Panigoro, Fahmi Idris, Osman Sapta, Marzuki Darusman, dan Aburizal Bakrie. (Lihat Majalah Aktual Edisi 8)

Nuklius politik itu kemudian menemukan formatnya pada reformasi politik pasca Suharto, dan ikut menghasilkan formasi politik hasil Pemilu Juni 1999. Nuklius yang kemudian makin dimantapkan pada Pemilu 2004 dan 2009.

Sekarang, menyusul terpilihnya Jokowi sebagai presiden, maka dengan bergabungnya Ginandjar dan kroni politiknya seperti Fahmi Idris dan Osman Sapta, berarti formasi para menteri yang kini berada pada kubu Jokowi-JK.

Sofyan Djalil, Bambang Brodjonegoro, Rini Sumarno dan Sudirman Said, memang bukan Matzuzaki Club. Tetapi, sebagaimana kata 'Teori Konspirasi' boleh jadi mereka ini bisa dibaca pula sebagai bentuk lain yang mewakili the Japanese Connection dalam kabinet Jokowi-JK. Mirip sindiran kritis yang menyebut Kahinet Kerja Jokowi Rasa JK. ■

# Poros Maritim: Membangkitkan Kembali Kejayaan Sriwijaya - Majapahit

Pemerintahan baru Jokowi-JK bertekad mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia abad ke-21, dan menjadikan sektor kelautan sebagai basis bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nasional. Namun, untuk mewujudkan gagasan besar itu banyak tantangan yang harus dihadapi.

Oleh: Satrio Arismunandar

**B**apak pendiri republik ini dan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah mengatakan, “Untuk menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera, kita harus menjadi bangsa bahari.”

Bahkan Sukarno sempat membaca puisi tentang kejayaan bangsa pelaut, yang berjudul “Jadilah Bangsa Pelaut,” dalam pidato peresmian Institut Angkatan Laut pada 1953.

Ucapan Sukarno bukan mengada-ada. Indonesia memang mewarisi sejarah kerajaan maritim besar, Majapahit dan Sriwijaya, yang meraih kejayaan lewat penguasaan sektor kelautan. Rakyat Nusantara pun memiliki budaya pelaut.

Namun wawasan bahari itu lalu pelan-pelan tenggelam, berganti dengan orientasi daratan. Padahal orientasi daratan sebetulnya bukan *nature* bangsa Indonesia dan tidak selaras dengan posisi dan kondisi geografis Indonesia, yang sebagian besar wilayahnya adalah laut.

Terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

2014-2019 memberi angin segar dan perubahan orientasi pembangunan yang mendasar. Jokowi-JK telah berkomitmen untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia abad ke-21.

Gagasan besar ini bagus dalam wacana, namun ia tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan perencanaan dan strategi yang matang, komitmen dan dukungan anggaran, sistem pelaksanaan yang cermat, dan pengawasan yang ketat.

Patut dicatat, di kawasan Asia, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang akan mengimplementasikan wawasan maritim sebagai landasan kemajuan bangsa.

Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping pada Oktober 2014 telah mengembangkan konsep dan strategi pembangunan *maritime silk route* (Jalur Sutra Maritim). Kalau Tiongkok punya “jalur sutra,” maka Indonesia sebetulnya pernah punya “jalur rempah-rempah.”

## Jalur Rempah-Rempah

Menurut pendiri Archipelago Solidarity, Engelina Pattiasina, di

Jakarta pada 3 Oktober 2014, bangsa Indonesia memiliki sejarah maritim yang kuat. Jalur rempah-rempah telah terbukti berabad-abad lalu mampu mengontrol ekonomi dunia dan menghubungkan kota-kota utama di dunia dan di Nusantara.

Secara historis, tutur Engelina, sejak abad ke-16 masehi, arsitektur, pelabuhan, benteng, dermaga, dan kamar dagang dibangun karena perdagangan rempah-rempah. Jalur kolonial dunia, yang mula-mula diberlakukan Inggris di Banda abad ke-16, menjual barang, jasa, pengetahuan, dan informasi di Batavia, Ambon, Malaka, Manila, Taiwan, Makau, Hong Kong, San Salvador, Deshima atau Nagasaki, Jepang.

Bukti arkeologis menunjukkan, sejak 3.000 tahun silam, rempah asal Maluku telah diperjualbelikan ke Persia (Iran). Sayangnya, jalur rempah-rempah ini terlupakan lantaran dominasi jalur sutra Tiongkok.

Meski jalur sutra itu bukan milik Nusantara, Indonesia mengadopsinya dalam pembangunan ekonomi, sehingga hanya jadi instrumen kecil dari pembangunan.







“Sementara kalau kita menggunakan jalur rempah-rempah, itu merupakan milik Nusantara dan kita menjadi subyek pembangunan di dalamnya,” jelas Engelina.

Ia ingin mendorong Jokowi-JK membangun poros maritim berbasis jalur rempah-rempah, karena menganggap strategi ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar untuk bangsa Indonesia. Dan, jika poros maritim itu jadi dibangun lewat strategi jalur rempah-rempah, itu sebaiknya dimulai dari kawasan timur Indonesia (KTI). Luas KTI berkisar 68 persen dari luas wilayah negara RI, dan sangat sesuai dengan strategi ekonomi pesisir dan kelautan.

Penerapan kebijakan poros maritim juga dilandasi potensi yang dimiliki Indonesia. Secara geopolitik, historis, dan budaya, Indonesia dapat menjadi negara maritim karena mempunyai jumlah pulau terbanyak dan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah daratnya berada dalam kesatuan yang dikelilingi lautan, sementara dua pertiga luas wilayahnya berupa laut.

Kekayaan sumber daya alam inilah

yang memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sayangnya, potensi besar itu belum dimanfaatkan secara optimal.

#### **Belum Jadi Negara Maritim**

Data Food and Agriculture Organization (FAO) dari PBB pada 2012 menyebutkan, Indonesia ada di peringkat ketiga terbesar dunia dalam produksi perikanan di bawah Tiongkok dan India. Untuk perikanan tangkap, Indonesia berada pada posisi kedua. Namun kalah produksi dengan India dalam perikanan budidaya. Jumlah perikanan tangkap dan perikanan budidaya itu yang menunjukkan tingkat produksi perikanan suatu negara.

Sebelum jadi poros maritim dunia, Indonesia harus lebih dulu jadi negara maritim, di mana sektor kelautan jadi sentral kehidupan ekonomi dan pusat produksi utama. Dalam pengkategorian ilmiah, hingga saat ini Indonesia bukan negara maritim karena sebagian besar kehidupan masyarakat, khususnya di lima pulau terbesar (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua), tak terpengaruh langsung oleh proses yang

terjadi di lautan.

Berikut ini adalah program restorasi maritim Indonesia yang dicanangkan Jokowi-JK, sebagaimana dijabarkan dalam Nawa Cita, yang disosialisasikan dalam kampanye pemilihan presiden 2014. Ada empat hal yang dinyatakan eksplisit dalam Nawa Cita untuk mewujudkan poros maritim, yaitu: 1) Mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan ZEE atau zona ekonomi eksklusif; 2) Memberantas pencurian ikan atau *illegal fishing*; 3) Ekspansi budidaya laut; dan 4) Pengembangan padat karya sektor maritim.

Harian Kompas (21 Mei 2014) melaporkan, produksi tuna Indonesia saat ini mencapai 1,15 juta ton/tahun dengan total ekspor 209.071 ton/tahun. Pendapatan itu masih jauh dari optimal. Pemerintah Jokowi-JK ingin mendorong pembangunan pasar-pasar ikan modern, serta meningkatkan produksi tuna menjadi 1,5 juta ton/tahun, yang berarti Indonesia harus menambah armada kapal penangkap ikan.

Produksi tuna dan pendapatan Indonesia saat ini masih minimal. Padahal, menurut data BPK (2012), potensi pendapatan negara dari perikanan laut jika tidak ada *illegal fishing*, bisa mencapai Rp 365 triliun/tahun. Sesuai perhitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP (2011), akibat *illegal fishing* tiap tahun Indonesia merugi Rp 300 triliun. Sehingga, pendapatan yang diperoleh Indonesia setelah dikurangi pencurian ikan, hanya Rp 65 triliun.

#### **Mengatasi Pencurian Ikan**

Nelayan-nelayan dari negara lain dengan menggunakan kapal dan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju sering mencuri ikan di perairan Indonesia, khususnya di Laut Arafura, utara Laut Sulawesi, perairan barat Natuna, dan Laut China Selatan. Menurut KKP, kerugian akibat *illegal fishing* di Laut Arafura pada 2001-2013 mencapai Rp 520 triliun. Jumlah yang tidak main-main, meskipun angka ini baru bersifat perkiraan.

Pencurian ikan ini bisa terjadi akibat kelemahan pengawasan

oleh pihak Indonesia, mengingat kekurangan sarana kapal pengawas, dana operasional pengawasan, dan bentang keluasan perairan yang harus diawasi.

Saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Ditjen Pengawasan KKP cuma berjumlah 27 kapal, terdiri dari 20 kapal kecil dan 7 kapal standar. Itu ditambah dua kapal pesanan baru SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia), yang panjangnya 60 meter dan dilengkapi dengan sonar serta penginderaan jauh.

Dua kapal SKIPI ini adalah kapal yang bagus dan cocok untuk pengawasan. Sayang, biaya layar (biaya bahan bakar plus nakhoda) untuk kapal besar seperti ini bisa mencapai Rp 100 juta/hari. Maka perlu dicari upaya efisiensi penggunaan kapal SKIPI agar bisa bermanfaat ganda, seperti pelaksanaan pengawasan sekaligus penelitian serta penangkapan ikan. Untuk itu, kapal SKIPI ini perlu dilengkapi sarana dan prasarana penelitian dan penangkapan ikan.

Selain pencurian ikan juga ada tantangan lain, yaitu meruyaknya pasar gelap tuna, dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sangat luas tersebut. Hal ini mengingat sekitar Rp 14 triliun potensi pendapatan negara hilang tiap tahun akibat pasar gelap perikanan. Sebagai solusinya, Indonesia harus membangun industri pengolahan ikan di daerah-daerah sumber ikan, untuk mengurangi pasar gelap.

Kondisi saat ini, memang belum tersedia pusat industri pengolahan di daerah-daerah sumber ikan, ditambah lagi minimnya pengawasan laut. Pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau kecil, dan perbatasan, akan menciptakan prosperity belt yang sekaligus berfungsi sebagai security belt. Kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun dapat semakin kokoh.

Pembangunan industri pengolahan ikan bisa didorong lewat badan usaha



**Unjuk Kekuatan Alutsista TNI.** Sejumlah pesawat Casa NC212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara 1 Puspenerbal, melakukan terbang formasi melintas di atas beberapa Kapal Perang RI (KRI), saat puncak peringatan HUT Ke-69 TNI di perairan Surabaya, Selasa (7/10/2014).

milik negara (BUMN) serta industri swasta yang sudah ada. Upaya efisiensi pengawasan laut dan produksi perikanan dapat dilakukan oleh KKP lewat pengembangan BUMN bidang perikanan. Pemerintah Jokowi-JK harus memperjuangkan agar BUMN ini memiliki kapal-kapal besar, yang dapat dimanfaatkan untuk dua fungsi, yaitu pengawasan dan produksi perikanan. Bahkan dalam kapal besar itu dapat dilengkapi dengan proses pengolahan hasil perikanan.

#### Menuntut Ekspansi Budidaya Laut

Selain itu, pemerintah Jokowi-JK juga dapat mendorong dan membantu pihak swasta agar dapat mengembangkan dan memiliki kapal-kapal besar. Kapal-kapal itu dapat dimanfaatkan untuk fungsi pengawasan dan produksi perikanan, sehingga dapat mengurangi kerugian akibat illegal fishing dan meningkatkan produksi perikanan.

Pengadaan kapal dengan teknologi pengawasan, penelitian, dan pengolahan ikan yang canggih itu patut didukung oleh berbagai lembaga riset kelautan. Lembaga riset itu, antara lain LIPI, BPPT, serta badan penelitian, jurusan, dan fakultas kemaritiman di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

Poros maritim juga menuntut ekspansi budidaya laut, yakni

perluasan lahan karamba (jaring apung). Dalam hal lahan karamba, saat ini baru ada 117 ribu hektar, dan ditargetkan meluas menjadi 500 ribu hektar. Sedangkan potensi lahan karamba itu sendiri yang belum digarap masih sangat besar, yakni 12 juta hektar.

Saat ini produksi budidaya laut mencapai 3,7 juta ton/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi 15,8 juta ton/tahun. Dari sisi pendapatan, saat ini pendapatan budidaya laut mencapai Rp 11 triliun/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi Rp 158 triliun/tahun atau peningkatan drastis sebesar Rp 147 triliun.

Untuk ekspansi budidaya laut ini, tentunya perlu ada penyediaan modal buat nelayan. Yakni, kredit murah dari bank agro maritim. Saat ini para nelayan kecil, seperti juga petani, sering sulit memperoleh akses kredit dari bank karena berbagai keterbatasan kondisi mereka.

Selain itu, tentu harus ada pemberdayaan petani dan nelayan. Pada sumberdaya manusia (SDM) kelautan inilah terdapat titik krusial pembangunan poros maritim.

Dengan pendekatan padat karya sektor maritim, jumlah tenaga kerja sektor maritim yang semula 5,6 juta akan meningkat dengan menyerap 6,7 juta tenaga kerja baru, sehingga total menjadi 12,3 juta. Mereka akan terserap lewat strategi penambahan



armada kapal penangkap ikan dan perluasan lahan budidaya laut.

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, pernah memaparkan potensi dan pemanfaatan ekonomi kelautan. Menurutnya, usaha di sektor-sektor ekonomi kelautan sangat menguntungkan dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Usaha di sektor-sektor ekonomi kelautan juga mengandung local content yang tinggi dan banyak produksinya yang dibutuhkan pasar global, sehingga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan inflasi,” ungkap Rokhmin.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu mengungkapkan, dengan memperkuat dan mengembangkan sektor transportasi laut, pelabuhan, dan industri perkapalan nasional, maka konektivitas kelautan akan secara dramatis membaik.

“Biaya logistik akan semakin murah, dari sekarang 24,6 persen PDB menjadi kurang dari 15 persen PDB. Daya saing ekonomi nasional akan meningkat signifikan,” tuturnya.

Pendukung penyediaan SDM maritim lain adalah perguruan tinggi dan politeknik, yang menyediakan tenaga kerja terampil dan para ahli di bidang kelautan dan perikanan. Yang dibutuhkan adalah tenaga lulusan D3, S1, dan pascasarjana yang mumpuni.

Berbagai jurusan atau fakultas kemaritiman baru di beberapa perguruan tinggi kunci, harus didirikan di daerah-daerah yang dekat dengan potensi sumberdaya kelautan. Sedangkan jurusan dan fakultas kemaritiman yang sudah ada juga harus diperkuat.

### Masa Depan Bangsa Ada di Asia

Jokowi cukup memiliki pemahaman terhadap geopolitik, yang membawa kesadaran bahwa masa depan dunia ada di Asia-Pasifik. Dalam rentang dua dasawarsa mendatang, masa depan ekonomi dunia akan berada di Asia, karena tiga negara berekonomi terkuat dunia ada di Asia, yaitu Tiongkok, Jepang, dan India.

Karena itu, Jokowi mengeluarkan doktrin politik luar negerinya, yakni menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, agar sebagai negara maritim Indonesia dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Seluruh alur pelayaran dunia yang melalui jalur strategis di Indonesia akan dipergunakan sebagai pendekatan diplomasi, terkait dengan peran strategis Indonesia.

Namun implikasi pendayagunaan jalur-jalur strategis di perairan Indonesia, adalah munculnya tantangan lain dalam segi pertahanan - keamanan di laut. Poros maritim tidak mungkin diwujudkan tanpa didukung kekuatan TNI, khususnya matra laut dan udara yang tangguh dan disegani pula.

Untuk itu, Jokowi berencana meningkatkan anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI hingga 1,5 persen dari angka produk domestik bruto (PDB) selama masa kepemimpinannya.

Namun, pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, pada 8 Oktober 2014, menilai angka 1,5 persen dari PDB itu masih jauh dari cukup, jika Jokowi ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Connie menilai, pemerintah keliru jika meningkatkan anggaran belanja pertahanan berdasarkan pada besaran PDB yang dimiliki

Indonesia. Kekeliruan pandang itu terjadi akibat paradigma konsep pertahanan yang dianut pemerintah, yaitu pertumbuhan anggaran pertahanan tergantung pada kemampuan ekonomi (defense by prosperity). Seharusnya konsep defense by prosperity itu, menurut Connie, digeser ke cara pemahaman, defense for prosperity. Yang berarti, dengan pertahanan yang kuat, justru Indonesia akan memperkuat ekonominya.

Terakhir, membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia (*global maritime access*) membutuhkan komitmen serius pemerintah, di pusat maupun daerah. Mereka harus didukung oleh DPR, DPRD, dan berbagai unsur lain seperti TNI, Polri, kejaksaan, media, perguruan tinggi, dan seterusnya.

Dalam perspektif kesisteman, harus diingat, upaya mewujudkan gagasan poros maritim itu juga akan melibatkan perangkat undang-undang dan peraturan baru yang kondusif, sosialisasi gagasan lewat berbagai media, serta pembangunan infrastruktur baru –jalan raya, jembatan, pelabuhan modern-- yang masif di berbagai daerah.

Yang sering terjadi, banyak ide dan rencana besar ambruk karena kurangnya komitmen dan dukungan untuk mewujudkannya.

Presiden pertama Bung Karno sudah lama bicara tentang pengembangan bangsa bahari. Sesudah dilupakan di era Soeharto, presiden pertama di era reformasi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), juga sudah menghidupkan lagi wawasan kemaritiman tersebut.

Bahkan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pencapaian Indonesia di bidang kemaritiman karena berbagai faktor masih jauh di bawah ideal. Kini menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk menunjukkan komitmen, konsistensi, dan kerja keras yang nyata, dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. ■

(Dilah dari berbagai sumber)



# Melihat Jokowi dari Kacamata Media Internasional

Oleh: Andy Abdul Hamid, M Vidia Wirawan



ro kontra soal kemampuan Jokowi memimpin negara ini sempat mewarnai media dalam tiga bulan terakhir ini.

Yang pro Jokowi-JK percaya, bahwa mereka mampu membawa perubahan buat Indonesia. Yang kontra melihat, Jokowi-JK tidak mampu. Ditambah lagi soal pertarungan politik antara kubu KIH dan kubu KMP.

Pertarungan politik yang cenderung memanaskan pasca Jokowi-JK mengumumkan susunan kabinetnya membuat kebanyakan masyarakat dan politikus terbius. Mereka lupa bahwa mata internasional, lewat representasi media besar yang ada, juga melihat apa yang terjadi saat ini. Terutama soal kepemimpinan Jokowi.

Aktual berusaha memotret beberapa pernyataan dari media internasional yang ada. Sama seperti yang terjadi di tingkat lokal, media internasional juga menilai Jokowi sebagai Presiden baru yang menjanjikan namun ada juga yang melihat sebaliknya.

*TheDiplomat.com* dalam sebuah tulisannya *"The Jokowi Effect in Southeast Asia"* misalnya. Media yang fokus pemberitaannya soal hubungan internasional ini melihat terpilihnya Jokowi akan memberi angin terhadap gerakan rakyat di negara sekitar Indonesia.

*"Jokowi's success could be replicated in other countries, and this makes him an ideal figure for reviving citizen movements in Southeast Asia. If that happens, the Jokowi phenomenon could be Indonesia's most important export to its neighbors,"* tulisnya.

Yang menarik adalah kajian dari *thenation.com* dalam sebuah artikelnya *"Jokowi's Way"*. Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden disamakan

dengan Narendra Modi di India.

*"The power of charismatic politics in the world today has lately taken two extreme forms in Asia. In India, Narendra Modi came into office in May with a mandate unprecedented in the country since Indira Gandhi; in Indonesia, the victory of Joko Widodo (universally known as 'Jokowi') in July has made him the most popular Indonesian leader in half a century."*

Situs ini melihat, munculnya dua pemimpin kharismatik baru di dua negara yang paling banyak jumlah penduduknya di Asia: India dan Indonesia.

Di majalah *Time*, foto Jokowi sempat dijadikan cover depan majalah yang distribusinya tersebar hampir di seluruh dunia.

Di salah satu artikel *"Joko Widodo Sworn In as Indonesia's President and Faces These 5 Challenges"*, *time.com* menilai ada lima tantangan besar yang harus diselesaikan Jokowi.

Pertama soal *political gridlock* dimana Jokowi harus berhadapan langsung dengan komposisi parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Tantangan kedua, adalah soal turunnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian berturut soal terorisme, birokrasi yang kotor-korup dan yang terakhir soal relasi antaretnis (SARA).

Media asal Inggris, *The guardian.com* menulis agak lain. Dikatakan Jokowi adalah harapan baru buat reformasi di Indonesia karena Jokowi adalah satu-satunya presiden yang bukan dari militer dan elit politik yang ada. *"Hopes high for reform as president elected from outside military and political elite for first time in young democracy's history"*

Namun, *The Guardian* memberi catatan bahwa masalah pelik di



Pelantikan Presiden ke 7. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) mengikuti Rapat Paripurna MPR dengan agenda tunggal Pelantikan Presiden di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014).

THE GUARDIAN/ARTUAL



sektor ekonomi akan membayangi kepemimpinannya.

Akan halnya, majalah *The Economist*. Jokowi mendapat kritik pedas. Jokowi dianggap tidak terlalu mementingkan hubungan internasional.

*“The former Jakarta governor leader, widely known as Jokowi, was due to be sworn into the role on Monday and is expected to take less personal interest in foreign affairs than his predecessor, Susilo Bambang Yudhoyono”*

Mirip dengan *The Guardian*, *The China Daily Asia* dalam sebuah artikelnya *“High hopes for Jokowi’s Indonesia”*. Jokowi dianggap presiden yang pro bisnis namun minim pengalaman dalam hubungan internasional.

*“After an eventful election, Indonesia — the fourth most populous nation in the world — has a president-elect who is generally seen as pro-business and could potentially put Indonesia back on the path of fast economic growth.” ...” But while Jokowi’s rise could transform Indonesian politics, his agenda when it comes to foreign affairs is much more modest. As a former furniture exporter, he has no prior experience in foreign or security affairs. Perhaps because of that, he has promised to continue many of the policies of incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono, who came into office with far more experience as an army general educated in the United States,”* demikian *China Daily*.

Yang cukup mengejutkan adalah laporan *The Wall Street Journal* beberapa hari setelah Jokowi mengucapkan sumpah di gedung DPR-MPR.

Dalam artikelnya *“The Jokowi Administration”*, *Indonesia’s new President rewrites political rules”*, koran bisnis penting di AS ini menggambarkan pasar bersikap negatif setelah melihat susunan kabinet Jokowi.

*“Joko Widodo came to Indonesia’s presidency promising an end to “transactional politics,” yet the cabinet lineup sworn in Monday was clearly*

*the result of horse-trading within the ruling coalition. Political and economic analysts alike were underwhelmed, and the stock market and rupiah fell”*.

Yang dianalisis oleh *Sydney Morning Herald* justru agak aneh, mencengangkan dan agak berlebihan. Jokowi dianggap Abraham Lincoln-nya Indonesia. Koran itu menulis bahwa ada banyak harapan setelah Lincoln-nya Indonesia ini menjadi Presiden. Turutama soal kroni.

*“Presidential election favourite Joko Widodo is seen by many Indonesians as the country’s best hope to end decades of cronyism”*.

Mirip dengan *Sydney Morning Herald*. Di *huffingtonpost.com*, Jokowi disamakan dengan Obama. Cukup menarik ulasan soal itu di sebuah tulisannya yang berjudul *“Jokowi’s Obama Problem”*.

Masalah yang akan dihadapi Jokowi kemungkinan akan sama dengan yang dihadapi Obama. Saat ini pendukung Obama sudah banyak yang mempertanyakan kepemimpinannya. Apalagi ditambah dengan masalahnya di internal Partai Demokrat Amerika Serikat yang membuat Obama frustrasi.

*“But now, some Indonesians believe they have a Barack Obama of their own in the form of a 52 year-old former furniture dealer, small-town mayor and first-term governor with a thin public record and a golden speaking voice who is hailed as a hero during his frequent visits to Jakarta’s streets...”*

*“But if you were to ask millions of Obama supporters today who are disillusioned with his leadership, they would say: proceed with caution. As the New York Times recently put it, “deep in his fifth year in office, Mr. Obama finds himself frustrated by members of his own party weary of his leadership and increasingly willing to defy him.”*

Setidaknya, mata internasional melihat ada tiga isu besar pascapelantikan Jokowi sebagai presiden: harapan untuk perubahan, hubungan luar negeri yang lemah, dan tantangan masalah perekonomian yang berat. ■

**S**ebelum lengser, ada beberapa langkah cepat dilakukan SBY.

Salah satunya, pertengahan September lalu, sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penting ditandatangani SBY yakni RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPP Gambut). Namun belum diumumkan ke publik.

Beredar kabar, PP tersebut ditandatangani SBY pada 16 September 2014, sebelum sidang paripurna DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas untuk menjadi undang-undang.

Dengan meratifikasi AATHP itu, Indonesia adalah negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi setelah 12 tahun Indonesia menolaknya. AATHP muncul untuk menjawab kasus polusi udara akibat kebakaran hutan di Sumatra (terbanyak di Riau) dan Kalimantan pada 1997-1998 lalu.

Sontak pengusaha, LSM dan beberapa akademisi yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan mempertanyakan itu. Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo dari Fraksi Golkar saat itu meminta pemerintah untuk menunda itu karena ada beberapa ketentuan dalam RPP tersebut tidak sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan mengaku meski sudah disahkan, PP Gambut itu masih terbuka untuk direvisi secara hukum atau di-judicial review-kan.

Yang paling terpukul oleh PP ini adalah pengusaha Hutan Tanaman Industri (HTI) termasuk pengusaha sawit yang proyeknya ada di Riau dan Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Menurut data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), potensi kerugian yang ditimbulkan dari PP ini bisa mencapai Rp103 triliun per daur tanam atau dalam periode 5 tahun-6 tahun. Angka tersebut berasal dari hilangnya devisa negara dari pulp



# ADA APA DI RIAU?

Oleh: Ismed Eka Kusuima, Dhanu M Daeng, Nicha M

dan kertas sebesar USD 5,4 miliar per tahun, hilangnya produksi 16,8 juta ton, dan PHK sekitar 300.000 tenaga kerja di industri pulp dan kertas serta hutan tanaman industri (HTI).

Sepuluh hari pasca ratifikasi AATHP dan pemberlakuan PP Gambut tepatnya 26 September 2014, empat raksasa perusahaan sawit Indonesia yang proyeknya tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan dan Papua bertemu disela acara United Nations Climate Summit, Kamar Dagang

dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia). Empat perusahaan itu, Golden Agri Resources, Wilmar, Cargill dan Asian Agri bersama Kadin Indonesia menandatangani kesepakatan bersama yang disebut "Indonesia Palm Oil Pledge".

Inti dari kesepakatan itu adalah komitmen dari produsen minyak sawit terkemuka di Indonesia untuk memutus keterkaitan antara produksi minyak sawit dan penebangan dan pembakaran hutan (deforestasi). Ikrar





**Usai Diperiksa KPK, Annas Maamun Menangis.** Ekspresi Tersangka Gubernur Riau non-aktif Annas Maamun saat menanggapi pertanyaan wartawan di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

ini juga memuat sasaran berkelanjutan industri minyak sawit Indonesia termasuk dengan bekerja bersama Pemerintah Republik Indonesia dalam reformasi kebijakan untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan, tidak menanam di lahan kaya karbon (*high carbon stock land*) dan lahan gambut, dan memenuhi komitmen untuk mengimplementasikan standar-standar ini kepada *supplier* atau pihak ketiga. Ikrar ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga pada operasi perusahaan-perusahaan tersebut di seluruh dunia.

Saat itu, Presiden SBY, Menko Chairul Tanjung, Menko Agung Laksono, Menko Djoko Suyanto, beberapa Menteri kabinet, beberapa

pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat menyaksikan secara langsung penandatanganan komitmen itu. Ini salah satu peristiwa penting di akhir kekuasaan SBY.

Yang menarik, ketika ikrar itu terjadi, di Gedung KPK dihebohkan oleh kehadiran Gubernur Riau Anaas Maamun yang tertangkap oleh Operasi Tangkap Tangan KPK ketika menerima suap sehari sebelumnya pada Kamis 25 September 2014. Annas adalah Gubernur Riau ketiga setelah Saleh Djasit dan Rusli Zainal yang masuk bui. Dan semuanya dari partai Golkar.

Rangkaian peristiwa politik, ekonomi dan hukum penting yang sangat berdekatan waktunya itu membuat banyak kalangan bertanya. Apalagi, seminggu setelah Anaas ditahan KPK tepatnya pada 2 Oktober 2014, sebuah UU penting disahkan lagi pemerintah yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan saat di Pekanbaru (8/10) mengatakan bahwa Provinsi Riau adalah provinsi pertama yang akan menerapkan UU baru ini.

Menurut Djohermansyah, dalam UU baru ini, kepala daerah yang tersandung kasus hukum dengan status diperiksa dan tersangka, secara langsung kewenangannya sebagai kepala daerah dicabut. Berbeda dengan UU sebelumnya, meski tersandung kasus hukum, selama masih belum diputus bersalah, seorang Gubernur masih punya kewenangan menjalankan roda pemerintahan di daerahnya.

Sehari (3 Oktober 2014) setelah UU Pemerintahan Daerah ditandatangani, Indonesia melalui Kementerian Pertanian mendapat tambahan bantuan hibah lagi dari UNDP sebesar USD15,5 juta untuk mendorong program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kementerian Pertanian pada hari itu juga (3 Oktober 2014) meresmikan pencanangan platform nasional untuk program tersebut yang akan dilakukan di Riau, Kalimantan dan Papua.

Di hari yang sama juga, AFP (3/Oktober 2014) menurunkan

sebuah berita bertajuk “*US reduces Indonesian debt in exchange for wildlife protection*”. Dalam badan berita itu ditulis: “*The United States has struck a deal to reduce Indonesia’s debts in exchange for Jakarta pledging about USD12 million for programmes to protect endangered species and their habitats on Sumatra island, conservationists said Friday*”.... “*The United States is proud to partner with the government of Indonesia and the NGO sector to help protect and preserve the diverse wildlife that exists on Sumatra,*” kata Kristen Bauer, *charge d’affaires* di Kedutaan AS di Jakarta.

Ada semacam rantai kait kuat yang menghubungkan peristiwa ditandatanganinya RPP Gambut, ratifikasi AATHP, komitmen Indonesia Palm Oil Pledge, OTT Anaas Maamun, UU Pemerintahan Daerah sampai pada komitmen bantuan luar negeri Indonesia.

Pertanyaannya, ada apa di Riau? Apa yang sedang terjadi?

### Geo Ekonomi Riau

Indonesia adalah salah satu negara penghasil komoditas bahan mentah dan baku yang berasal dari sumberdaya alam terbesar di dunia.

Salah satu produk penting andalan Indonesia adalah CPO (minyak mentah sawit). CPO adalah tulang punggung ekspor nonmigas negara bangsa ini. Dalam lima tahun terakhir, ekspor CPO terus naik. Pada 2009, nilai ekspor CPO dan produk turunannya mencapai USD 12,4 miliar, pada 2010 naik menjadi USD 16,4 miliar, pada 2011 melonjak menjadi USD 21,7 miliar, dan pada 2012 melejit menjadi USD 23 miliar. Meski dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, sawit tetap primadona penting negara ini untuk bertarung di kancah global.

Produksi perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera (terutama Riau) and Kalimantan sudah mampu memasok 50% pangsa pasar minyak sawit global. Permintaan global atas biofuel, minyak goreng dan beberapa produk turunannya yang cukup besar membuat pemerintah mendorong

pengalihan fungsi hutan tropis di Sumatera dan Kalimantan ke perkebunan sawit.

Namun, faktor yang paling besar yang mendorong bertambahnya permintaan sawit adalah tumbuhnya permintaan global atas bio energi sejak 2011 lalu. Tak salah kalau sebagian besar kelapa sawit Indonesia di ekspor ke luar negeri. Terutama AS dan Eropa.

Bersama dengan Malaysia, hampir 90% pasar minyak kelapa sawit global dikuasai. Pada 2011 saja produksi minyak sawit buatan Indonesia diserap langsung oleh India (50.54%), Malaysia (14.77%), Singapura (7.51%), Belanda (7.16%),

matahari buatan AS dan Uni Eropa. Menurut data yang dimiliki Aktual, produktivitas per hektar sawit Indonesia dibandingkan kedelai AS bisa mencapai 9-10 kali lipat untuk luas lahan yang sama.

Apalagi ketika terjadi defisit minyak nabati global pada 2013 lalu yang mencapai 7 juta ton per tahun, dengan total luas lahan kedelai dunia yang saat ini mencapai 150 juta ha dibanding lahan sawit dunia yang baru 20 juta ha —sekitar 9 juta ha ada di Indonesia— sudah jelas industri sawit Indonesia sudah diprediksi akan mampu menggeser dominasi AS dan Eropa. Ini yang membuat AS dan

(termasuk potensi di Papua) adalah salah satu kunci kekuatan Indonesia untuk berhadapan dengan tekanan-tekanan geopolitik dan geoekonomi global. SBY juga sadar, sekitar 80% kawasan hutan Riau sudah dimonopoli korporasi besar yakni sekitar 3,1 juta hektar untuk perkebunan sawit dan 3,7 juta hektar untuk HTI. Ini penyebab konflik agraria yang sangat tinggi terjadi di Riau.

Sangat dilematis memang, memutuskan sebuah kebijakan untuk menjadikan sawit sebagai andalan daya saing Indonesia dengan kepentingan lokal (terutama perizinan) dan isu lingkungan. Indonesia harus dapat keluar dari tekanan-tekanan LSM, perlakuan tak adil atas produk minyak sawit Indonesia di pasar global dan tekanan atas kesepakatan-kesepakatan Internasional yang sudah ditandatangani SBY khususnya soal penyelamatan dan moratorium di sektor kehutanan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Kuncinya, seperti yang sering dikatakan Mantan Menko Hatta Rajasa: Sawit Indonesia harus tetap menjadi kekuatan Indonesia dengan cara meningkatkan nilai tambah bahan baku kelapa sawit menjadi produk olahan. Ya, minyak sawit bisa ditingkatkan nilai tambahnya dengan menjualnya dalam bentuk lemak alkohol (*fatty alcohol*), *surfactant*, *soap noodle*, *glycerine* atau yang lainnya dan sekaligus menjadi bahan biodiesel. Bukan saatnya lagi menggenjot produksi kelapa sawit besar-besaran dengan membuka lahan-lahan baru lagi di Riau tapi optimalisasi hasil yang ada. Untuk itu, harus dikembangkan industri hilir kelapa sawit di Riau, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.

Semangat ini ditangkap oleh beberapa empat perusahaan sawit besar yang menandatangani komitmen Indonesia Palm Oil Pledge itu. Mereka kini sudah mulai mengembangkan industri-industri baru pengolahan kelapa sawit. Tidak lagi harus diekspor dalam bentuk mentah.

Sinar Mas Group misalnya, setelah mendapat kontrak perjanjian dengan PT Perusahaan Listrik



**Buruh membersihkan kapal tongkang pengangkut CPO di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.**

dan Italia (5.78%). Ketika terjadi instabilitas kawasan Timur Tengah (termasuk Ukraina) minyak sawit Indonesia menjadi produk penting untuk diserap juga oleh China dan Rusia, bahkan Jepang. Ini karena minyak sawit juga menjadi bahan baku penting untuk beberapa bahan mentega, kosmetik sampai sabun.

Soal kekuatan daya saing, minyak sawit Indonesia jauh lebih daripada minyak dari bahan nabati lainnya seperti kedelai, jagung atau bunga

Uni Eropa *deg-degan*.

Yang mereka takutkan, disamping industri yang berbasis kedelai dan jagung di AS dan Uni Eropa mati akibat penetrasi sawit Indonesia, adalah ketika Indonesia bisa lebih mandiri dalam mengatasi kebutuhan energi nasional dengan kemampuan memproduksi biodiesel dari bahan dasar kelapa sawit yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biodiesel berbahan jagung atau kedelai buatan AS dan Uni Eropa.

SBY memahami benar peta geopolitik dan geoekonomi ini. Dan SBY sangat sadar bahwa Riau dan sebagian daerah di Kalimantan

Negara (PLN) sebagai pemasok CPO untuk bahan bakar pembangkit listrik, Sinar Mas terus melanjutkan pengembangan produk turunan CPO dengan pembangunan pabrik pengolahan (*smelter*) *fatty acid* dan *fatty alcohol* di Indonesia.

Managing Director PT Sinar Mas Group, Gandi Sulistiyanto beberapa saat lalu mengatakan bahwa, untuk proyek pengolahan produk turunan itu, perusahaan telah merogoh kocek sebesar USD 400 juta. “Untuk pembangunan pabrik *fatty acid* nilai investasi sebesar USD 100 juta. Sedangkan, *fatty alcohol* mencapai USD 300 juta,” katanya kepada sebuah media nasional.

Sebagian besar, dua produk turunan oleokimia dasar yang diproduksi Sinar Mas ini akan diekspor ke beberapa negara seperti Jepang, Cina, India, dan Eropa. Namun, sebagian lagi untuk kebutuhan domestik.

Untuk diketahui, *fatty acid* dan *fatty alcohol* adalah produk turunan dari oleokimia dasar yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit (CPO). *Fatty acid* adalah bahan dasar untuk industri makanan, kosmetik, sabun, produksi plastik, karet, dan pelumas. Sementara, *fatty alcohol* untuk bahan detergen cair, shampoo, dan kosmetik.

Berdasarkan data dari Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI), pasar utama produk *fatty alcohol* dunia tahun 2000 adalah Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman, Italia, Inggris, Spanyol, Belgia, Meksiko, Belanda, dan Brasil. Negara-negara tersebut ini menyerap 79,6% dari total volume impor *fatty alcohol* dunia. Sementara, pasar utama produk *fatty acid* adalah Jerman, Belanda, Perancis, Inggris, Spanyol, Singapura, dan Denmark, yang menyerap 59,8% total volume impor *fatty acid* dunia.

Disinilah letak pentingnya potensi geoekonomi Riau dalam hal produk sawit sebagai andalan negara bangsa ini di kancah pertempuran geoekonomi global.

### Geopolitik Riau

Uni Eropa dan Amerika Serikat, biofuel sudah ditargetkan menjadi

energi yang paling penting untuk mengganti peran minyak dan gas sampai 10 tahun ke depan.

Keduanya menargetkan bahwa biofuel akan dijadikan bahan bakar untuk sektor transportasi agar emisi gas karbon turun sampai 20%. Uni Eropa bahkan sudah menargetkan bahwa pada 2050 nanti, 40% biofuel harus digunakan sebagai campuran bahan bakar pesawat terbang. Saat ini, International Air Transport Association (IATA) sudah menetapkan target penggunaan 6% biofuels sebagai campuran bahan bakar pesawat terbang sampai 2020 nanti.

Implikasi dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi 20% emisi karbon dunia membutuhkan sekitar 1,5 triliun tons biomas per tahun untuk menjadi bahan bakar pengganti minyak dan gas di sektor transportasi. Khusus di sektor industri penerbangan, kebutuhan biofuel global akan mencapai 120 juta million ton per tahunnya. Ini permintaan yang sangat tinggi.

Sebuah *report* yang dikeluarkan oleh European Report on Development dengan judul “*Oil Palm Expansion in Riau Province, Indonesia: Serving people, Planet, Profit?*” menyebutkan bahwa untuk mencapai target yang sangat ketat itu, peran minyak sawit sangat penting. “*Palm oil is viewed as important in this respect: it is estimated that the supply of palm oil will have to double to meet global demand between 2010 and 2020,*” seperti di tulis dalam *report* itu.

Meningkatnya permintaan atas biofuel ini mengubah peta geopolitik minyak sawit global. Terutama dalam hal investasi dalam pengembangan dan pembukaan lahan baru sawit. Tak salah jika ketika Norwegia ketika mengucurkan bantuan USD1 miliar ke Indonesia (salah satunya lewat skema program Redd++) meminta Indonesia untuk memorandum pemberian izin baru pemanfaatan hutan.

Ada kepentingan yang tak tertulis ketika Redd+ dilaksanakan bahwa ada alasan sangat logis agar Indonesia harus mengurangi emisi karbon maka Indonesia tidak boleh

lagi membuka lahan hutannya. Padahal, disisi lain, Indonesia masih butuh memperluas perkebunan sawit, tambang dan lainnya agar Indonesia bisa menjaga kedaulatan ekonominya.

Beberapa tekanan geopolitik terus dilakukan ke pemerintahan SBY yang sudah menandatangani kesepakatan internasional perjanjian untuk mengurangi emisi karbon yang sudah tentu dibarengi dengan penggelontoran bantuan utang yang tidak kecil jumlahnya.

Namun, ketika kesepakatan internasional itu masuk ke ranah pemerintahan daerah maka permasalahannya menjadi sangat kompleks. “... Dalam otonomi daerah sering ditafsirkan seolah-olah tidak ada keterkaitan jenjang di antara tingkat pemerintahan. Sebagai akibatnya, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi, sementara itu, meningkatnya wewenang penetapan keputusan dan pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah menyebabkan pemberian izin untuk pengalihan fungsi kawasan hutan yang semena mena dan tidak tepat,” seperti yang tertulis dalam sebuah *working paper* berjudul “Konteks Redd+ di Indonesia: Pemicu, Pelaku dan Lembaganya” yang dikeluarkan oleh Center for International Forestry Research pada 2013 lalu.

Ya. Di tingkat lokal, seperti di Riau dan Kalimantan, kasus penebangan hutan dan pembakaran hutan akan selalu tidak pernah terselesaikan ketika berhubungan langsung dengan kepentingan pemerintahan lokal. Ada kewenangan-kewenangan tertentu yang membuat pemerintah pusat tidak berkutik. Terutama soal perizinan. Ini yang terjadi di Riau dan Kalimantan.

Dan sebaliknya, ketika pemerintah pusat hendak ingin merealisasikan beberapa kesepakatan Internasionalnya, terutama ketika berhadapan langsung dengan beberapa investasi besar yang akan masuk akibat komitmen-komitmen



bisnis dari kesepakatan pinjaman utang yang diterima oleh Indonesia kebanyakan mereka terganjal soal soal RTRW, perizinan sampai PAD, korupsi dan pajak yang ada di daerah.

Jadi cara membaca mengapa tiga gubernur Riau secara berturut-turut masuk bui adalah bukan melalui soal korupsi, atau KPK. Ingat, Riau sampai saat ini adalah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

Bahkan, yang menarik, sebelum kena kasus OTT KPK, Anaas sempat membuka ke media pada 18 Agustus lalu bahwa PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) telah menemukan cadangan besar minyak bumi di kabupaten Rokan Hilir. Anaas adalah bupati Rokan Hilir sebelum jadi gubernur Riau.

“Lima belas hari lalu, saya bertemu dengan Chevron. Dan mereka mengatakan bahwa cadangan minyak terbesar di Riau ada di sekitar sungai Rokan. Volumennya lebih besar dari yang ada di lapangan Duri di Bengkalis,” kata Anaas.

Dalam konteks ini, geopolitik Riau akan menjadi sangat penting terutama dalam hal kekuatannya menopang industri sawit global dan minyak bumi.

Dan harus diingat pula, ada skenario geopolitik besar SBY dan mantan Menko Hatta Rajasa untuk menjadikan Sumatera Utara dan Riau sebagai pintu gerbang Indonesia di Barat. Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di Sumatera Utara, Hatta Rajasa sudah men-*setup* Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sebagai pintu Gerbang Indonesia di bagian Barat.

“Di KEK Sei Mangkei ini akan berkembang pesat industri berkelas dunia. Dengan keunggulan geografis, KEK Sei Mangkei akan menjadi simpul ekonomi dunia,” ujar Hatta di KEK Sei Mangkei kepada wartawan, beberapa saat lalu.

KEK Sei Mangkei adalah salah satu proyek besar SBY untuk meningkatkan daya saing Indonesia untuk berhadapan langsung dengan



**Peresmian KEK Sei Mangkei.** Hatta Resmikan Groundbreaking Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei (3/ Juli/ 2013)

tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Hatta menyebut Sei Mangkei dirancang untuk mengakomodir lebih dari 200 unit industri berkelas dunia. “KEK Sei Mangkei adalah satu-satunya KEK yang memiliki akses ke Selat Malaka yang juga akan terintegrasi dengan kawasan Kuala Tanjung dan terkoneksi langsung dengan Global Hub Kuala Tanjung. Ini akan membuat KEK Sei Mangkei akan berkembang pesat dan menjadi simpul ekonomi dunia,” katanya.

Perlu diketahui, posisi geopolitik dan geoekonomi Sumatera Utara sangat strategis di Selat Malaka. Setiap tahun, tidak kurang dari 120 ribu lalu lintas kapal melalui Selat Malaka. “Artinya setiap hari lebih dari 300 kapal melalui rumah kita ini. Kapal-kapal tersebut mengangkut berbagai barang melayani perdagangan ke Asia Timur (China, Jepang, Korea), ke Asia Selatan (India, Pakistan), ke Timur Tengah-Afrika dan ke Eropa. Mencermati adanya akses konektivitas dunia ini, kita harus cerdas, bisa, dan sesegera mungkin memanfaatkannya sebagai bagian konektivitas logistik nasional dan untuk mengurangi ketergantungan pelayanan jasa logistik kita oleh negara tetangga,” tambah Hatta.

KEK Sei Mangkei nantinya akan

menjadi tempat penting untuk mewujudkan kebijakan besar SBY untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku impor.

Untuk itu, dengan Hatta Rajasa akan mewujudkan tiga proyek infrastruktur besar di Sei Mangkei untuk mengawalinya. Pertama yang akan dibangun adalah pembangunan *dry port* dengan kapasitas 30.312 sampai 75 ribu teus per tahun. Untuk proyek ini disiapkan investasi sebesar Rp78 miliar. Proyek kedua adalah pembangunan *tank farm* kapasitas dua kali lima ribu ton untuk CPO dan dua kali tiga ribu ton untuk CPKO (tahap 1). Investasi sebesar Rp100 miliar disiapkan untuk proyek ini. Proyek ketiga, yang menelan dana sebesar Rp35 miliar adalah pembangunan instalasi pengolahan air bersih kapasitas 250 meter kubik per jam. Pembangunan infrastruktur tersebut didanai oleh PTPN III selaku pembangun dan pengelola KEK Sei Mangkei. Proyek ini diharapkan dapat selesai dan akan dioperasikan pada akhir 2014.

Hatta ingin Sei Mangkei cepat direalisasikan karena, menurut Hatta, pada periode 2013-2014 ada beberapa investor sudah merealisasikan investasi di sana dengan total dana sekitar Rp 6,5 triliun. Untuk percepatan menjadikan Sei Mangkei, pemerintah juga menyiapkan infrastrukturnya. Proyek Tol lintas Sumatera sudah disiapkan.

Transportasi berbasis rel ke Kuala Tanjung dan Bandara Kualanamu juga sudah siap beroperasi.

Jaringan listrik tegangan menengah 20 kv sepanjang 2.700 m, jalan ROW 43 dan 28 sepanjang 1.704 m, drainase induk sepanjang 1.920 m, dan sarana pengolahan air bersih kapasitas 250 m<sup>3</sup>/jam dengan panjang pipa 1.350 m (Tahap I) dan 2.024 m (Tahap II) sudah mulai jalan.

Kebutuhan gas juga akan dipasok dari Arun (Aceh) juga mulai siap meski ada beberapa kendala. PT Pertamina Gas (Pertagas) menargetkan pembangunan pipa gas sepanjang 132 km ruas Belawan-Kawasan Industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei senilai USD 75 juta selesai pada 2015. Saat ini, Pertagas tengah mengerjakan proyek pipa Arun-Belawan sepanjang 350 km dan diharapkan rampung pada Oktober 2014.

Dengan segala permasalahan dan tantangan yang ada di tingkat daerah (terutama soal izin dan tanah) Sei Mangkei tetap harus berjalan dan menjadi pusat industri hilir kelapa sawit andalan Indonesia di bagian barat. Oleh karena itu, Sei Mangkei akan menjadi penting juga dalam menempatkan Indonesia dalam konteks geopolitik Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

“Pengembangan SDM-Iptek di KEK Sei Mangkei menjadi salah satu modal penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas, utamanya kelapa sawit,” kata Hatta menekankan kembali potensi Sawit di Sumatera.

Yang menarik adalah langkah cepat perusahaan multinasional asal Belanda Unilever lewat, PT. Unilever Oleochemical Indonesia membangun pabrik seluas 27 hektar di sana. Dengan investasi Rp 2,04 triliun, PT. Unilever Oleochemical Indonesia akan mengembangkan sendiri produk olahan CPO berupa *fatty acid*, *surfactant*, *soap noodle*, dan *glycerine* sebagai bahan dasar produk globalnya, mulai dari shampo sabun sampai detergen. Unilever adalah perusahaan pertama yang

mendirikan pabrik di Sei Mangkei.

### **Skenario Besar yang Sempit Terganjil**

Nah, dengan skenario besar itu, Riau sebagai penghasil sawit terbesar dan minyak bumi saat ini menjadi penting artinya buat menopang KEK Sei Mangkei. Dalam wacana geopolitik, Riau akan menjadi tulang punggung untuk menjadikan Sei Mangkei sebagai titik pusat pertumbuhan baru Indonesia di bagian barat untuk bersaing dengan Singapura.

Di samping itu, Riau santer dibicarakan ketika ada rencana besar untuk membangun jalur penghubung Indonesia dengan Malaysia dalam program koridor ekonomi Malaka-Dumai. Berdasarkan beberapa kajian awal proyek besar ini, data yang diperoleh Aktual, menyebut skenario jembatan yang menghubungkan antara Malaysia dan Riau dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN sangat penting artinya. Karena, proyek jembatan Dumai-Malaka akan bersinergi langsung dengan pembangunan jembatan di koridor Selat Sunda (Jembatan Selat Sunda).

Apalagi ketika terjadi sinergitas antara Bandara Kualanamu (Pekanbaru), pelabuhan Dumai, Sei Mangkei (Sumut) dan pelabuhan Kuala Tanjung sudah terjadi maka proyek Indonesia itu akan berjalan mulus.

Namun, ketika berbicara masalah proyek penting jalan tol di Riau yang seharusnya mampu menghubungkan Dumai-(pelabuhan Dumai) ke Pekanbaru- (Bandara Kualanamu) sepanjang 134 km ternyata selama 8 tahun sejak direncanakan hingga kini, malah belum kunjung bisa dibangun oleh Pemprov Riau.

Anas Maamun mengatakan pembangunannya tersandung persoalan, seperti masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), hutan tanaman industri (HTI), hak guna hutan (HGU) serta hak penguasaan hutan (HPH).

“Pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru masih belum bisa

dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, pembangunan jalan tol terkendala status lahan masyarakat yang akan dibebaskan,” kata Anas Maamun kepada wartawan usai membuka Rakernas Apeksi X tahun bulan Mei 2014 lalu di Dumai.

Itu belum catatan-catatan lain soal program pemerintah pusat dan bisnis yang tersandung soal perizinan.

Itu belum tercatat beberapa LSM lingkungan kelas dunia yang ada di Riau dan Kalimantan. Mereka dengan serius, terorganisir tentu dengan *backup* dana dari AS dan beberapa negara Eropa selalu mengkritik pemerintah soal penembangan hutan, pembakaran hutan, terbunuhnya satwa liar yang dilindungi sampai hukum dan kepentingan adat.

“Kita menduga aturan gambut (PP Gambut) yang baru itu didorong oleh Eropa yang mengalami kesulitan bersaing dengan Indonesia,” kata Sekjen Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI), Suwardi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Suwardi, data yang ada saat ini, luas lahan gambut di Indonesia adalah 14 juta ha atau 8% dari total luas lahan nasional yang mencapai 190 juta ha. Di Indonesia baru 6 juta ha lahan gambut yang sudah dibuka dan yang rusak 2 juta ha akibat peruntukan kebijakan transmigrasi. Jadi hanya sekitar 4 juta hektar saja yang baru dimanfaatkan. Padahal, hasil studi mengatakan pemanfaatan lahan gambut buat sawit tidak akan mengganggu lingkungan jika *disupport* oleh teknologi tertentu.

Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Jokowi-JK.

Pemerintah, politisi sampai praktisi bisnis harus sadar OTT KPK terhadap Anaas Maamun, RPP Tembakau sampai UU Pemerintah Daerah bukan hanya sekadar masalah hukum. Masalah suap semata.

Di belakangnya ada tekanan dan desakan kuat dari AS dan Eropa untuk melemahkan posisi geoeкономи dan geopolitik minyak sawit Indonesia.

Ini salah satu pekerjaan rumah yang disisakan SBY-Boediono buat Jokowi-JK. ■

## MA Lantik Empat Hakim Agung



Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali melantik dan mengambil sumpah empat hakim agung baru, yaitu Dr H Amran Suadi SH MH MM, Sudrajat Dimiyati SH MH, Dr Purwosusilo SH MH dan Is Sudaryono SH MH.

“Merdeka semua berlantar belakang sebagai hakim karir, jadi tidak perlu lagi melakukan penyusuaian dan diharapkan bisa langsung bekerja,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur,.

Menurut Ridwan, tahun depan (2015) MA akan kembali mengajukan tambahan hakim agung untuk melengkapi formasi 60 hakim agung.

“Setelah beberapa hakim agung pensiun, di antaranya Ketua Muda Pembinaan Widayatno Sastrohardjono yang pensiun sejak Juli 2014, juga untuk melengkapi 60 hakim agung, kami segera akan mengajukan permintaan kembali,” tuturnya. / Nebby Mahbubirrahman - Ant

## Seleksi Menteri Jokowi Kalah Transparan Ketimbang Pilkada



Pemilihan kepala daerah lebih transparan ketimbang seleksi calon menteri Jokowi.

“Kalau pilkada lebih jelas, masyarakat bisa memilih langsung,

itu lebih bagus. Dari pada sembunyi-sembunyi sehingga itu menjadi tak transparan, itu blunder,” kata pengamat dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir beberapa saat lalu.

Jokowi, kata dia, seharusnya bekerja sama dengan masyarakat untuk memilah nama-nama calon menteri. Karena, bagaimana pun masyarakat menginginkan agar transparan dalam seleksi menteri. “Harusnya konsultasinya kepada masyarakat, bukan ke KPK, jadi masyarakat bisa menilai terkait dengan hasil seleksi itu,” kata dia.

/ Nebby Mahbubirrahman - Wisnu Yusep

## KPK: Tak Ada Jaminan Menteri Jokowi Tak Korupsi



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi catatan khusus ke 43 calon nama menteri kabinet Presiden Joko Widodo. Ada 8 calon menteri Jokowi yang diduga bermasalah menurut catatan KPK dan PPATK.

Meski demikian, KPK tidak menjamin bahwa calon menteri yang lolos dari saringan KPK dan PPATK terbebas dari korupsi.

“Kami juga tak pernah menjamin itu (terbebas korupsi),” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di Kantornya, Jakarta, Selasa (21/10).

Johan mengatakan, dari seleksi yang dilakukan KPK, ada beberapa menteri yang diberi tanda merah, sebagai catatan terindikasi kasus korupsi.

Seleksi sendiri, sambung Johan, dilakukan oleh semua komisioner KPK dibantu dengan direktur yang berkaitan untuk menggali informasi mengenai calon menteri tersebut.

/ Nebby Mahbubirrahman - Wisnu Yusep



# Johan Budi Dilantik Jadi Deputy Pencegahan KPK



Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribawo dilantik sebagai Deputy Pencegahan lembaga penegakan hukum tersebut.

“Selanjutnya kepada Pak Johan Budi sebagai Deputy pencegahan, kita tahu bersama pemberantasan

korupsi tidak hanya bisa mengandalkan penindakan semata. Tapi dengan pendekatan pencegahan diharapkan Pak Johan Budi mampu mengoptimalkan Deputy Pencegahan karena bisnis KPK itu penindakan dan pencegahan,” kata Ketua KPK Abraham Samad saat pelantikan

Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/10).

Johan Budi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas). Ia menggantikan Deputy Pencegahan KPK yang sebelumnya dijabat Iswan Elmi.

Johan Budi mengaku ingin melakukan sinergitas antara pencegahan dan penindakan.

“Saya punya beberapa rencana terkait pencegahan. Jadi selama ini kan belum terlihat sinergitas antara pencegahan dan penindakan yang seolah-olah menjadi hal dipentingkan,” kata Johan.

Padahal menurut Johan ruang lingkup pencegahan harus sama dan sebangun dengan penindakan.

“Namun tentu kita tetap mengacu pada ‘national interest’ KPK periode ketiga yaitu penerimaan, pengeluaran negara, kemudian berkaitan dengan ‘natural resources’, berkaitan dengan infrastruktur yaitu kepentingan masyarakat banyak apakah itu kesehatan. Saya kira pencegahan tetap tidak kalah dahsyatnya dari penindakan. Jadi harus simultan dengan kecepatan yang sama dengan penindakan,” tambah Johan.

/ Nebby Mahbubirrahman - Ant

# Jokowi Jangan Gunakan Aparat Hukum Untuk Kekuasaan



Anas berharap, Jokowi tidak menggunakan aparat hukum untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

“Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, tidak tergoda untuk menggunakan aparat hukum dan keamanan untuk kepentingan politik dan kekuasaan,” kata Anas.

Pernyataan itu, disampaikan Anas lewat surat yang ditulisnya kepada pengacaranya, Handika Wongso, di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa saat lalu.

Selain itu, Anas pun meminta Jokowi berhati-hati akan hadirnya penghasut di dalam pemerintahannya. “Perlu berhati-hati terhadap kemungkinan hadirnya sengkuni di lingkarannya,” kata Anas.

/ Nebby Mahbubirrahman - Hanny Hanifa





# Penaikkan Subsidi BBM Hemat APBN

Oleh: Ismed Eka, Dhanu Akbar

**D**alam RAPBN 2015 Presiden SBY menyampaikan enam asumsi dasar ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi 5,6 persen. Kedua, inflasi 4,4 persen. Ketiga, suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen. Keempat, rata nilai tukar rupiah Rp11.900 per dolar Amerika Serikat. Kelima, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD105 per barel. Keenam, lifting minyak mentah 845 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro ke depan, pendapatan negara dalam RAPBN 2015 direncanakan mencapai Rp1.762,3 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan mencapai Rp2.019,9 triliun. Anggaran belanja negara tersebut terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.379,9 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp640,0 triliun. Dengan konfigurasi seperti itu, dalam RAPBN 2015 terdapat defisit anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menetapkan belanja subsidi BBM dalam RAPBN 2015 sebesar Rp276 triliun, atau lebih rendah dari rancangan awal dalam nota keuangan



sebesar Rp291,1 triliun. Angka tersebut lebih kecil dari angka pada hasil pembahasan awal rapat mereka yang sebanyak Rp280,6 triliun.

Angka Rp276 triliun itu juga berdasarkan asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan RAPBN 2015. Belanja subsidi BBM sebesar Rp276 triliun itu terdiri atas belanja subsidi premium, minyak tanah dan solar sebesar Rp194,64 triliun serta subsidi LPG tiga kilogram Rp55,1 triliun.

Kemudian, PPN atas jenis BBM tertentu dan LPG tiga kilogram sebesar Rp24,9 triliun, perkiraan subsidi LGV Rp4,2 miliar, kekurangan subsidi tahun lalu Rp46,2 triliun serta penghitungan carry over ke tahun berikutnya Rp45 triliun.

Sementara, kuota BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter atau lebih rendah 2 juta kiloliter dari usulan rancangan awal nota keuangan RAPBN 2015 sebesar 48 juta kiloliter. Perinciannya, premium dan bahan bakar nabati 29,4 juta kiloliter, solar dan bahan bakar nabati 15,6 juta kiloliter, dan minyak tanah 850.000 kiloliter.

Sejak tahun 2009, APBN untuk subsidi BBM terus meningkat, sedangkan subsidi lainnya seperti pangan, benih, dan pupuk cenderung stagnan. Pada tahun 2009, subsidi BBM masih dibawah Rp50 triliun, namun mendekati tahun 2015, subsidi BBM meningkat menjadi Rp276 triliun. Melonjaknya subsidi BBM tidak hanya disebabkan melonjaknya harga minyak dunia, namun akibat tidak masuk akal nya konsumsi BBM yang diperkirakan mencapai 48 Juta Kilo Liter pada 2015.

Guna menekan subsidi sektor energi, Chatib memperkirakan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014, bisa menghemat anggaran belanja subsidi energi dalam APBN-Perubahan hingga Rp21 triliun.

“Kalau naik Rp3.000 (per liter) pada November, ‘saving’nya Rp21 triliun, ini besar karena sekitar 0,2 persen dari PDB,” ujarnya di Jakarta.



Menkeu memastikan kenaikan harga BBM tersebut dapat mengurangi beban belanja subsidi energi, meskipun berlaku efektif hanya dua bulan, terutama untuk belanja subsidi BBM, yang pada APBN-Perubahan 2014 ditetapkan sebesar Rp246,5 triliun.

“Betul, itu akan berpengaruh. Penghitungannya sederhana,” katanya.

Hingga 29 Agustus 2014, realisasi belanja subsidi BBM telah mencapai Rp162,4 triliun atau 65,9 persen dari pagu Rp246,5 triliun, dan kemungkinan akan melebihi pagu apabila hingga akhir tahun tidak ada upaya penghematan BBM bersubsidi.

Senada dengan Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengaku setuju dengan rencana tersebut. Pasalnya kebijakan pengurangan subsidi memang harus segera dilakukan mengingat besaran angka subsidi sudah di atas Rp300 triliun dengan komposisi hampir Rp1 triliun per harinya.

“Tentunya kita sepakat BBM subsidi harus dikurangi,” ujar Wamen ESDM.

Menurutnya, kenaikan harga BBM subsidi juga dinilai perlu dilakukan dalam rangka membasmi aksi penyelewengan atau penimbunan BBM subsidi yang kerap terjadi.

“Penyelewengan kan terjadi

karena ada disparitas harga tinggi di sektor hilir. Mau diapakan saja susah karena tidak ada payung hukumnya,” jelasnya.

Dirinya berharap pemerintah dibawah pimpinan Jokowi-JK tidak hanya dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp3.000 per liter, melainkan juga dapat mengurangi kuota sebesar 30 persen.

“Kalau subsidi BBM dikurangi 30 persen dapat Rp150 triliun, bayangkan infrastruktur apa saja yang bisa dibangun,” ujarnya.

Senada dengan Menkeu dan Wamen ESDM, Penasihat Senior Tim Transisi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa ketika mulai menjabat sebagai Presiden RI pada 20 Oktober, Jokowi dihadapkan pada APBN yang berdarah-darah. Defisit Anggaran mencapai Rp27 triliun dan carry over BBM subsidi mencapai Rp46 triliun, sedangkan total kas negara yang kosong mencapai USD7,2 miliar.

“*Eggak* mungkin kalau BBM Subsidi tidak naik. Pasalnya, ketika Jokowi menjabat pada 20 Oktober mendatang, ada carry over yang harus dibayar untuk tahun depan. Otomatis kenaikan ini memang perlu dilakukan,” terangnya.

Menurutnya, jika BBM subsidi dinaikkan Rp3.000 per liter maka negara bisa menghemat USD13-14 miliar atau Rp150 triliun.

Terkait dengan langkah



Jokowi-JK mengatasi defisit anggaran, investor pasar saham Indonesia masih menanti kebijakan pemerintahan baru Jokowi terkait subsidi bahan bakar minyak untuk menanamkan lebih banyak modal.

“Untuk jangka pendek investor masih menunggu menterinya siapa, kebijakannya bagaimana, dan bagaimana subsidi BBM-nya,” ujar Kepala Grup dan VP Investasi PT Sun Life Finansial Indonesia Marsangap P Tamba di Jakarta.

Dia menjelaskan keputusan investor untuk menunggu dikarenakan subsidi BBM mengambil porsi yang sangat besar dalam konteks defisit anggaran negara.

“Defisit anggaran kita 20 miliar dolar, sementara subsidi minyak 21 miliar dolar. Jadi bisa dibayangkan apabila subsidi itu dihilangkan dampaknya akan besar sekali,” katanya.

Liza Lavina sebagai Intermediary Business dari Schrodgers mengatakan bahwa pemerintah Jokowi-JK dituntut untuk memiliki ketegasan dalam menjalankan janji mewujudkan program-programnya seperti pengurangan subsidi BBM.

“Seharusnya BBM subsidi jadi dinaikkan tahun ini, kalau kelewat tahun ini ya pasarnya turun. Seperti yang terjadi pada era Presiden SBY beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Liza menambahkan bahwa

dengan kenaikan harga subsidi BBM, biaya dalam APBN akan menurun dan laba akan meningkat, namun hal itu dapat berjalan dengan beberapa syarat.

“Kalau BBM udah naik nih, plan infrastruktur harus jadi, pasar melihat itu. Lalu kabinet pemerintah Jokowi JK haruslah orang-orang yang profesional, dan terakhir DPR dan MPR nya harus bekerja sama dengan pemerintah,” ujar Liza.

Global Strategy Eastspring Investment Singapore, Robert Rountree mengatakan bahwa keadaan perekonomian Indonesia dimata investor asing cukup baik. Hal ini terbukti dari banyaknya investasi yang berasal dari luar negeri.

“Kami sebagai investor asing lebih concern terhadap kenaikan BBM dan pembangunan yang nantinya akan dilakukan pada presiden Jokowi,” ujar Robert di Jakarta.

Menurutnya, ketakutan investor yang utama adalah jika BBM tidak jadi naik dan program-program tidak dijalankan oleh pemerintahan baru.

“Kalau berani menaikkan BBM kita akan beli saham-saham, tapi kalau tidak berani naik itu menjadi tanda tanya besar bagi kita,” tegas Robert.

Salah satu hal yang harus segera dilakukan untuk menghadapi bengkaknya APBN dan defisit berjalan menurut Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza

Adityaswara adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Semakin cepat Jokowi mengambil keputusan terkait kenaikan BBM, makin baik untuk kepastian inflasi. Jadi kita bisa tentukan tingkat suku bunga,” ujar Mirza di Jakarta.

Dirinya menginginkan besaran kenaikan harga BBM sebaiknya yang berdampak maksimal, defisit transaksi berjalan juga menjadi kecil. Jika BBM subsidi naik Rp1.000/liter, inflasi kemungkinan kecil tapi dampak ke APBN tidak banyak.

“Namun kalau BBM subsidi naik Rp3.000 mungkin inflasi tinggi, tapi *market* sudah ekspektasi naik Rp3.000,” ujarnya.

Senada dengan BI, President Director Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) menunggu kepastian langkah Jokowi-JK untuk menaikkan BBM subsidi.

“Kita semua menunggu bagaimana kenaikan BBM bersubsidi tersebut,” ujar Lilis Setiadi selaku di Jakarta.

Selain itu Lilis mengatakan bahwa jika presiden terpilih Joko Widodo menaikkan BBM subsidi Rp1.000 tidak akan berpengaruh banyak pada perekonomian.

“Kalau naiknya Rp1.000 ngga akan berpengaruh apa-apa. Tapi kalau naiknya Rp2.000 itu standar, nah kalau naiknya Rp3.000 dampaknya APBN kita akan lebih baik,” ujar Lilis.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengaku akan turut serta mendesak pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi.

Pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara bertahap sampai pada titik BBM tidak perlu lagi disubsidi. Dirinya berharap pada 2016 mendatang, subsidi BBM bisa dicabut 100 persen sehingga dijual harga keekonomian.

“Pada 2016 saya kira BBM sudah bisa mencapai harga keekonomian. Tapi orang miskin dan transportasi tetap disubsidi. Kalau mau subsidi ini harus jujur subsidi jangan manipulasi subsidi,” pungkasnya. ■

## AS Tertarik Investasi Ritel, Teknologi dan EBTk



Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert O Blake menyatakan Indonesia masih menarik bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama perdagangan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersangsur membaik.

“Terus menerus meningkatkan hubungan perdagangan dengan Indonesia adalah prioritas bagi kami,” kata Robert O Blake, di Yogyakarta, Kamis (23/10).

Blake mengatakan sebagian besar perusahaan yang masih tertarik untuk melakukan kerja sama perdagangan atau investasi di Indonesia di antaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang ritel, teknologi, serta energi baru terbarukan (EBTK).

“Kerja sama itu akan saling menguntungkan, apalagi perusahaan-perusahaan AS di Indonesia selama ini dikenal sebagai perusahaan yang selalu taat membayar pajak,” kata dia.

Perusahaan yang konsisten berinvestasi di Indonesia, ia mencontohkan, yaitu General Electric (GE) merupakan perusahaan AS yang banyak bergelut di bidang teknologi. PT GE Lighting Indonesia yang ada di Yogyakarta, Blake mengklaim, hingga saat ini telah mempekerjakan 600 orang penduduk Yogyakarta.

“Secara keseluruhan hingga saat ini perusahaan-perusahaan kami di Indonesia telah mempekerjakan 2 juta lebih masyarakat Indonesia,” ucapnya. / Ismed Eka Kusuma - Ant

## J-Trust Menangkan Tender Bank Mutiara, OJK Tunggu Data dari Jepang



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan bertanya kepada otoritas keuangan Jepang untuk mengumpulkan informasi dan melengkapi data terkait J Trust Co, Ltd selaku pemenang tender pembelian saham Bank Mutiara.

“Kami sedang mencari data selengkapnyanya dan kami sedang menunggu data dari otoritas keuangan Jepang,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Kamis (23/10).

Muliaman menuturkan pelengkapan data itu diperlukan sebagai bahan untuk menguji kelayakan perusahaan asal Jepang tersebut sehingga OJK memiliki banyak pertimbangan.

“Ini dilakukan untuk mendapatkan data tambahan sebelum melakukan fit and proper

test terhadap pembeli Bank Mutiara,” ujar Muliaman.

Muliaman menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan OJK terhadap J Trust Co sendiri nantinya tidak akan berbeda dengan standar pengujian yang berlaku saat ini.

“Itu seperti melihat kesiapannya, komitmennya dan langkah langkah pengembangan Bank Mutiara kedepan mau diapakan, serta bagaimana upaya menjaga kualitas NPL (kredit bermasalah),” ucap Muliaman.

Setelah pihak J Trust Co melalui uji kelayakan, OJK akan memutuskan apakah J Trust Co layak atau tidak menjadi pembeli Bank Mutiara pada November mendatang.

LPS sendiri memang mengharapkan keputusan tersebut dapat diumumkan sebelum tanggal 21 November 2014 saat penandatanganan pembelian Bank Mutiara.

“Kami akan panggil J Trust setelah data-datanya lengkap. Mereka harus signing terakhir 21 November kan? Sebelum itu kami panggil,” kata Muliaman.

## Akses Rokok Lebih Mudah Daripada Bank



Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin mengatakan sangat penting mendekatkan akses keuangan ke rakyat.

“Penting bagi kita untuk merealisasikan inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah mendekatkan akses keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari tabungan hingga penyaluran kredit,” ujar Budi beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bila dibandingkan dengan industri lainnya, inklusi keuangan jelas masih jauh tertinggal. Tidak seperti industri otomotif, telekomunikasi, Hingga rokok yang begitu mudah diakses oleh masyarakat.

“Akses rokok saja lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan bank,” ucapnya.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhammad Daeng



# Pasar Menanti Dua Kebijakan Jokowi

Pelaku pasar masih menanti dua kebijakan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memperbaiki ruang fiskal, dan mengkaji ulang regulasi larangan ekspor mineral mentah agar menurunkan defisit neraca transaksi berjalan.

Jika harga BBM dinaikkan, diperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, menjadi delapan persen, dari 7,5 persen saat ini, untuk meredam inflasi, kata Ekonom senior Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan beberapa saat lalu.

“Penghematan dari naikan BBM itu bisa dialokasikan ke belanja infrastruktur yang sangat dinanti investor,” ujar dia.

Sedangkan, pengkajian ulang larangan ekspor konsentrat, ujar Fauzi, karena sepanjang 2014, larangan itu telah membuat defisit neraca transaksi berjalan semakin melebar. Pada

kuartal II, defisit transaksi berjalan mencapai 4,27 persen dari Produk Domestik Bruto.

Menurut dia, setelah larangan ekspor bahan mentah itu diberlakukan pada awal 2014, telah terjadi penurunan ekspor enam miliar dollar AS.

Jika kebijakan itu “dilunakkan”, kata Fauzi, ditambah pengurangan subsidi energi, defisit neraca transaksi berjalan yang, menurut dia, sebesar 25 miliar dollar AS pada tahun ini dapat turun menjadi 15 miliar dollar AS, pada semester II 2015.

“Itu memang pil pahit, tapi memang dampaknya akan mulai terasa pada semester II 2015,” ujarnya. / Ismed Eka Kusuma - Ant



## BBM Naik, Inflasi Sentuh Sembilan Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memperkirakan angka inflasi pada tahun 2014 akan melebihi dari apa yang ditargetkan sebelumnya.

“Kalau pemerintah naikin harga BBM, inflasi bakal naik jadi 9%,” kata Agus di Gedung BI, Kamis (30/10).

Dirinya menyebut bahwa tingginya angka inflasi tersebut bukan

menjadi persoalan yang perlu dipusingkan mengingat BI bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk meredam lonjakan harga akibat inflasi tersebut.

Agus menganggap kenaikan harga BBM bersubsidi itu sangat penting dalam menurunkan defisit anggaran negara yang sejak tahun 2011 selalu defisit.

“Defisit itu paling besar disebabkan oleh subsidi BBM yang melebihi Rp300 triliun, itu sudah tidak sehat,” ungkap dia. / Ismed Eka Kusuma

## Delapan Tantangan Perekonomian Jangka Pendek Jokowi



Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah menyebut ada delapan tantangan perekonomian jangka pendek yang akan dihadapi oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Tantangan perekonomian rezim Jokowi-JK, kalau menurut saya cukup berat, ada 8 tantangan dalam jangka pendek,” kata Burhanudin dalam acara diskusi di Wisma Intra Asia, Jakarta, Rabu (22/10).

Dikatakannya, tantangan pertama dalam jangka pendek yang akan dihadapi pemerintah baru adalah mengenai perlambatan ekonomi dunia. Kemudian yang kedua adalah menurunnya harga komoditas.

“Kemerosotan harga komoditi menyebabkan neraca perdagangan kita defisit,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemerintahan Jokowi-JK pun akan dihadapkan pada defisit transaksi berjalan, dalam jangka pendek juga tantangan yang keempat adalah kenaikan defisit APBN.

“Kelima perlambatan PDB Indonesia, keenam peningkatan ekspektasi inflasi, ketujuh resiko pembalikan arus modal asing, dan kedelapan pertambahan utang luar negeri,” tutupnya.

/ Ismed Eka Kusuma - Dhanu Akbar Muhammad Daeng



## PDI-P: MENDING GAK ADA PEMERINTAHAN JOKOWI



Anggota Fraksi Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Effendy Simbolon kesal dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ia menuding Wakil Presiden Jusuf Kalla ada dibalik rencana pengurangan subsidi ini. "Saya *enggak* tahu ya ada apa di balik itu. Yang saya tanya cuma kenapa JK bernafsu sekali?" lanjut Wakil Ketua DPR tandingan versi Koalisi Indonesia Hebat tersebut.

Effendi khawatir, rencana kenaikan harga BBM itu ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla. "Siapa Sudirman Said? Siapa Rini Soemarno? Siapa itu Sofyan Djalil? Apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi (neolib)?" tegasnya.

Ia bahkan menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo dan JK ini tidak ada bedanya dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Soal tata niaga energi tidak ditangani, ini yang ditangani malah masalah program jaring pengaman sosialnya. Mending enggak usah ada pemerintahan Jokowi, mending lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. / Sukardjito

## Menteri ESDM: Petral Tidak Perlu di Bubarkan



Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak akan membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau PETRAL. "Petral itu tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang bepihak ke nasional," kata Sudirman dalam diskusi di Pisa Cafe, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Sudirman juga mengatakan keberadaan PETRAL yang berada di Singapura tidak perlu dipindahkan ke Indonesia. "Pengawasan tidak tergantung lokasi kantor. Sekarang ini, kondisi geografis tidak menjadi masalah. Banyak perusahaan, termasuk AS juga berkantor di Singapura," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan instrumen "trading" migas di luar negeri seperti Petral yang mempunyai fleksibilitas, kemampuan kredit besar, dan terdaftar dalam pasar internasional. "Yang keliru adalah kalau instrumen itu dimanfaatkan secara salah. Itu yang harus ditata kembali," tukasnya.

Sebelumnya, mantan Deputy Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait perbaikan tata kelola migas agar sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3, salah satu rencana aksi yang diusulkan kelompok kerja adalah

pembubaran Petral dan mengalihkan fungsi dan kantornya ke Pertamina selaku induk usaha di Jakarta.

Petral merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina, dan berperan sebagai kepanjangan tangan dalam impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan didirikan di Hong Kong dan melalui melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Service (PES), berkedudukan dan melakukan aktivitas di Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan minyak dunia. Pada 2013, Petral mengimpor minyak mentah sebanyak 327 ribu barel per hari atau meningkat 24 persen dari 2012 sebesar 264.390 barel per hari.

Indikator keuangan Petral pada 2012 terlihat pendapatan usaha 33,35 miliar dolar AS, beban pokok 33,291 miliar dolar, beban usaha 14 juta dolar, laba usaha 45 juta dolar, laba bersih 43 juta dolar, aset 3,418 miliar dolar, kewajiban 3,152 miliar dolar, dan ekuitas 266 juta dolar AS. Sementara pada 2013, pendapatan usaha 33,292 miliar dolar, beban pokok 33,229 miliar dolar, beban usaha 17 juta dolar, laba usaha 46 juta dolar, laba bersih 46 juta dolar, aset 3,557 miliar dolar, kewajiban 3,313 miliar dolar, dan ekuitas 244 juta dolar AS. / Sukardjito

## Rini Bantah Akan Masukkan Ari Kakaknya, Sebagai Komut Pertamina

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah masuknya dia sebagai menteri di kabinet kerja Jokowi-JK merupakan skema untuk menempatkan kakak kandungnya, Ari Soemarno dalam jajaran komisaris Pertamina. "Nggaklah, itu semua dengan *fit and proper*. Ada proses lanjutan dan juga proses lainnya," kata Rini di Jakarta, Rabu (29/10).

Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK itu menyebut, semua proses penempatan komisaris di perusahaan plat merah itu berdasarkan uji kelayakan atau *fit and proper test*. Menurut Rini, proses uji kelayakan dilakukan kepada semua para calon yang berasal dari eksternal perusahaan, sementara bagi calon dari kalangan internal perusahaan tidak melalui uji kelayakan.

Rini menegaskan, bahwa kementeriannya tidak akan memilih calon dari eksternal, bila ternyata calon internal jauh lebih baik. "Jadi *fit and proper* itu dibuat kalau mereka tidak diambil dari direksi yang ada. Direksi yang ada mereka sudah melalui *fit and proper* yang ada. Untuk eksternal juga dilihat dulu apakah lebih bagus dari internal atau tidak," ujar Meneg BUMN.

Ia juga membantah rumor yang menyatakan bahwa dirinya mencalonkan nama Ahmad Faisal dan Hari Karyulianto untuk mengisi posisi Direktur Utama Pertamina yang ditinggalkan Karen Agustiawan sejak 1 Oktober lalu. Ahmad Faisal merupakan mantan Direktur Niaga Pertamina era Ari Soemarno, kakak dari Rini Soemarno. Sedangkan Hari Karyuliano saat merupakan Direktur Gas Pertamina. "Belum, belum ada. Untuk calon Dirut Pertamina masih akan dibahas dalam rapat," kata Rini. / Sukardjito

## Menteri ESDM Copot Dirjen Migas

Menteri ESDM Sudirman Said langsung melakukan pembenahan pada Kementerianya sekapan setelah dilantik. Ia mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Edy Hermantoro. Pencopotan Edy merupakan pertimbangan dari Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dia mengaku telah menerima laporan dari UKP4 yang menyebutkan banyak program nasional yang dikerjakan terhambat pada instansi di bawah Edy Hermantoro. "Hari ini saya menandatangani SK (Surat Keputusan) pengangkatan PLT Dirjen Migas, namanya Insinyur Naryanto Wagimin, meneruskan tugas dari Edy Hermantoro," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Sudirman mengatakan telah meneken Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dirjen Migas Naryanto Wagimin untuk meneruskan tugas Edy Hermantoro. Menurut dia, tindakan



ini merupakan upaya untuk mengurai sumbatan-sumbatan masalah di sektor energi agar terselesaikan.

Menurut Sudirman, laporan UKP4 menyatakan seluruh program nasional yang ditargetkan di bidang

migas tidak tergarap. Akibatnya, kinerja industri migas nasional terhambat. "Impact-nya lumayan besar pada industri," katanya.

Naryanto Wagimin merupakan sosok yang sudah dikenal di lingkungan Direktorat Jenderal Migas. Naryanto sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembinaan Hulu Migas. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Program Migas.

Pencopotan Edy tidak lepas dari terhambatnya program pemerintah menambah pasukan gas dari proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) Chevron di Selat Makassar, Kalimantan Timur. "IDD dan lainnya, termasuk rencana pembangunan kilang minyak yang nggak jadi-jadi," ujar Naryanto. / Sukardjito

## ANDI WIDJAJANTO JABAT SETKAB

Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab). "Tadi pagi telah dilantik Setkab yang baru," kata Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Pelantikan Andi dilakukan secara tertutup. Selama 10 menit itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla, seluruh menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kapolri Jendral Sutarnan, Kepala BIN Marciano Norman, para Kepala Staf TNI, serta para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretriariat Kabinet.



Usai pelantikan, Presiden dan para menteri segera menuju Kantor Presiden untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di kantor Presiden.

Andi adalah sosok yang dekat dengan Jokowi sejak masa kampanye. Bersama dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan politisi PDI-P Hasto Kristiyanto, tiga serangkai ini kerap memberikan masukan kepada Jokowi dalam membentuk kabinet. / Sukardjito



**G**edung-gedung sekolah, pemerintahan, rumah warga di Jalur Gaza, Palestina, boleh saja hancur lebur. Ribuan warga, termasuk orang tua, perempuan, dan anak-anak, telah tewas mengenaskan akibat pemboman brutal Israel. Tetapi semangat kemerdekaan Palestina pantang surut ke belakang. Kepemimpinan Palestina di bawah Mahmoud Abbas kini mengubah taktik, dengan memainkan kartu internasional.

Kebrutalan militer Israel di Gaza justru makin membangkitkan simpati warga dunia kepada aspirasi rakyat Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Adalah pemerintah baru Swedia, salah satu anggota penting Uni Eropa, yang secara tegas menyatakan akan segera mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Perdana Menteri Stefan Lofven dari Partai Sosial Demokrat mengatakan hal itu dalam pidato pelantikannya di parlemen Swedia, 3 Oktober 2014.

“Suatu solusi dua negara membutuhkan saling pengakuan dari kedua belah pihak, dan kehendak untuk suatu koeksistensi damai. Karenanya Swedia akan mengakui negara Palestina,” tegas Lofven, tanpa menyebut kapan pengakuan resmi itu akan dilakukan. Swedia akan bergabung dengan lebih dari 130 negara yang mengakui negara Palestina. Swedia juga akan menjadi negara maju kedua yang mengakui Palestina. Hingga saat ini, satu-satunya negara maju di Eropa Barat yang mengakui Palestina hanya Islandia pada 15 Juli 2013.

Menyusul Swedia, parlemen Inggris –lewat pemungutan suara pada 13 Oktober 2014—juga mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan menyerukan pada pemerintahnya untuk melakukan hal yang sama. Dari 650 anggota parlemen, 271 orang dari lintas partai (Partai Buruh dan Partai Konservatif) mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, 12 menentang, dan sisanya abstain.

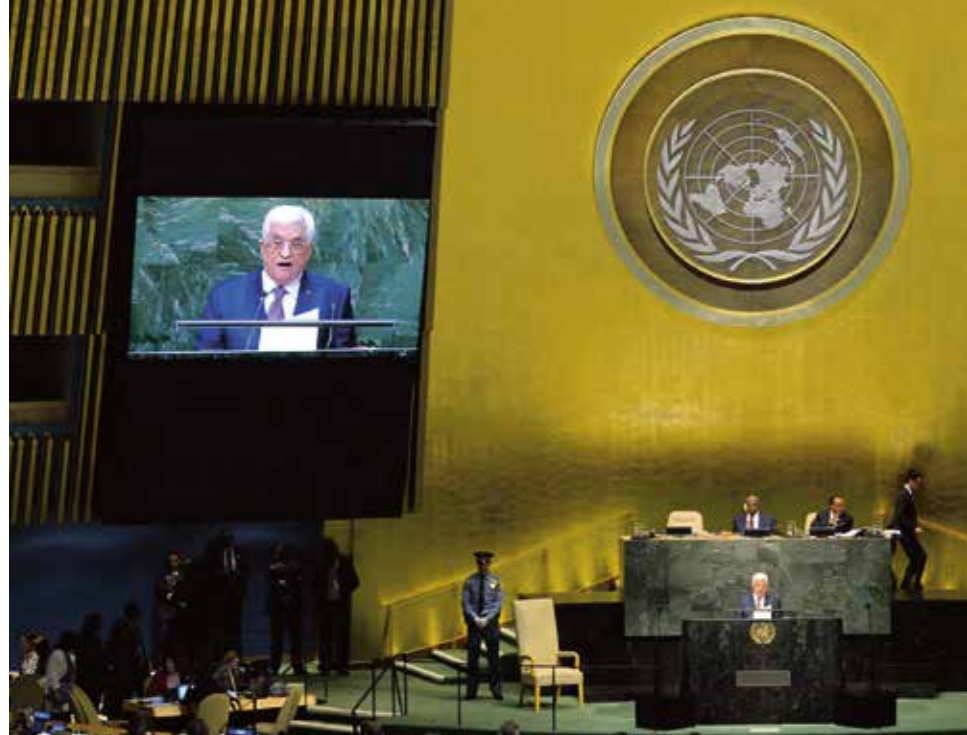


#### Kerugian politis dan ekonomis

Seruan parlemen yang didorong oleh Partai Buruh itu memang tidak mengikat dan tidak wajib dituruti oleh pemerintah Inggris, namun tetap saja sikap parlemen itu memberi gema yang besar.

Dampak voting bayangan parlemen Inggris ini tidak akan langsung berpengaruh pada Israel, yang selama ini sering melakukan langkah yang menghambat proses perdamaian. Namun, dampak lanjutannya bakal besar karena bisa memunculkan kerugian besar bagi Israel secara politis dan ekonomis.

Angin simpati di dunia internasional memang sedang memihak Palestina. Presiden Mahmoud Abbas menangkap momen ini. Dalam pidatonya yang keras



## SELANGKAH MENUJU PALESTINA MERDEKA

Palestina menggalang dukungan di Dewan Keamanan PBB untuk disahkannya resolusi, yang menetapkan batas waktu bagi Israel untuk mundur dari daerah pendudukan. Pengakuan Swedia dan parlemen Inggris terhadap kemerdekaan Palestina menjadi pendorong semangat.

Oleh: Satrio Arismunandar

di depan Sidang Umum PBB di New York, September 2014, Abbas meminta Dewan Keamanan PBB untuk mendukung resolusi yang menetapkan batas waktu yang jelas bagi penarikan Israel dari wilayah-wilayah pendudukan.

Dalam pidatonya, Abbas juga menuduh Israel telah melakukan kejahatan perang di depan mata dunia, selama aksi militer 50 hari di Gaza yang berakhir dengan gencatan senjata pada 26 Agustus 2014. “Kami tidak akan melupakan dan kami tidak akan mengampuni, dan kami tidak akan membiarkan penjahat perang untuk menghindari hukuman,” tegas Abbas.

Selain pidato, tentu ada langkah konkret. Pada saat artikel ini ditulis, para pejabat Palestina masih bekerja keras melobi anggota Dewan Keamanan PBB. Palestina mencari dukungan bagi resolusi yang



**Presiden Palestina** Mahmud Abbas berbicara di forum Majelis Umum PBB pada 26 September 2014 di New York.

**Perdana Menteri Swedia** Stefan Lofven berbicara di gedung parlemen Swedia.

menetapkan jangka waktu berakhirnya apa yang disebut sebagai “pendudukan kolonial dan rasis.” Langkah Palestina ini seperti biasa ditentang oleh Amerika Serikat dan Israel. Di dalam Dewan Keamanan PBB, AS adalah anggota tetap yang punya hak veto, dan kemungkinan besar AS akan memveto resolusi pro-Palestina tersebut.

### **Pengadilan Pidana Internasional**

Namun, Abbas juga sudah bersiap-siap menghadapi veto. Jika resolusi itu diveto, Abbas akan mempercepat langkah agar Palestina bisa bergabung dengan PBB dan badan-badan internasional lainnya, termasuk akses ke Pengadilan Pidana Internasional (International Court of Justice). Dengan keanggotaan ICC, akan memungkinkan Palestina menuntut Israel sebagai pelaku kejahatan perang, baik atas aksi militer Israel di Gaza

maupun pembangunan permukiman Yahudi yang berkelanjutan di wilayah-wilayah pendudukan. Masalah Jerusalem Timur adalah prioritas utama pemimpin Palestina, dan kota suci tersebut saat ini menghadapi serangan pemukim Yahudi, yang ingin memecah kota itu dan mengosongkannya.

Latar belakang manuver Palestina di panggung internasional ini adalah karena Abbas memandang proses perdamaian Israel-Palestina, yang disponsori AS dan telah berlangsung selama dua dasawarsa, praktis sudah mati. Tidak mungkin untuk dilanjutkan.

“Tidak ada kredibilitas maupun keseriusan dalam negosiasi, di mana Israel bertahan dengan kegiatan permukiman dan kebrutalan pendudukan itu,” tegas Abbas. Hal inilah yang membuat Abbas memilih berjuang untuk meloloskan resolusi di Dewan Keamanan.

Hal lain yang pasti membangkitkan kemarahan Israel dan AS adalah keteguhan Abbas untuk tetap menjalin hubungan dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), yang saat ini dominan di Jalur Gaza. Faksi Fatah pimpinan Abbas yang berideologi nasionalis berkuasa di wilayah Tepi Barat. Persaingan dan ketidakkompakan antara Fatah dan Hamas selama ini melemahkan posisi Palestina dalam berhadapan dengan Israel.

Abbas pada 18 Oktober 2014 mengatakan, ia ingin mempertahankan dialog dengan Hamas guna menuntaskan perujukan serta mengakhiri pertikaian di dalam tubuh Palestina. “Kesepakatan terakhir yang kami capai dengan Hamas dilandasi atas dua masalah utama, pembentukan pemerintah persatuan dan penyelenggaraan pemilihan umum,” kata Abbas. Ia merujuk kepada pembentukan pemerintahan Palestina hasil konsensus Fatah-Hamas, yang diambil sumpahnya pada Juni 2014.

### **Hamas semakin pragmatis**

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Mesir pada 16 oktober 2014, Abbas bahkan menyatakan, ia siap

menyerahkan kontrol Otoritas Palestina ke tangan Hamas, jika gerakan Islam itu memenangkan pemilihan umum di masa depan. Abbas sudah melakukan hal serupa pada 2006, ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina.

Yang menimbulkan konflik kemudian, dalam perspektif Abbas, Hamas waktu itu melakukan kudeta terhadap pemerintah Palestina yang berujung pada terjadinya blokade selama tujuh tahun terhadap Jalur Gaza. “Satu-satunya solusi terhadap situasi di Jalur Gaza dan wilayah-wilayah Palestina adalah mengadakan pemilu yang adil dan transparan, guna menuntaskan proses rekonsiliasi (dengan Hamas),” ujar Abbas.

Hamas, yang sering dipropagandakan Israel sebagai organisasi teroris, sebetulnya adalah organisasi yang umumnya pragmatis, yang berakar dan tanggap terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat Palestina. Hal itu diungkapkan Khaled Hroub, penulis buku *Hamas: A Beginner's Guide*.

Dalam praktiknya, Hamas mendukung solusi dua-negara sesuai dengan garis perbatasan hasil konsensus internasional. Yakni, Israel mundur dari wilayah yang didudukinya sejak 1967, dan negara Palestina berdiri di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Hamas mengemas ini dalam istilah hudna (gencatan senjata) jangka panjang. Istilah ini berakar pada tradisi Islam yang dijadikan dasar oleh Hamas untuk membenarkan dihentikannya jihad atau perjuangan bersenjata.

Hamas, menurut Hroub, juga sudah menimbang-nimbang ide referendum di Palestina sebagai jalan ke arah penyelesaian final. Dengan demikian, hal itu memungkinkan Hamas untuk menyelaraskan posisi awalnya yang berhaluan keras dengan posisi sekarang yang pragmatis. Hamas menyatakan, pihaknya akan menerima apapun hasil yang dipilih oleh rakyat Palestina. Dengan demikian, meski tidak secara eksplisit, Hamas sebenarnya telah mengadopsi demokrasi untuk menyelesaikan masalah ideologi dasar bagi negara Palestina di masa depan. ■

(Diolah dari berbagai sumber)





# Ketika Sepakbola Seperti Sampah

Oleh: Wahyu Romadhony

Tragedi terjadi di lapangan Sasana Krida Akademi Angkatan Udara, Minggu (26/10). Dua tim Divisi Utama liga Indonesia yakni PSS Sleman dan PSIS Semarang menoreng wajah sepakbola Indonesia di dunia internasional. Kedua tim yang saat itu melakoni laga terakhir di Grup 1 depan besar turun dengan tekad sama-sama ingin kalah. PSS Sleman menang dengan skor 3-2, lima gol yang tercipta sore itu semua hasil dari bunuh diri.

Dipimpin oleh Hakim Hulam Simangunsong sejak awal kedua tim sama-sama tampak malas bertanding. Pemain PSS Sleman hanya berdiam saat lawannya memainkan bola di pertahanan sendiri. Begitu juga saat PSIS Semarang menguasai bola. Permainan membosankan

yang ditonton oleh sporter kedua kesebelasan itu monoton hingga menit 86 skor masih 0-0. 'Laskar Sembada' dan 'Laskar Mahesa Jenar' baru memulai kejutan bodoh saat pemain PSS, Hermawan Putra Jati, melakukan gol bunuh diri.

Dalam video yang beredar di jejaring social tampak Hermawan tindak menunjukkan raut menyesal setelah membobol gawang sendiri. Bahkan dua menit kemudian rekan satu timnya Agus Setiawan juga melakukan hal yang sama. PSIS unggul 2-0 atas PSS Sleman.

Pada menit 89 PSIS yang unggul malah bukanya mempertahankan kemenangan justru ikut melakukan gol bunuh diri. Fadli Manan memulai membobol gawangnya sendiri di menit itu. Bahkan pertandingan





bertambah konyol mana kala kedua kesebelasan sibuk mengamankan pertahanan lawan. Saat pemaian dari PSIS Semarang membobol gawang sendiri justru digalau oleh penyerang dari PSS Sleman.

Pertandingan bodoh yang diperagakan kedua tim berakhir setelah Komaedi menambah gol kegawang sendiri sebagai dua kali. Bahkan gol terakhir dilakukan Komaedi dari tengah lapangan tanpa dihalau oleh kipernya sendiri. Justru dari video tampak pemain PSS Sleman menyesal saat timnya menang dari PSIS Semarang.

Pentandingan rekayasa skor yang biasa di sebut “Sepakbola Gajah” tersebut terjadi lantaran keduanya tidak ingin bertemu dengan Borneo FC dibabak Semifinal. Kejanggalan juga terjadi saat pentandingan terakhir antara Borneo FC dan Persis Solo. Beralasan diteror oleh pendukung Borneo FC, Persis Solo memilih tidak bertanding alias walkout (WO).

Komisi Disiplin (Komdis)

#### “Sepakbola Sampah”.

Pertandingan Divisi Utama liga Indonesia antara PSS Sleman dan PSIS Semarang.

Foto Kanan: Hinca Panjaitan

PSSI bergerak cepat merespon terungkapnya skandal tersebut. Ketua Komdis PSSI melakukan investigasi pertandingan tersebut.” Komdis masih akan melakukan investigasi lanjutan kepada pihak-pihak yang terlibat di situ. Jika terbukti mereka terlibat, seperti manajemen atau ofisal, bisa saja mereka turun kasta. Artinya sanksi lain masih menunggu,” tutur Hinca Panjaitan kepada para pewarta.

Hukuman larangan bermain seumur hidup akan dijatuhkan PSSI

saya tidak pilih-pilih tim,” ucap Fadli pada wartawan.

Ancaman hukuman larangan bermain seumur hidup saat ini menghantui Fadli. “Semalam saya tidak bisa tidur, uring-uringan (gelisah) terus. Saya menyesal kenapa ikut-ikutan bunuh diri. Baru sekarang saya menyadari. Kemarin itu karena posisi emosi, jadi tidak berpikir ujungnya bakal begini,” lanjut dia

Setelah mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam



kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persekongkolan tersebut. CEO PT Mahesa Jenar Semarang selaku pengelola PSIS, Yoyok Sukawi membantah telah terjadi pengaturan skor dalam pertandingan tersebut.

“Tidak betul kalau PSIS tidak mau menang. Kalau mau ngatur skor biar kalah, kami bisa saja tidak berangkat dan kalah WO,” ujarnya.

Manager PSS Sleman Suparjiono juga menolok anggapan timnya sengaja bunuh diri untuk menghindari Borneo FC. Salah satu pelaku gol bunuh diri Fadli Manan mengaku dirinya menyesal melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. “Kita emosi, (gol bunuh diri) itu spontan. Kok (PSS) mainnya begitu, bunuh diri. Kita ikut-ikutan. Saya tidak menghindari Borneo FC,

pertandingan tersebut Komdis PSSI memutuskan mendiskualifikasi kedua tim dari Divisi Utama Liga Indonesia. “Karena ini mencederai sepakbola, maka tidak ada alasan tidak mengambil putusan. Dengan berat hati, untuk menegakkan sepakbola Indonesia. Maka Komdis memutuskan mendiskualifikasi keduanya.” Ujar Hinca.

Keputusan ini membuat kedua tim tidak lagi bisa berlaga di putaran semi final. Sanksi ini juga menutup kesempatan keduanya untuk berlaga di ISL. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyayangkan terjadinya pertandingan tersebut. “Ke depan kita harus sportif, terbuka, dan berjiwa besar, sehingga lahir atlet-atlet yang handal, pesepakbola yang bisa kita banggakan,” Ujarnya. ■

## Polda Riau Tersangkakan Ratusan Pembakar Hutan



Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Riau menetapkan 240 orang sebagai tersangka kejahatan kehutanan dari 144 perkara yang ditangani.

“Awalnya adalah 238 tersangka dan ada tambahan dua tersangka lagi dari pihak petinggi perusahaan sehingga totalnya ada 240 orang,” kata Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan di Pekanbaru, Jumat (17/10) siang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari hingga 5 April 2014 dan telah menjalani sidang vonis dan terbukti bersalah dengan dihukum tiga sampai 5,6 bulan penjara.

Selain mendapat hukuman penjara, demikian Kapolda, sebanyak 118 orang terpidana itu juga dikenakan denda mulai Rp10 juta hingga Rp3 miliar.

Sementara itu pada periode 5 April hingga saat ini, demikian Kapolda, telah ditangani sebanyak 74 laporan kasus kejahatan kehutanan yang terdiri dari 33 kasus kebakaran hutan dan lahan, serta 41 pembalakan ilegal.

Dari sejumlah perkara itu, kata dia, telah ditetapkan sebanyak 130 orang sebagai tersangka, 20 masih dalam proses sidang, sembilan perkara masih tahap I dan yang dinyatakan lengkap (P21) ada sebanyak 45 kasus.

“Kemudian ditambah dengan dua tersangka lagi dari pihak korporasi sehingga totalnya ada 240 orang tersangka,” katanya. / Sukardjito - Ant

## Pemekaran Aceh Untuk Kepentingan Elit?

Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aryos Nivada, menduga wacana pemekaran provinsi di Aceh merupakan kepentingan elit.

Sejak sepekan terakhir, politisi di Senayan mewacanakan pemekaran wilayah menjadi Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (Abas).

“Selama ini wacana pemekaran itu selalu muncul setiap tahun. Tak kunjung usai. Namun, patut diingat, MoU Helsinki tak membuka ruang pemekaran wilayah di Aceh,” sebut Aryos.

Disebutkan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla harus komprehensif melihat usulan pemekaran wilayah di Aceh. Alumnus Universitas Gajah Mada itu menyarankan agar Jokowi membentuk tim khusus, untuk mengkaji apakah usulan pemekaran wilayah itu memang kebutuhan



masyarakat di kawasan ALA dan Abas.

“Sehingga bisa diambil kebijakan yang tepat untuk usulan pemekaran wilayah itu,” terang Aryos.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPR RI, Nasir Jamil, Muslim Aiyub, Tagore Abubakar dan Salim Fakhri mewacanakan kembali pemekaran wilayah Aceh. Menurut empat politisi itu, pemekaran tersebut merupakan aspirasi rakyat Aceh yang harus diperjuangkan di tingkat pusat. “Ini untuk kebaikan Aceh juga,” pungkas Salim Fakhri.

/ Sukardjito - Masriadi Sambo



## NTT Masuk Daerah Rawan Kekeringan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan saat ini daerahnya masuk dalam kategori darurat kekeringan.

“Dalam dua hingga tiga bulan ke

depan, beberapa wilayah bakal terancam rawan pangan seperti yang terjadi pada 2010-2011, jika tidak segera diantisipasi secara tepat,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT, Tini Thadeus kepada wartawan di Kupang, Kamis (23/10).

Menuru Tini, pihaknya telah menerima banyak laporan dari sejumlah kabupaten di

Flores, Sumba, dan Timor tentang kekeringan yang cukup parah. Bahkan di TTS, warga terpaksa mengonsumsi air kubangan.

“Jangankan di Timor atau Flores bagian timur dan di Sumba, di Flores Barat juga sudah teriak-teriak kurang air karena sumber-sumber air berkurang debitnya,” jelasnya.

/ Sukardjito - Albertus Vincentius





## Sejumlah Warga Indramayu Mulai Makan Nasi Aking

Sejumlah warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dilaporkan terpaksa makan nasi aking karena gagal panen, sehingga kesulitan mendapatkan beras dampak kemarau berkepanjangan.

“Kemarau berkepanjangan lahan pertanian di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kesulitan mendapatkan beras warga setempat terpaksa makan nasi aking,” kata anggota DPRD Indramayu fraksi PKB, Azun Mauzun, kepada wartawan di Indramayu, Selasa (14/10).

Nasi aking, atau nasi sisa yang dikeringkan kemudian dimasak kembali. Sangat Ironis mengungkap

Indramayu adalah salah satu daerah lumbung beras.

Berdasarkan laporan Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, produksi gabah kering di Kabupaten Indramayu pada 2013 lalu mencapai sedikitnya 1,69 juta ton, melebihi target yang direncanakan. Pada tahun 2012 produksi gabah kering mencapai 1.509.136 ton dari realisasi tanam seluas 122.591 hektare. Itu berarti, produksi gabah kering meningkat sekitar 180 ribu ton, padahal lahan tanam berkurang.

Warsito salah seorang warga Krangkeng Kabupaten Indramayu mengaku, terpaksa makan nasi aking karena sulit mendapatkan beras, setiap kemarau gagal panen.

Menurut dia, nasi aking setiap tahun dimakan oleh masyarakat di Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, bantuan dari Pemerintah setempat sering salah sasaran, selain itu warga mengandalkan olah lahan meski mereka sering gagal panen akibat kemarau.

Sebenarnya kebutuhan air bisa mencukupi tetapi setelah ada pengeboran minyak sumur pompanisasi mengering. / Sukardjito - Ant

## Batal, Pilkada Serentak di Bali

Ketua KPU Bali, I Dewa Kadek Wiarsa Raka Sandi mengatakan batalnya penyelenggaraan pilkada serentak di Bali karena KPU belum bisa menetapkan tahapan pilkada sesuai rencana awal yang seharusnya mulai dilaksanakan hari ini, Selasa 21 Oktober 2014.

“Karena ada perubahan Undang-undang Pilkada, maka KPU tidak bisa menetapkan tahapan pilkada. Rencana awalnya tahapan pilkada resmi dimulai 21 Oktober. Dengan demikian, pilkada serentak tidak bisa digelar 19 Mei 2015. Hari ini secara resmi kami sampaikan rencana (pilkada 19 Mei 2015) tersebut dibatalkan,” jelas Raka Sandi, Kamis (23/10).

Di tengah kegamangan persiapan pilkada itu, menurut Raka Sandi, pihaknya hanya bisa menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU Pusat.

Dijelaskan Raka Sandi, saat ini KPU pusat sedang menyiapkan sejumlah peraturan sebagai bentuk breakdown dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014, baik peraturan KPU tentang pendataan dan pemutakhiran data pemilih, mekanisme pendaftaran kandidat dan tahapan pemilihan sampai pada penetapan tanggal pelaksanaan pilkada.

/ Sukardjito - Bobby Andalan

## Remaja Cirebon Dominasi Penularan HIV/AIDS



Penularan penyakit Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kota Cirebon, Jawa Barat, didominasi oleh remaja.

Sekretaris KPA Kota Cirebon, Sri Maryati, mengatakan, penularan penyakit HIV/AIDS di Kota Cirebon didominasi oleh usia remaja sekitar 15-25 tahun, setiap tahun terus bertambah sehingga butuh kesadaran bersama untuk menekan penyebarannya penyakit tersebut.

“Tahun 2014 kasus HIV/AIDS di Kota Cirebon mencapai 71 penderitanya merupakan remaja, penyebab mereka akibat perilaku seks tidak sehat, berganti-ganti pasangan dan hubungan sejenis,” ucapnya, Selasa (14/10).

Perkembangan penyebaran HIV/AIDS Kota Cirebon sangat memprihatinkan, kata dia, dari berbagai kelompok turut menyumbang penularan penyakit tersebut, terutama kalangan remaja yang berperilaku seks bebas, ditambah pengguna narkoba dan penaja seks komersial dimana semakin maraknya salon plus.

/ Sukardjito - Ant



# Sisi Lain Jokowi

Oleh: Faizal Rizki

Hari itu ada hajatan besar di Solo.

Sejak pagi hari di Kamis pahing, tanggal 1 Bakdamulud yang bertepatan dengan tanggal 23 Februari 2012 sudah terlihat tanda-tanda kesibukan di Solo Technopark, Jalan Ki Hajar Dewantara Jebres Solo.

Ya. Pada Kamis malam itu (masuk malam Jumat pon 24 Februari 2014) Jokowi akan menggelar acara Wilujengan (selamatan) dan Jamasan (pencucian) Mobil Esemka Rajawali AD 1 A dalam adat Jawa sebelum berangkat ke Tangerang untuk uji emisi esok harinya.

Satu set tumpeng lengkap yang berisi nasi gurih, ingkung, sambel goreng ati dan kedelai hitam sudah disiapkan bersama bejana perak berisi air dan bunga setaman tujuh warna.

Tampak disana mobil dinas Wali Kota Esemka warna hitam diuntai kembang setaman dari rangkaian bunga mawar merah dan putih, kantil kuning dan putih, kenanga dan melati yang dianggap sebagai penolak bala.

Sejumlah penari dengan gerakan gemulai mengikuti alunan dandanggula. Ketika gerak dan irama itu sudah mulai menyulap suasana, Wali Kota Jokowi dipersilakan menyiram secara perlahan air bunga tujuh rupa dalam bejana perunggu itu ke mobil. Menyusul kemudian Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Setelah jamasan selesai, enam tokoh agama dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu dan Konghucu bergantian mendoakan agar mobil dinas Wali Kota Solo itu sukses ketika uji emisi. "Kita berdoa untuk keselamatan Esemka dalam perjalanan dan kesuksesan uji emisi Esemka," komentar Jokowi yang saat itu mengenakan beskap lurik khas Solo dihadapan beberapa media.

Dan benar, mobil Esemka Rajawali menjadi salah satu alat penting bagi Jokowi untuk mendongkrak pencitraannya. Meskipun, kabar terakhir, ternyata mobil Esemka bermasalah.

Di Tanjung Priok, Rabu 22 Oktober 2014, beberapa waktu lalu.

Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya tanpa dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski nama menteri belum lengkap karena beberapa nama dikabarkan ditandai merah dan kuning oleh KPK dan PPATK, Presiden tetap akan mengumumkan nama menteri.

Menurut tradisi Istana Kepresidenan, susunan kabinet biasanya diumumkan di Istana Presiden. Dan itu harus

lengkap. Tidak dicicil. Setidaknya, Wapres Jusuf Kalla dalam beberapa pernyataannya, sudah mengisyaratkan hal itu.

Dan memang, akhirnya Jokowi membatalkannya. Lalu muncul spekulasi dan rumor. Mulai dari pengamat, politisi

sampai dan media membicarakan alasan mengapa Jokowi keukeuh ingin mengumumkan pada Rabu 22 Oktober jam 20.00 malam (dalam kalender Jawa, masuk malam Kamis Kliwon) dan mengapa digagalkan.

Namun dari sekian banyak komentar, yang paling menggelitik adalah komentar Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial di kabinet Jokowi: "Saya kira ini karena 1 Muharram (1 Sura.red), hari (atau bulan) yang dianggap jelek ini," kata Khofifah ketika berbincang dengan Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh Malang, Edy Lukmanul Karim bin Abdullah Fattah pada Jumat (24/10/2014) malam (suara.

com).

Sebagai orang Solo yang sangat menghormati etika Jawa Mataraman, Jokowi sebenarnya ingin memberi sinyal politis bahwa dia tidak bisa melakukan hajatan besar pada bulan Sura (Asyuraa, arab.red), awal perubahan tahun Jawa. Ingat, pada Jumat sore Sabtu tanggal 24 Oktober 2014, dalam kalender Jawa sudah masuk bulan Suro yakni tanggal 1 Suro kalender Jawa atau tanggal 1 Muharram dalam kalender Islam.

Bagi orang yang memegang teguh etika Jawa, bulan Sura, terutama malam menjelang 1 Suro, memiliki makna fisik dan spiritual. Bulan Sura menandai bergantinya Naga Dina dan Naga Tahun, yakni berubahnya sifat dan karakter kosmis dan dunia gaib.

Begitu pentingnya bulan Sura, Kesultanan Yogya dan Solo selalu memperingati besar-besaran bulan ini. Ini bulan selain untuk introspeksi diri, juga menjadi tempat untuk melakukan acara selamatan, ruwatan, atau bentuk tradisi lain menolak bala. Jadi, orang Jawa yang masih memegang teguh etika Jawa tidak akan pernah melakukan hajatan besar di bulan ini. Takut terkena bala, katanya. Di beberapa tempat di tanah air dan negara lain juga melakukan hal yang sama, namun lebih pada memperingati syahidnya Sayyidina Husain ibn Abu Thalib ra.

Entah benar atau tidak komentar Khofifah itu. Namun, setidaknya, untuk memahami cara Jokowi melakukan komunikasi politik juga harus dilihat dari sisi yang lain: Etika Jawa. ■



# Memperkuat Daya Saing Industri Dengan Gas Bumi

*"Berkat biaya energy yang lebih murah, sektor industri yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor."*



Mulai tahun 2015 Indonesia akan memasuki babak baru dalam konteks persaingan usaha dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community). Pelaksanaan AEC secara otomatis akan mendorong perdagangan menjadi semakin terbuka. Lalu lintas barang dan jasa dari berbagai negara ASEAN berpotensi untuk membanjiri pasar Indonesia.

Sebagai negara terbesar dengan 237 juta penduduk plus perekonomian terbesar di ASEAN, Indonesia pasti akan menjadi target pasar bagi produk-produk para pelaku usaha dari berbagai negara di kawasan ini. Untuk menghadapi AEC, penguatan daya saing akan menjadi salah satu kunci sukses sektor usaha di Indonesia dalam berkompetisi dengan kompetitornya dari ASEAN.

Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan pemerintah dan para pengusaha nasional untuk memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri. Diantaranya dengan menggunakan energi yang lebih efisien dan sumbernya tersedia sangat besar di Indonesia yaitu gas bumi.

Dengan harga gas bumi yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) industri, para pengusaha mampu menekan beban biaya, sehingga harga produknya ketika sampai di pasar masih sangat kompetitif.

Hingga saat ini ribuan perusahaan dari berbagai industri telah memanfaatkan gas bumi dengan menjadi pelanggan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Sektor industri yang telah melakukan konversi ke gas bumi seperti industri

kimia, keramik, makanan, tekstil, semen dan listrik. Gas bumi PGN ini mengalir melalui jaringan pipa yang dibangun secara mandiri oleh PGN di berbagai wilayah seperti Medan, Batam, Bekasi, Kerawang, Surabaya, Gresik hingga Malang di Jawa Timur.

Juru Bicara PGN Irwan Andri Atmanto mengatakan, dengan menggunakan gas bumi para pelanggan PGN mampu melakukan penghematan biaya energy yang sangat besar. Sebagai contoh pada tahun 2013 PGN menyalurkan gas bumi ke sektor industri, UKM dan rumah tangga sebanyak 827 MMSCFD atau setara dengan 145 ribu barel minyak per hari. Maka dalam setahun nilai penghematan yang bisa dilakukan dengan memakai gas bumi mencapai Rp 55 triliun.

Berkat biaya energi yang lebih murah, sektor industri yang telah menggunakan gas PGN menjadi semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan para kompetitor baik dipasar domestik maupun ekspor.

"Sebagai BUMN yang telah membangun infrastruktur dan menyalurkan gas bumi, PGN memiliki komitmen untuk memperbesar pemanfaatan gas bumi ini, sehingga akan memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional," jelas Irwan.

Irwan menambahkan, pemanfaatan gas bumi juga terbukti mampu mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak. Misalnya penggunaan gas bumi bagi pembangkit listrik berbasis gas milik PLN. Itu sebabnya, PGN kini terus berusaha mempercepat proyek pipanisasi gas dari lapangan gas Kepodang ke PLTGU Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah. "Dengan menggunakan gas bumi, PLTGU Tambak Lorok akan mampu menghemat biaya energy hingga Rp 2 triliun per tahun dan mengurangi subsidi pemerintah," tandas Irwan.

Saat ini PGN telah membangun lebih dari 6000 kilometer jaringan gas bumi diberbagai wilayah di Indonesia. PGN juga menyalurkan gas bumi kepada sektor transportasi, UKM dan rumah tangga dengan tingkat efisiensi dan keamanan yang teruji dan terbukti.



# MAJALAH DIGITAL AKTUAL



Klik [www.aktual.co](http://www.aktual.co) untuk pemesanan  
majalah Aktual versi digital

[m.aktual.co](http://m.aktual.co)  
[www.aktual.co](http://www.aktual.co)

<http://www.facebook.com/aktualco>   
<http://www.twitter.com/Aktualco> 